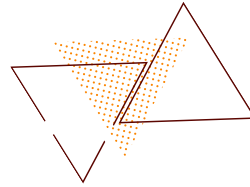


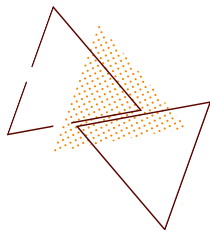


**KABUPATEN
BANYUWANGI**



LPPD 2024

Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Tahun 2024 Kabupaten Banyuwangi



2024



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Penjelasan Umum.....	1
a. Undang-undang Pembentukan Daerah.....	1
b. Data Geografis Wilayah.....	1
c. Informasi Umum Data Kependudukan.....	4
d. Jumlah Kecamatan dan Desa/kelurahan.....	7
e. Rincian Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah.....	8
f. Rincian Aparatur Sipil Negara.....	11
g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	14
h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan.....	15
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	16
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah.....	16
b. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	19
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.....	25
d. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.....	29
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	44



BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	48
2.1 Capaian Kinerja Makro	48
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	48
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil	50
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	50
2.2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	51
a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja.....	51
b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja.....	52
c. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai	112
 BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	 116
3.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.....	116
3.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten.....	117
3.3 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	119
3.3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Kab Banyuwangi.....	119
3.3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kab.....	121
3.4 Permasalahan dan Kendala.....	121
3.5 Saran dan Tindak Lanjut.....	121
 BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDART PELAYANAN MINIMAL ..	 122
4.1 Urusan Pendidikan	122
4.2 Urusan Kesehatan	134
4.3 Urusan Pekerjaan Umum	163
4.4 Urusan Perumahan Rakyat.....	175
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat...	182
4.6 Urusan Sosial.....	201
 BAB V PENUTUP	 218



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan.....	3
Tabel 1.2 Struktur Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	5
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	6
Tabel 1.4 Akta Kelahiran yang Dikeluarkan Tahun 2024	6
Tabel 1.5 Jumlah Desa dan Kelurahan Kabupaten Banyuwangi.....	7
Tabel 1.6 Rincian Perangkat Daerah	8
Tabel 1.7 Rincian PNS Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 (diluar Guru dan Tenaga Kesehatan)	11
Tabel 1.8 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024...	14
Tabel 1.9 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024	14
Tabel 1.10 Integrasi Janji Politis dengan Program Nomenklatur.....	26
Tabel 1.11 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Periode Tahun 2021-2026	29
Tabel 1.12 Perangkat Daerah Pengampu Pelayanan Dasar di Kabupaten Banyuwangi.....	45
Tabel 2.1 Capaian Kinerja Makro Kabupaten Banyuwangi.....	48
Tabel 2.2 Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan	49
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	51
Tabel 3.1 Tugas Pembantuan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024	118
Tabel 3.2 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024	119
Tabel 3.3 Permasalahan Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2024.....	121
Tabel 4.1 Jenis Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan.....	123
Tabel 4.2 Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan atau Jasa.....	124
Tabel 4.3 Standar Jumlah Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	125
Tabel 4.4 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan	126
Tabel 4.5 Hasil Pencapaian SPM Bidang Pendidikan	127
Tabel 4.6 Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan Kab Banyuwangi 2024	129
Tabel 4.7 Dukungan Personil untuk Pencapaian SPM Dinas Pendidikan	131
Tabel 4.8 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	135
Tabel 4.9 Hasil Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	139
Tabel 4.10 Alokasi Anggaran Dinas Kesehatan Kab Banyuwangi Tahun 2024	153
Tabel 4.11 Dukungan Personil untuk Pencapaian SPM Dinas Kesehatan	153



Tabel 4.12	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024.....	164
Tabel 4.13	Hasil Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum	165
Tabel 4.14	Alokasi Anggaran Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi (Bidang Pekerjaan Umum) Tahun 2024	168
Tabel 4.15	Alokasi Anggaran Dinas PU Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024	171
Tabel 4.16	Dukungan Personil untuk Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum DPU Pengairan Tahun 2024	174
Tabel 4.17	Target Dukungan Personil untuk Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum DPUCKPP Kab. Banyuwangi Tahun 2024	174
Tabel 4.18	Target dan Indikator Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2024	176
Tabel 4.19	Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman	177
Tabel 4.20	Alokasi Anggaran Dinas PU Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024	178
Tabel 4.21	Dukungan Personil untuk Pencapaian SPM DPUCKPP	181
Tabel 4.22	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas.....	183
Tabel 4.23	Hasil Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas	184
Tabel 4.24	Alokasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024	192
Tabel 4.25	Alokasi Anggaran (BPBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024	194
Tabel 4.26	Alokasi Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024.....	196
Tabel 4.27	Dukungan Personil Untuk Pencapaian SPM Satpol PP.....	197
Tabel 4.28	Dukungan Personil Untuk Pencapaian SPM BPBD.....	197
Tabel 4.29	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Sosial	201
Tabel 4.30	Alokasi anggaran Dinas Sosial PPKB Kab Banyuwangi.....	214



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Value Visi Pembangunan Kab. Banyuwangi	20
Gambar 1.2 Konstruksi Visi-Misi Kepala Daerah.....	23
Gambar 1.3 Transformasi Misi Kepala Daerah ke Misi Pembangunan Daerah.....	24
Gambar 1.4 Tema Pembangunan dan Prioritas Lima Tahunan Kabupaten Banyuwangi	25
Gambar 1.5 Tema Pembangunan dan Prioritas Lima Tahunan Kabupaten Banyuwangi	23



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri melalui Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah salah satu sumber utama informasi dan bahan evaluasi serta pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga pemerintah daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan mendapatkan *feedback* bagaimana asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat diimplementasikan.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 ini masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Desember 2024 Nomor 100.2.2.7/10582/OTDA tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2024 di semua urusan sudah berjalan baik. Oleh karena itu, semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Banyuwangi.

Banyuwangi, Maret 2025

BUPATI BANYUWANGI



IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-undang Pembentukan Daerah

Pada dasarnya pembentukan suatu daerah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah. Melalui peningkatan pelayanan, percepatan demokrasi, percepatan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban maka peningkatan hubungan serasi antara pusat dan daerah dapat terlaksana. Dengan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembentukan Kabupaten Banyuwangi dipandang perlu dilakukan. Dengan terbentuknya Kabupaten Banyuwangi, kewenangan daerah sebagai daerah otonom akan terintegrasi dan terlaksana dengan pemerintah pusat dan daerah serta mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan. Adapun dasar hukum pembentukan Kabupaten Banyuwangi adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur, yang menggantikan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.

b. Data Geografis Wilayah

Secara geografis Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau Jawa. Berdasarkan garis batas koordinatnya, posisi Kabupaten Banyuwangi terletak diantara $7^{\circ} 43'$ - $8^{\circ} 46'$ Lintang Selatan dan $113^{\circ} 53'$ - $114^{\circ} 38'$ Bujur Timur. Adapun batas administratif wilayah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :





- Sebelah Utara Kabupaten Situbondo;
- Sebelah Timur Selat Bali;
- Sebelah Selatan Samudera Indonesia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Bondowoso



Wilayah Kabupaten Banyuwangi terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan, yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan seperti kopi dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian seperti padi, serta daerah sekitar garis pantai

yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut.

Topografi wilayah daratan Kabupaten Banyuwangi bagian barat dan utara pada umumnya pegunungan dan bagian selatan sebagian besar dataran rendah. Tingkat kemiringan rata-rata pada wilayah bagian barat dan utara 40° , dengan rata-rata curah hujan lebih tinggi bila dibanding dengan bagian wilayah lainnya. Dataran rendah sebagian besar mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 15° , dengan rata-rata curah hujan cukup memadai. Ketinggian tanah di Kabupaten Banyuwangi mencapai 0–2.500 meter dari permukaan laut dan berdasarkan klasifikasi Wilayah Tanah Usaha (WTU)

Kabupaten Banyuwangi yang memiliki luas wilayah 5.782,50 km², masih merupakan daerah kawasan hutan karena besaran wilayah yang termasuk kawasan hutan lebih banyak jika dibandingkan kawasan-kawasan lainnya. Area kawasan hutan mencapai 183.396,34 ha atau sekitar 31,72%; daerah persawahan sekitar 66.152 ha atau 11,44%; perkebunan dengan luas sekitar 82.143,63 ha atau 14,21%; sedangkan yang dimanfaatkan sebagai daerah permukiman mencapai luas sekitar 127.454,22 ha atau 22,04%. Sisanya telah dipergunakan oleh penduduk Kabupaten Banyuwangi dengan berbagai manfaat yang ada, seperti jalan, ladang dan lain-lainnya. Selain penggunaan luas daerah yang demikian itu, Kabupaten Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8 km, serta memiliki pulau sebanyak 38 buah.



c. Informasi Umum Data Kependudukan

Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2024 mencapai 1.785.316 jiwa, dengan komposisi 890.773 jiwa penduduk laki-laki dan 894.543 jiwa penduduk perempuan. Secara rinci sebaran jumlah penduduk tiap kecamatan di Kabupaten Banyuwangi dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Pesanggaran	28.975	28.905	57.880
2	Bangorejo	34.462	34.113	68.575
3	Purwoharjo	36.007	35.915	71.922
4	Tegaldlimo	34.718	34.160	68.878
5	Muncar	70.708	70.195	140.903
6	Cluring	40.616	40.511	81.127
7	Gambiran	34.495	34.771	69.266
8	Srono	50.774	50.665	101.439
9	Genteng	49.074	48.700	97.774
10	Glenmore	38.966	39.769	78.735
11	Kalibaru	33.956	34.335	68.291
12	Singojuruh	26.588	26.880	53.468
13	Rogojampi	28.698	29.400	58.098
14	Kabat	33.253	33.327	66.580
15	Glagah	18.850	19.472	38.322
16	Banyuwangi	59.556	61.456	121.012
17	Giri	16.137	16.528	32.665
18	Wongsorejo	40.718	41.240	81.958
19	Songgon	29.827	29.704	59.531
20	Sempu	44.133	44.181	88.314
21	Kalipuro	43.492	43.701	87.193
22	Siliragung	25.739	25.258	50.997
23	Tegalsari	27.379	27.024	54.403
24	Licin	15.315	15.356	30.671
25	Blimbingsari	28.337	28.977	57.314
Jumlah		890.773	894.543	1.785.316

Sumber : Data Agregat Kependudukan Kemendagri Semester II Tahun 2024

Potensi jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi yang merupakan usia produktif dilihat dari jumlah usia angkatan kerja yakni dari usia 20 sampai 59 tahun sejumlah 57.55%. Selengkapnya jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.2
Struktur Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JUMLAH JIWA	%
1	0 s/d 4	102.892	5,74
2	5 s/d 9	121.597	6,79
3	10 s/d 14	131.350	7,33
4	15 s/d 19	109.772	6,13
5	20 s/d 24	135.793	7,58
6	25 s/d 29	128.767	7,19
7	30 s/d 34	120.994	6,75
8	35 s/d 39	117.600	6,56
9	40 s/d 44	134.626	7,51
10	45 s/d 49	135.185	7,54
11	50 s/d 54	135.558	7,57
12	55 s/d 59	122.780	6,85
13	60 s/d 64	96.313	5,38
14	65 s/d 69	72.645	4,05
15	70 s/d 74	52.726	2,94
16	75 Ke Atas	73.191	4,08
JUMLAH		1.785.316	100,00

Sumber : Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka 2025



Tingkat pendidikan penduduk masih didominasi oleh tingkat pendidikan tamat SD dengan sebesar 521.771 penduduk. Sedangkan untuk jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang lain diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	Belum / Tidak Sekolah	341.406
2	Belum Tamat SD/Sederajat	162.593
3	SD / Sederajat	521.771
4	SLTP / Sederajat	318.246
5	SLTA / Sederajat	355.262
6	Diploma I/II	4.887
7	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	12.354
8	Diploma IV/Strata I	60.298
9	Strata II	3.069
10	Strata III	129

Sumber : Data Agregat Kependudukan Kemendagri Semester II Tahun 2023

Jumlah Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 adalah sejumlah 29.872, dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Akta Kelahiran yang Dikeluarkan Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH AKTA KELAHIRAN
1	Kecamatan Pesanggaran	1.043
2	Kecamatan Bangorejo	1.084
3	Kecamatan Purwoharjo	1.080
4	Kecamatan Tegaldlimo	1.029
5	Kecamatan Muncar	2.460
6	Kecamatan Cluring	1.302
7	Kecamatan Gambiran	1.117
8	Kecamatan Srono	1.572
9	Kecamatan Genteng	1.625
10	Kecamatan Glenmore	1.451
11	Kecamatan Kalibaru	1.550
12	Kecamatan Singojuruh	871
13	Kecamatan Rogojampi	853
14	Kecamatan Kabat	1.159
15	Kecamatan Glagah	626
16	Kecamatan Banyuwangi	1.857
17	Kecamatan Giri	486

NO	KECAMATAN	JUMLAH AKTA KELAHIRAN
18	Kecamatan Wongsorejo	1.533
19	Kecamatan Songgon	968
20	Kecamatan Sempu	1.488
21	Kecamatan Kalipuro	1.501
22	Kecamatan Siliragung	794
23	Kecamatan Tegalsari	1.008
24	Kecamatan Licin	506
25	Kecamatan Blimbingsari	909
Jumlah		29.872

Sumber : Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka 2025

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/ kelurahan

Berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan, Kabupaten Banyuwangi terbagi atas 25 Kecamatan, 189 Desa dan 28 Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.5
Jumlah Desa dan Kelurahan di Banyuwangi

NO	KECAMATAN	JUMLAH	
		DESA	KELURAHAN
1	Pesanggaran	5	-
2	Siliragung	5	-
3	Bangorejo	7	-
4	Purwoharjo	8	-
5	Tegaldlimo	9	-
6	Muncar	10	-
7	Cluring	9	-
8	Gambiran	6	-
9	Tegalsari	6	-
10	Glenmore	7	-
11	Kalibaru	6	-
12	Genteng	5	-
13	Srono	10	-
14	Rogojampi	10	-
15	Kabat	14	-
16	Singojuruh	11	-



NO	KECAMATAN	JUMLAH	
		DESA	KELURAHAN
17	Sempu	7	-
18	Songgon	9	-
19	Glagah	8	2
20	Licin	8	-
21	Banyuwangi	-	18
22	Giri	2	4
23	Kalipuro	5	4
24	Wongsorejo	12	-
25	Blimbingsari	10	-
Jumlah		189	28

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Tahun 2024

e. Rincian Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 6 tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, jumlah perangkat daerah di Kabupaten Banyuwangi adalah 56 (lima puluh enam) perangkat daerah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.6
Rincian Perangkat Daerah

No.	NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
1	Sekretariat Daerah	Perda No. 6 tahun 2020
2	Sekretariat DPRD	Perda No. 6 tahun 2020
3	Inspektorat	Perda No. 6 tahun 2020
4	Dinas Pendidikan	Perda No. 6 tahun 2020
5	Dinas Kesehatan	Perda No. 6 tahun 2020
6	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	Perda No. 6 tahun 2020
7	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	Perda No. 6 tahun 2020
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan	Perda No. 6 tahun 2020

	Keluarga Berencana	
9	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	Perda No. 6 tahun 2020
10	Dinas Perhubungan	Perda No. 6 tahun 2020
11	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Perda No. 6 tahun 2020
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Perda No. 6 tahun 2020
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Perda No. 6 tahun 2020
14	Dinas Pertanian dan Pangan	Perda No. 6 tahun 2020
15	Dinas Perikanan	Perda No. 6 tahun 2020
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Perda No. 6 tahun 2020
17	Dinas Lingkungan Hidup	Perda No. 6 tahun 2020
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perda No. 6 tahun 2020
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	Perda No. 6 tahun 2020
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perda No. 6 tahun 2020
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perda No. 6 tahun 2020
22	Satuan Polisi Pamong Praja	Perda No. 6 tahun 2020
23	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Perda No. 6 tahun 2020
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perda No. 6 tahun 2020
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Perda No. 6 tahun 2020
26	Badan Pendapatan Daerah	Perda No. 6 tahun 2020
27	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Perda No. 6 tahun 2020
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Perda No. 6 tahun 2020
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perda No. 6 tahun 2020
30	RSUD Blambangan	Perda No. 6 tahun 2020
31	RSUD Genteng	Perda No. 6 tahun 2020
32	Kecamatan Banyuwangi	Perda No. 6 tahun 2020
33	Kecamatan Giri	Perda No. 6 tahun 2020
34	Kecamatan Glagah	Perda No. 6 tahun 2020
35	Kecamatan Wongsorejo	Perda No. 6 tahun 2020
36	Kecamatan Kalipuro	Perda No. 6 tahun 2020
37	Kecamatan Singojuruh	Perda No. 6 tahun 2020
38	Kecamatan Kabat	Perda No. 6 tahun 2020



39	Kecamatan Rogojampi	Perda No. 6 tahun 2020
40	Kecamatan Songgon	Perda No. 6 tahun 2020
41	Kecamatan Srono	Perda No. 6 tahun 2020
42	Kecamatan Muncar	Perda No. 6 tahun 2020
43	Kecamatan Cluring	Perda No. 6 tahun 2020
44	Kecamatan Purwoharjo	Perda No. 6 tahun 2020
45	Kecamatan Tegaldlimo	Perda No. 6 tahun 2020
46	Kecamatan Pesanggaran	Perda No. 6 tahun 2020
47	Kecamatan Bangorejo	Perda No. 6 tahun 2020
48	Kecamatan Gambiran	Perda No. 6 tahun 2020
49	Kecamatan Genteng	Perda No. 6 tahun 2020
50	Kecamatan Sempu	Perda No. 6 tahun 2020
51	Kecamatan Glenmore	Perda No. 6 tahun 2020
52	Kecamatan Kalibaru	Perda No. 6 tahun 2020
53	Kecamatan Licin	Perda No. 6 tahun 2020
54	Kecamatan Tegalsari	Perda No. 6 tahun 2020
55	Kecamatan Siliragung	Perda No. 6 tahun 2020
56	Kecamatan Blimbingsari	Perda No. 6 tahun 2020

Sumber : Bagian Hukum Setda Tahun 2025

Adapun unit kerja di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 72 (tujuh puluh dua) unit dengan rincian sebagai berikut :

1. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan (sesuai Peraturan Bupati Banyuwangi No. 14 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi);
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah (sesuai Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi);
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (sesuai Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 67 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi) sebanyak 45 (empat puluh lima) unit yang tersebar di 25 (dua puluh lima) kecamatan;

4. Satuan Pendidikan (sesuai Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Kabupaten Banyuwangi) di 25 (dua puluh lima) kecamatan;

f. Rincian Aparatur Sipil Negara

Sesuai data dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi, pada tahun 2025 jumlah PNS (diluar Guru dan Tenaga Kesehatan) di Kabupaten Banyuwangi adalah 1.623 orang dengan rincian struktural sebanyak 301 orang, fungsional sebanyak 307 orang dan pelaksana sebanyak 1015 orang. Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banyuwangi telah memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

Adapun untuk sebaran PNS berdasarkan jenis Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.7
Rincian PNS Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024
(diluar Guru dan Tenaga Kesehatan)

NO.	PERANGKAT DAERAH	RINCIAN ASN			TOTAL
		Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1.	Sekretariat Daerah	17	25	103	145
2.	Sekretariat DPRD	4	0	16	20
3.	Inspektorat	4	35	7	46
4.	Dinas Pendidikan	10	36	29	75
5.	Dinas Kesehatan	9	13	42	64
6.	Dinas PU Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	5	26	55	86
7.	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	6	7	61	74
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	4	3	18	25
9.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan	6	9	7	22



	Perindustrian				
10.	Dinas Perhubungan	8	6	46	60
11.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	6	19	10	35
12.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6	2	8	16
13.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	6	5	34	45
14.	Dinas Pertanian dan Pangan	6	38	49	93
15.	Dinas Perikanan	5	6	8	19
16.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	7	15	27
17.	Dinas Lingkungan Hidup	7	10	62	79
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	6	10	19
19.	Dinas Pemuda dan Olahraga	1	3	11	15
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3	3	11	17
21.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	7	22	31
22.	Satuan Polisi Pamong Praja	8	0	21	29
23.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5	0	21	26
24.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8	20	10	38
25.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12	2	24	38
26.	Badan Pendapatan Daerah	8	3	35	46
27.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	3	5	26	34
28.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2	5	11	18
29.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	6	10	21
30.	Kecamatan Banyuwangi	38	0	52	90
31.	Kecamatan Giri	13	0	15	28
32.	Kecamatan Glagah	5	0	14	19
33.	Kecamatan Wongsorejo	3	0	9	12
34.	Kecamatan Kalipuro	12	0	18	30
35.	Kecamatan Singojuruh	5	0	5	10
36.	Kecamatan Kabat	1	0	6	7

37.	Kecamatan Rogojampi	3	0	10	13
38.	Kecamatan Songgon	0	0	11	11
39.	Kecamatan Srono	5	0	5	10
40.	Kecamatan Muncar	5	0	9	14
41.	Kecamatan Cluring	3	0	8	11
42.	Kecamatan Purwoharjo	1	0	4	5
43.	Kecamatan Tegaldlimo	1	0	6	7
44.	Kecamatan Pesanggaran	3	0	6	9
45.	Kecamatan Bangorejo	4	0	6	10
46.	Kecamatan Gambiran	3	0	6	9
47.	Kecamatan Genteng	3	0	6	9
48.	Kecamatan Sempu	4	0	4	8
49.	Kecamatan Glenmore	2	0	3	5
50.	Kecamatan Kalibaru	1	0	7	8
51.	Kecamatan Licin	2	0	10	12
52.	Kecamatan Tegalsari	3	0	3	6
53.	Kecamatan Siliragung	2	0	10	12
54.	Kecamatan Blimbingsari	3	0	3	6
TOTAL		301	307	1015	1623

Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Banyuwangi Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah PNS dengan jabatan pelaksana paling banyak dengan jumlah 1015 orang disusul dengan jabatan fungsional dan struktural.



Tingginya pendidikan aparatur pemerintah mempunyai peranan penting dalam menentukan terhadap jalannya roda pemerintahan yang baik. Dengan banyaknya jumlah PNS yang memiliki pendidikan tinggi di Kabupaten Banyuwangi dapat membantu dan melancarkan jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 yang belum teraudit atau unaudited bahwa komposisi belanja daerah Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2024 terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan transfer. Jumlah pagu anggaran belanja daerah Tahun 2024 sebanyak Rp. 3.728.615.122.814 dan terealisasi sebanyak Rp. 3.318.380.677.018,08 atau mencapai 89%, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.8
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Belanja Operasi	2.589.693.792.992	2.368.836.243.404,07	91,47
2.	Belanja Modal	701.652.125.222	527.988.557.014,01	75,25
3.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000	465.328.000,00	2,33
4.	Belanja Transfer	417.269.204.600	421.090.548.600,00	100,92
TOTAL		3.728.615.122.814	3.318.380.677.018,08	89,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi Tahun 2025

Sedangkan Pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2024 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Antar Daerah dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Jumlah pagu anggaran pendapatan daerah Tahun 2024 sebanyak Rp. 3.291.349.266.993 dan terealisasi sebanyak Rp. 3.370.297.295.000,38 atau mencapai 102,40%, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.9
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	630.000.000.000	597.514.670.440,06	94,84
2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.391.912.680.000	2.431.994.967.768,00	101,68
3.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	218.087.845.000	287.225.411.000,00	131,70
4.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	51.348.741.993	53.562.245.792,32	104,31
TOTAL		3.291.349.266.993	3.370.297.295.000,38	102,40

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi Tahun 2025



Berdasarkan data pengelolaan belanja Kabupaten Banyuwangi masing – masing komponen belanja telah diarahkan dan memihak pada kepentingan publik. Penggunaan belanja daerah tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas yang mendukung program – program strategis. Belanja daerah memprioritaskan belanja publik sebagai subyek dan obyek pembangunan daerah di Kabupaten Banyuwangi. Disamping itu inovasi – inovasi terus dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pengembangan jenis kegiatan. Adanya peningkatan daya kreativitas dan dan inovasi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga pembangunan dapat dirasakan secara merata pada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.

h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran belanja dan realisasi belanja tiap program berdasarkan urusan dapat dilihat pada halaman lampiran.

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Adapun beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Banyuwangi yakni sebagai berikut:

- 1) Angka kemiskinan ekstrem memiliki kecenderungan menurun akan tetapi belum optimal
- 2) Balita stunting mengalami penurunan akan tetapi belum cukup signifikan apabila dibandingkan dengan peningkatan yang terjadi pada periode sebelumnya
- 3) Realisasi investasi mengalami penurunan
- 4) Perlu peningkatan terhadap ketahanan pangan



- 5) Minimnya akses modal bagi usaha mikro
- 6) Jumlah produksi perikanan mengalami penurunan
- 7) Tingkat pengangguran terbuka tergolong masih tinggi

Selain berdasarkan permasalahan berdasarkan prioritas pembangunan daerah, identifikasi permasalahan juga dilakukan berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sebagai berikut:

1) Urusan Pendidikan :

Angka putus sekolah meningkat pada jenjang pendidikan menengah

2) Urusan Kesehatan

- Tingkat kecukupan gizi bagi balita meningkat signifikan
- Prevalensi stunting turun dibawah standar WHO dan dibawah rata-rata Jawa Timur serta Nasional

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

-

4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman :

Jumlah rumah tangga hunian layak dan terjangkau meningkat

5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :

Berkurangnya tingkat penanganan terhadap kasus pelanggaran Perda

6) Urusan Sosial :

Persentase PMKS di Kabupaten Banyuwangi mengalami kenaikan

7) Urusan Tenaga Kerja :

Kurangnya tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi

8) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

- Terjadi kecenderungan peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan
- Angka Pemberdayaan Gender semakin membaik

9) Urusan Pangan :

Ketahanan Pangan kecenderungan mengalami penurunan baik dari Pola Pangan Harapan Ketersediaan maupun konsumsi

10) Urusan Lingkungan Hidup :

Selama kurang lebih 2 tahun terakhir, IKLH mengalami peningkatan yang cukup signifikan Sampah yang terbilang cukup banyak masih belum terkelola dengan baik dan maksimal



11) Urusan Pertanahan

Di tahun 2022 penjualan sertifikat tanah cenderung mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2021

12) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

Pelayanan KTP maupun e-KTP sudah Kembali normal Masih terdapat Masyarakat yang enggan untuk melakukan Perekaman KTP-el dikarenakan aksesibilitas tempat layanan yang jauh

13) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

Belum tercapainya nilai optimal dari KB aktif

14) Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana :

–

15) Urusan Komunikasi dan Informatika :

- Infrastruktur IT sudah semakin optimal di setiap penggunaannya
- Infrastruktur penunjang E-Gov sudah bisa diselenggarakan dengan baik dan lancar

16) Urusan Perhubungan :

–

17) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :

- Minimnya kemampuan dan akses terhadap sumber-sumber permodalan
- Rendahnya kemampuan untuk meningkatkan akses dan peluang pasar

18) Urusan Penanaman Modal :

Iklm investasi di Kabupaten Banyuwangi semakin membaik

19) Urusan Kepemudaan dan Olahraga :

Menurunnya persentase pemuda yang terlatih di Kabupaten Banyuwangi

20) Urusan Statistik :

Data informasi dan statistik daerah dikelola secara konsisten dalam kondisi baik

21) Urusan Persandian :

–

22) Urusan Kebudayaan :

Belum optimalnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal di Kabupaten Banyuwangi

23) Urusan Perpustakaan :

Rendahnya minat baca masyarakat dan kurangnya fasilitas penunjang perpustakaan

24) Urusan Kearsipan :

Pengelolaan dokumen daerah dalam kondisi baik

25) Urusan Kelautan dan Perikanan :

Menurunnya jumlah produksi perikanan serta cakupan kelompok nelayan yang mendapat pembinaan

26) Urusan Pariwisata :

- Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara semakin membaik

27) Urusan Pertanian :

- Menurunnya produktivitas padi atau bahan pangan lainnya

28) Urusan Perdagangan :

- Belum pulihnya aktivitas ekspor dan persentase harga komoditas

29) Urusan Perindustrian :

- Menurunnya pertumbuhan sektor industri olahan

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai. Visi pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi untuk periode RPJMD 2021-2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Banyuwangi yang Semakin Maju, Sejahtera dan Berkah”

Memahami substansi Visi merupakan bagian dari upaya membangun value yang harus melekat dalam merencanakan pembangunan Kab. Banyuwangi kedepan. Value Visi inilah yang akan menghantarkan kita dalam menyusun misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih tepat. Beberapa value yang terkandung dalam Visi diatas dapat digambarkan sebagai berikut:





Gambar 1.1. Value Visi Pembangunan Kab. Banyuwangi

Makna dari Visi Pembangunan “Terwujudnya Banyuwangi yang Semakin Maju, Sejahtera, dan Berkah” tidak dapat terlepas dari pencapaian pembangunan pada periode sebelumnya. Sepuluh tahun terakhir ini pembangunan di Kabupaten Banyuwangi dinilai sangat positif oleh masyarakat, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Berbagai macam pencapaian positif dan penghargaan diperoleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Makna “SEMAKIN” yang disematkan dalam Visi Pembangunan di RPJMD ini mengandung nilai dan semangat untuk pencapaian pembangunan 5 tahun kedepan lebih baik dari yang ada saat ini. Tentu ini menjadi tantangan besar yang harus dijawab oleh pemerintahan saat ini. Dalam titik nol kondisi Banyuwangi yang relatif lebih maju saat ini, maksud dari kata “Semakin” ini harus dimaknai sebagai kondisi yang lebih. Lebih dalam hal kebaikan di bidang pembangunan.

Makna “**Semakin Maju**” dalam memahami Visi Pembangunan ini diorientasikan pada aspek kemajuan pembangunan ekonomi, kemajuan pembangunan fisik infrastruktur. Kedua aspek inilah yang diharapkan mampu menjadi pengungkit pembangunan di Banyuwangi. Selain itu makna maju juga dapat diartikan sebagai bentuk posisi Banyuwangi yang mampu berdaya saing dalam konstelasi Nasional maupun Global. Basis ekonomi Banyuwangi diletakkan pada 3 komponen utama yaitu 1) **Pertanian** dalam arti luas yang meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan dan kelautan, kehutanan, perkebunan, dan hortikultura, 2) **Pariwisata**, dalam hal ini wisata alam dan budaya dengan segala

kekhasannya di Banyuwangi, 3) **UMKM**, sebagai wadah dari industri pengolahan dan menjadi sarana penambahan nilai dari hasil pertanian dan diharapkan mampu menjadi daya tarik pariwisata tersendiri. Makna “Semakin maju” secara implisit masuk di Misi pertama **“Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, Perikanan, UMKM, dan Pariwisata Fokus pada Keberdayaan Keluarga untuk Membuka Lapangan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan”** dan didukung pembangunan ekonomi yang maju dengan misi ke empat **“Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Semakin Merata dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan”**

Sedangkan Makna **“Semakin Sejahtera”** ini merupakan manifestasi kondisi Banyuwangi yang harmonis kehidupan sosial masyarakatnya dan kondusif kondisi ketentraman dan ketertiban lingkungannya, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai lokalitas budaya dan karakter masyarakat Banyuwangi. Sejahtera dapat pula dimaknai sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasar, baik secara lahir maupun batin, serta dilaksanakan dengan prinsip keadilan. Keadilan berkaitan dengan aspek kesempatan yang sama oleh masyarakat baik sebagai objek maupun subjek pembangunan. Seluruh masyarakat mempunyai akses yang sama dalam meningkatkan taraf hidupnya, memperoleh pendidikan, kesehatan, mengemukakan pendapat/berpolitik, dan mendapat perlindungan yang sama didepan hukum tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.

Makna **“Semakin Sejahtera”** secara implisit masuk di Misi kedua **“Membangun SDM Unggul, Sehat Jasmani-Rohani, Produktif dan Berkarakter melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya”** dan misi ketiga **“Mewujudkan Masyarakat Berkarakter yang Memegang Teguh Nilai-nilai Keagamaan, Menjaga Keluhuran Adat Istiadat, serta Menguatkan Gotong Royong dan Kerukunan dalam Harmoni Kebhinekaan”**

Tujuan besar pembangunan yang terkandung pada makna semakin maju dan semakin sejahtera ini adalah pembangunan yang diorientasikan sebesar-besarnya untuk masyarakat Banyuwangi. Artinya, dampak pembangunan di Banyuwangi harus bermuara pada peningkatan kemajuan dan kesejahteraan manusianya. Inilah pengejawantahan dari maksud Bung Karno tentang “Pembangunan Manusia Seutuhnya” atau dikenal sebagai People Centre



Development. Cita-cita besar ini tidak akan terwujud dan tidak akan bermakna jika nilai “KEBERKAHAN” tidak menyertai proses pembangunan di Banyuwangi. Maka makna berkah ini dapat diartikan pula sebagai karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan/manfaat bagi kehidupan manusia. Artinya, pembangunan yang diberkahi pastilah akan mendatangkan manfaat dan kebaikan. Keberkahan pasti tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral kehidupan sosial, maka pembangunan yang diberkahi pasti berdampak pada meningkatnya nilai kesalehan sosial masyarakat.



Misi adalah rumusan upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi Pembangunan Daerah merupakan penjabaran dari Misi yang dibawa oleh Kepala Daerah terpilih dalam Pilkada. Dalam Pilkada waktu lalu Bupati dan Wakil Bupati terpilih menetapkan 5 Misi untuk mewujudkan Visi pembangunannya, kelima misi tersebut adalah:

- 1) Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, Perikanan, UMKM, dan Pariwisata Fokus pada Keberdayaan Keluarga untuk Membuka Lapangan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan;
- 2) Membangun SDM Unggul, Sehat Jasmani-Rohani, Produktif dan Berkarakter melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya;
- 3) Mewujudkan Masyarakat Berkarakter yang Memegang Teguh Nilai-nilai Keagamaan, Menjaga Keluhuran Adat Istiadat, serta Memperkuat Gotong Royong dan Kerukunan dalam Harmoni Kebhinekaan;

- 4) Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Semakin Merata dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan;
- 5) Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Tangkas dan Dinamis melalui Transformasi Digital untuk Mewujudkan Birokrasi Produktif dan Kemudahan Berusaha.

Untuk kepentingan menyusun desain perencanaan pembangunan jangka menengah yang baik, maka pemahaman terhadap kerangka berpikir Visi-Misi Kepala Daerah menjadi penting. Kerangka pikir tersebut dapat terlihat jelas dalam konstruksi Visi-Misi kepala daerah sebagai berikut:



Gambar 1.2. Konstruksi Visi-Misi Kepala Daerah

Dalam konteks manajemen strategis, untuk memudahkan Menyusun arsitektur kinerja pembangunan, maka Misi kepala daerah diatas dilakukan transformasi menjadi Misi Pembangunan. Transformasi ini dilakukan dengan tidak menghilangkan makna dan substansi dari Misi Kepala Daerah yang dibawa pada saat pilkada. Transformasi ini dilakukan dengan cara membaca ekstraksi dari makna misi dan melakukan clustering dengan mempertimbangkan bidang dan fungsi dari terjemahan misi tersebut.



Gambar 1.3. Transformasi Misi Kepala Daerah ke Misi Pembangunan Daerah

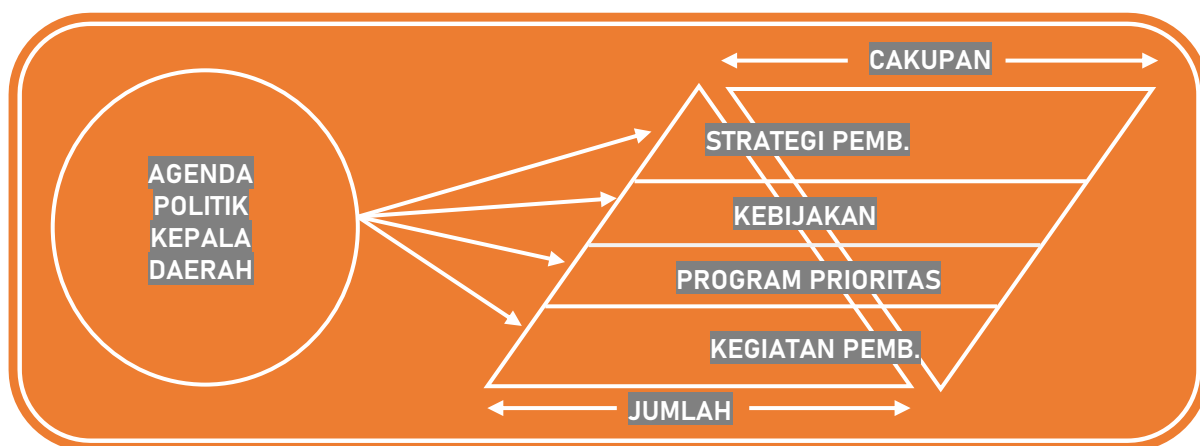
Dengan memperhatikan proses transformasi Misi Kepala Daerah terpilih kepada Misi Pembangunan Daerah, maka Misi Pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sektor unggulan dan menguatkan ketahanan lingkungan;
- 2) Membangun SDM Unggul Berkarakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif;
- 3) Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

Misi pembangunan diatas selanjutnya dijadikan rujukan dalam Menyusun kerangka berpikir pencapaian misi dalam bentuk cascading tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD ini. Cascading pencapaian Misi Pembangunan Daerah ini menunjukkan langkah-langkah intervensi yang harus dilakukan secara berjenjang. Serta menunjukkan ukuran keberhasilan intervensi tersebut serta siapa yang harus melakukan intervensi tersebut. Kerangka ini disusun untuk memberikan kemudahan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun perencanaan strategis sektoral (Renstra Perangkat Daerah) yang harus tetap terhubung dan terintegrasi dengan RPJMD ini.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program prioritas pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang paling tidak mampu merefleksikan tujuan strategis Kepala Daerah terpilih. Suatu program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan janji-janji kampanye Bupati terpilih. Program prioritas pada intinya merupakan substansi dasar dari janji-janji Bupati terpilih. Janji-janji tersebut kemudian didefinisikan kedalam strategi atau kebijakan ataupun kedalam Kegiatan atau Program sesuai nomenklatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Jika bunyi janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih bersifat sangat mikro dan berada di level output, maka akan diterjemahkan kedalam Kegiatan. Namun, apabila sedikit lebih makro dan berada pada level outcome, maka didefinisikan kedalam program yang kemudian disebut program prioritas. Sedangkan jika jauh lebih makro lagi, dapat diterjemahkan ke dalam Strategi. Pernyataan ini dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini:



Gambar 1.4 Tema Pembangunan dan Prioritas Lima Tahunan Kabupaten Banyuwangi

Penentuan program prioritas juga memperhatikan poin-poin penting janji politik kepala daerah terpilih. Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 menterjemahkan Visi dan Misinya melalui program dan janji politisnya sebagai berikut:

Tabel 1.10
Integrasi Janji Politis dengan Program Nomenklatur

Janji Politis	Program Prioritas Daerah	Sinkronisasi Program PMDN 90	Perangkat Daerah
Banyuwangi Membangun	Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman
		Program Penyelenggaraan Jalan	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	
		Program pengelolaan persampahan	
		Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Pencegahan penanggulangan , penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Dinas Damkar
Program Kawasan Pemukiman	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman		
Banyuwangi Bekerja	Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	

Janji Politis	Program Prioritas Daerah	Sinkronisasi Program PMDN 90	Perangkat Daerah	
		Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)		
		Program Pengembangan UMKM		
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan		
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		Program Pemasaran Pariwisata		
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		
		Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
			Program Penempatan Tenaga Kerja	
Program perencanaan dan pembangunan industri				
Program Pengembangan kapasitas daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olah Raga			
Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
Banyuwangi Keluarga Berdaya	Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana	
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga		
		Program Perlindungan Khusus Anak		

Janji Politik	Program Prioritas Daerah	Sinkronisasi Program PMDN 90	Perangkat Daerah
	Percepatan Pengurangan Kemiskinan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan
		Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Sekretariat Daerah
		Program Stabilisasi Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	
Banyuwangi Sehat	Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
Banyuwangi Cerdas Berkarakter	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	
		Program Pengembangan Kurikulum	
		Program pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Banyuwangi Berkah dan Peduli	Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
		Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum	Satpol PP
		Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Banyuwangi Melayani	Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Janji Politis	Program Prioritas Daerah	Sinkronisasi Program PMDN 90	Perangkat Daerah
	Birokrasi		Satu Pintu
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
		Program Kepegawaian Daerah	BKPP
		Program Administrasi Umum	Bagian organisasi
		Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		Program Informasi dan Komunikasi Publik	
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sumber : RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021–2026

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perumusan strategi hasil analisis SWOT, SWOT dipilih untuk dirumuskan menjadi rumusan strategi yang disesuaikan dengan permasalahan dan rumusan visi, misi, tujuan sasaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Setelah melalui proses penilaian dirumuskan strategi terpilih seperti dijelaskan:

Tabel 1.11
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi
Periode Tahun 2021–2026

Visi: Terwujudnya Banyuwangi yang Semakin Maju, Sejahtera, dan Berkah			
Misi I: Membangun Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sektor unggulan dan menguatkan ketahanan lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	
T1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	S1.1 Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah yang	ST.1 Membangun infrastruktur tematik untuk pengembangan pariwisata yang diikuti dengan	



yang Berdampak pada Penurunan Kemiskinan	Berkelanjutan	berkembangnya produktivitas sektor UMKM dan Pertanian yang disertai penguatan investasi, akses pasar dan pendampingan pelaku usaha yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan
	S1.2 Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan untuk Keberdayaan Keluarga	ST. 2 Meningkatkan Kesejahteraan keluarga di Desa melalui penyediaan lapangan kerja yang padat karya dan bantuan permodalan wirausaha dengan memperhatikan peran perempuan dalam keberpihakan akses pendapatan dan perlindungan hukum
Misi II: Membangun SDM Unggul Berkarakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif		
T.2 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Berkarakter	S2.1 Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan dan Non Pangan	ST 3 Menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing yang berfokus pada keterjangkauan pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, peningkatan preventif dan promotif dalam kesehatan, serta kestabilan harga pangan untuk keterjangkauan daya beli masyarakat.
	S2.2 Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya	ST 4 Penguatan Modal Sosial yang meletakkan kapitalisasi atas nilai nilai dan kekayaan budaya melalui proses modernisasi, serta menjaga kondusifitas daerah

Misi III: Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis;		
T.3 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	S.3.1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan sampai Desa	ST 5 Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan sampai desa yang berorientasi pada peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Sumber : RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021–2026

ST.1 Membangun infrastruktur tematik untuk pengembangan pariwisata yang diikuti dengan berkembangnya produktivitas sektor UMKM dan Pertanian yang disertai penguatan investasi, akses pasar dan pendampingan pelaku usaha yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu bagian dari strategi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menunjang pembangunan di sektor ekonomi. Kabupaten Banyuwangi dengan luas wilayah yang mencapai 5.782,50 Km² memerlukan ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata sebagai roda penggerak pengembangan sektor unggulan, dimana Kabupaten Banyuwangi memiliki berbagai potensi di sektor Pariwisata, UMKM, dan Pertanian yang harus terus dikembangkan.

Pariwisata saat ini menjadi salah satu motor penggerak perekonomian di Kabupaten Banyuwangi. Pengembangan sektor pariwisata sangat terkait dan bergantung pada perkembangan infrastruktur yang tersedia. Peran infrastruktur menjadi sangat penting, karena dengan pengembangan infrastruktur dan sistem infrastruktur yang tersedia akan dapat mendukung perkembangan sektor tersebut, dimana kemudahan akses maupun ketersediaan sarana dan prasarana akan mendorong masyarakat Kabupaten Banyuwangi maupun dari luar daerah untuk berkunjung ke destinasi pariwisata yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi. Apalagi Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu wilayah pengembangan di Provinsi Jawa Timur yang termasuk dalam Kawasan Selingkar



Ijen sebagai Pendukung Kawasan Bromo Tengger-Semeru. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 80 Tahun 2019, pada sektor pariwisata potensi geopark yang sudah ada di Kabupaten Banyuwangi dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata baru berbasis geologi dengan didukung oleh berbagai sarana dan prasarana. Selain itu, pembangunan dan pengembangan kawasan pendukung sektor perekonomian di bidang infrastruktur dan industri di Kabupaten Banyuwangi berpotensi untuk dikembangkan sebagai program pemerataan pembangunan di Kawasan Pendukung Selingkar Ijen. Untuk itu dibidang pariwisata diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur tematik dan fasilitas publik pendukung kawasan pariwisata strategis, disamping dilakukan pendampingan kepada pelaku pariwisata dan peningkatan promosi pariwisata Kabupaten Banyuwangi.



Pembangunan di Kabupaten Banyuwangi mampu mendorong pengembangan pariwisata diharapkan juga turut mendukung berkembangnya produktivitas sektor UMKM dan Pertanian yang disertai penguatan investasi, akses pasar dan pendampingan pelaku usaha. Infrastruktur memiliki peran yang sangat penting baik dalam proses produksi maupun dalam menunjang distribusi komoditi ekonomi. Fasilitas transportasi memungkinkan produk (barang dan jasa) dapat dipasarkan dari Kabupaten Banyuwangi menuju daerah lain di Indonesia atau luar negeri, sehingga dengan demikian turut meningkatkan akses pasar dari produk-produk yang dihasilkan di Kabupaten Banyuwangi. Apalagi

Kabupaten Banyuwangi memiliki berbagai komoditas dengan hasil produksi tertinggi di Sektor Agropolitan, seperti: jeruk siam, buah naga, jagung, kedelai, kopi, dan padi ladang yang dapat dikembangkan. Keberadaan infrastruktur juga merupakan elemen yang sangat penting dalam mendukung proses produksi dari sektor-sektor ekonomi, seperti pertanian, perdagangan dan industri (UMKM). Keberadaan infrastruktur akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas bagi faktor-faktor produksi, serta mendukung berkembangnya investasi di Kabupaten Banyuwangi. Untuk itu diperlukan pengembangan konektivitas perhubungan, penyediaan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan, peningkatan infrastruktur irigasi dan embung dalam mendukung ketersediaan air bersih khususnya di kawasan pedesaan, maupun peningkatan kualitas jalan. Selain itu, untuk menunjang berkembangnya produktivitas sektor UMKM dan Pertanian perlu adanya penguatan jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro, peningkatan sistem dan jaringan distribusi barang; pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional; penguatan Kualitas dan diversifikasi produk UMKM serta kelembagaan pelaku usaha UMKM melalui pendampingan; penguatan kelembagaan kelompok petani dan nelayan; serta pemberian bantuan stimulan asuransi gagal panen.



Dengan berkembangnya sektor pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, serta meningkatnya produktivitas sektor UMKM dan Pertanian yang ditunjang dengan adanya perkembangan investasi akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal. Sehingga dengan demikian jumlah tenaga kerja lokal yang terserap akan semakin banyak dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Banyuwangi akan semakin menurun.

Seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperlukan adanya keseimbangan terhadap ekosistem lingkungan, dimana dari aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat dipastikan tidak memiliki dampak/ merusak kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan di bidang ekonomi perlu dibarengi dengan pembangunan sektor lingkungan, agar terwujud pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, tingkat risiko terhadap bencana juga turut diperhatikan. Jangan sampai dengan meningkatnya pembangunan ekonomi justru menimbulkan permasalahan baru bagi lingkungan hidup dan menimbulkan terjadinya bencana, atau bahkan pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan akan sia-sia dengan hadirnya bencana tanpa adanya pertimbangan terhadap tingkat risiko dari bencana tersebut. Sehingga untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan diperlukan mitigasi dan pengendalian terhadap bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Banyuwangi diperlukan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka mengurangi pencemaran air dan reduksi emisi karbon; diperlukan pengelolaan persampahan bersama dengan masyarakat, serta diperlukan adanya pengendalian alih fungsi lahan produktif dan rehabilitasi lahan kritis. Berikut merupakan arah kebijakan dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Banyuwangi:

- 1) Bantuan Penyediaan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan
- 2) Penguatan Kelembagaan kelompok petani dan nelayan dalam meningkatkan manajemen pengelolaan
- 3) Bantuan stimulan asuransi gagal panen pada petani dan nelayan
- 4) penguatan pengenalan konsumsi perikanan tangkap maupun budidaya lokal

- 5) peningkatan infrastruktur irigasi dan embung untuk menanggulangi debit air dan kekeringan
- 6) penyediaan sistem penyediaan air bersih di kawasan pedesaan
- 7) peningkatan kualitas jalan penunjang perekonomian masyarakat
- 8) Percepatan infrastruktur tematik dan fasilitas publik pendukung kawasan pariwisata strategis
- 9) Penguatan jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro dengan menjalin kolaborasi pasar domestik maupun luar negeri
- 10) Penguatan Kualitas dan diversifikasi produk UMKM serta kelembagaan pelaku usaha UMKM melalui pendampingan UMKM naik kelas dan siap ekspor
- 11) Peningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional
- 12) Pendampingan kelembagaan, sertifikasi dan bantuan kepada pelaku pariwisata dan ekraf
- 13) Pengendalian alih fungsi lahan produktif dan rehabilitasi lahan kritis guna meningkatkan kualitas penataan ruang
- 14) Mengurangi pencemaran air dan reduksi emisi karbon dengan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup
- 15) pengelolaan persampahan bersama masyarakat
- 16) Membangun konektivitas perhubungan
- 17) Peningkatan mitigasi dan penanggulangan bencana

ST. 2 Meningkatkan Kesejahteraan keluarga di Desa melalui penyediaan lapangan kerja yang padat karya dan bantuan permodalan wirausaha dengan memperhatikan peran perempuan dalam keberpihakan akses pendapatan dan perlindungan hukum.

Peningkatan kesejahteraan keluarga di desa dapat dilakukan dari berbagai sisi pada konteks ekonomi. Salah satunya dengan penyediaan lapangan kerja melalui proyek padat karya sehingga dapat mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja lokal. Hal tersebut dapat disokong dengan adanya pelatihan pada angkatan kerja guna meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM mengenai ekonomi



berbasis teknologi dan digital yang akan berdampak pada peningkatan daya saing pada kebutuhan industry saat ini serta pengembangan klaster industry yang lebih luas.

Titik utama peningkatan kesejahteraan juga dapat dilakukan melalui peningkatan pendapatan yang dapat dilakukan dengan pengembangan wirausaha maupun penumbuhan wirausaha baru. Adanya bantuan usaha yang tepat sasaran serta pengembangan peningkatan iklim wirausaha yang simultan dirasa dapat menjadi strategi yang tepat. Sedangkan penumbuhan wirausaha baru dilakukan dengan peningkatan iklim wirausaha yakni melalui program inkubasi bisnis pada pengusaha muda baru di Banyuwangi yang dapat menjadi skema pemulihan ekonomi daerah. Penumbuhan wirausaha baru didukung dengan adanya bantuan usaha dan logistic melalui program bagi alat usaha gratis untuk warga. dan program Gerakan ekonomi rakyat bantu warung yang memberikan bantuan untuk mendorong warung lebih berdaya.

Pemulihan ekonomi haruslah disokong oleh berbagai pihak, mulai dari setiap individu termasuk perempuan perlu diberdayakan untuk memiliki akses pendapatan guna menyokong ketahanan ekonomi keluarga. Perempuan diberdayakan dengan diberikan akses pendidikan, bantuan modal usaha serta perlindungan hukum mengingat angka kekerasan perempuan yang tinggi pada Kabupaten Banyuwangi. Perempuan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi keluarga.



Selain pada sisi individu, peningkatan kesejahteraan keluarga di desa juga perlu disokong oleh pemerintah desa melalui kemitraan dengan lembaga-lembaga perekonomian dan penyelenggaraan BUMDes dengan memanfaatkan potensi yang ada meliputi pariwisata, pertanian dan UMKM. Beberapa program difokuskan pada hal tersebut yakni meliputi peningkatan kualitas UMKM melalui pendampingan yang inklusif dan terintegrasi, peningkatan kelas UMKM, serta mendorong masyarakat untuk mensupport produk-produk UMKM.

- Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Angkatan Kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar.
- Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi untuk menyerap tenaga kerja.
- Pelaksanaan inkubasi bisnis penciptaan pengusaha muda baru sebagai skema pemulihan ekonomi.
- Pengembangan ekonomi desa dengan kemitraan dan BUMDes yang berfokus pada pariwisata, pertanian dan UMKM.
- Peningkatan ketahanan keluarga melalui kesempatan pendidikan dan usaha bagi perempuan serta bantuan hukum perlindungan perempuan dan anak
- Peningkatan bantuan usaha dan logistik bagi PMKS yang tepat sasaran.

ST 3 Menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing yang berfokus pada keterjangkauan pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, peningkatan preventif dan promotif dalam kesehatan, serta kestabilan harga pangan untuk keterjangkauan daya beli masyarakat.

Strategi menciptakan SDM unggul dan berdaya saing tentunya memperhatikan Tujuan dan Sasaran Pembangunan SDM Kabupaten Banyuwangi dengan tujuan yakni “Menciptakan Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter” kemudian tujuan pembangunan SDM tersebut diturunkan kedalam saran “Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan dan Non Pangan”.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa strategi pembangunan SDM merupakan tools untuk terciptanya SDM yang unggul dan berakarakter, dimana representasi SDM unggul dan berakarakter di Kabupaten Banyuwangi

ialah SDM yang mana dapat memiliki akses dan kualitas pada sektor pendidikan, kesehatan, dan komoditas pangan dan non pangannya. Untuk mencapai hal tersebut Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan poin-poin penting strategi pengembangan SDM yakni pendidikan dasar yang terjangkau hingga pendidikan tinggi, peningkatan preventif dan promotive kesehatan, dan stabilisasi harga pangan guna menjangkau daya beli masyarakat. Harapannya dengan demikian akan terciptanya tujuan pembangunan SDM yang Unggul dan Berkarakter.



Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi, strategi kemudian akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan. Arah kebijakan pembangunan disusun lebih konkrit yang sekaligus memberikan arahan dan panduan agar strategi dapat berjalan lebih optimal. Berikut merupakan arah kebijakan dalam pembangunan SDM Kabupaten Banyuwangi:

- Peningkatan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam dalam stabilitas harga pangan dan barang penting
- peningkatan kualitas pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai agama, etika, dan budaya lokal serta mendukung kebutuhan pasar tenaga kerja
- Peningkatan dukungan kerjasama perguruan tinggi dan pendidikan kejuruan
- Keberpihakan beasiswa lanjut yang dapat menjangkau masyarakat desa

- Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif,
- Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang menjangkau seluruh desa
- Penguatan Desa dalam menghadapi penyakit menular
- Peningkatan kesejahteraan, Kompetensi dan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Penguatan literasi berbasis digital

ST 4 Penguatan Modal Sosial yang meletakkan kapitalisasi atas nilai-nilai dan kekayaan budaya melalui proses modernisasi, serta menjaga kondusifitas daerah

Strategi menciptakan penguatan modal sosial masyarakat Kabupaten Banyuwangi tentunya memperhatikan Tujuan dan Sasaran Pembangunan SDM Kabupaten Banyuwangi. Pembangunan modal sosial yang dibangun dilandaskan dalam ruang lingkup masyarakat yang berkarakter dan berbudaya. Modal sosial yang kondusif tentunya menjadi modal utama dalam pembangunan daerah. Modal sosial yang kuat akan meningkatkan semangat gotong-royong, meningkatkan produktivitas, mengurangi kriminalitas, serta dapat mendorong setiap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Selain itu keberagaman sosial budaya Kabupaten Banyuwangi juga merupakan modal berharga, khususnya Kabupaten Banyuwangi yang menjadikan pariwisata budaya sebagai prioritas daerah. Masyarakat yang berbudaya akan menciptakan daya tarik pariwisata tersendiri di Kabupaten Banyuwangi. Modal sosial tidak hanya tentang hubungan antara masyarakat dengan masyarakat, pembangunan modal sosial di Kabupaten Banyuwangi juga dibangun antara hubungan masyarakat dengan pemerintah. Menjaga harmonisasi hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif, sehingga masyarakat mau dan mampu untuk berkontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Banyuwangi. Sejalan dengan uraian diatas, berikut merupakan arah kebijakan pembangunan modal sosial masyarakat Kabupaten Banyuwangi:



- Fasilitasi forum keagamaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga kerukunan dan solidaritas



- Peningkatan insentif, pelestarian, dan pengakuan atas seni dan budaya lokal, serta penguatan minat budaya untuk pariwisata dan ketertarikan siswa atas budaya lokal
- penegakan perda dengan edukasi masyarakat

ST 5 Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan sampai desa yang berorientasi pada peningkatan kapasitas fiskal daerah

Pemerintahan yang dinamis dan adaptif artinya memberikan perbaikan internal pemerintah, peningkatan layanan publik, dan pemerintahan yang memperhatikan kebutuhan adaptif masyarakatnya. pemerintahan adaptif adalah pemerintahan yang mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif. Pemerintahan ini mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat. Pemerintahan yang dinamis adalah pemerintah yang bertindak progresif dan adaptif guna mewujudkan hasil yang efektif bagi daerah dan masyarakat. Masyarakat sebagai customer yang harus dilayani menuntut pelayanan prima, cepat, dan tanggap. Dalam pelayanan publik Pemerintah

Kabupaten Banyuwangi harus beradaptasi dengan tuntutan agile birokrasi atau birokrasi yang tangkas.

Media peningkatan kualitas layanan bisa dilakukan dengan digitalisasi layanan publik dan menempatkannya dekat dengan masyarakat dan lebih efektif dan efisien. Termasuk bagaimana pemerintah Kabupaten Banyuwangi mampu merespon secara cepat keluhan-keluhan dari masyarakat. Hal tersebut tidak akan terwujud tanpa berbasis aplikasi serta mendukung seluruh aktivitas pelayanan kepada masyarakat sampai desa.

Optimalisasi Pendapatan Daerah bertujuan untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur keuangan daerah, karena merupakan salah satu tolok ukur/ indikator kemampuan dan cermin dari kemandirian daerah. Penurunan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih dianggap sebagai hambatan dan harus segera dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat. Untuk itu pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus selalu ditingkatkan dan dilakukan secara efektif dan efisien. Disisi lain, penyediaan alternatif pembiayaan pembangunan daerah perlu ditempuh oleh Pemerintah Daerah sebagai terobosan dalam memperbanyak sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi. Salah satu wujud peningkatan pendapatan asli daerah melalui revitalisasi peran BUMD dan inovasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

Berikut merupakan arah kebijakan dalam pembangunan manajemen pemerintahan dan layanan publik Kabupaten Banyuwangi yaitu :

- Permudah dan percepat pelayanan perijinan usaha dan kependudukan sampai ke tingkat desa
- Penguatan perencanaan, keuangan, pengawasan dan kelembagaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasiskan e-government
- Penguatan aparatur pemerintah yang profesional dan adaptif
- Peningkatan Infrastuktur teknologi informatika yang menunjang pelayanan publik
- Optimalisasi fungsi BUMD dalam peningkatan kapasitas fiskal daerah



Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.



Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan diatas, maka dapat disimpulkan tema atau fokus pembangunan. Tema dan prioritas Daerah pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPJMD setiap tahun. Penetapan tema tahunan pada RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan arahan yang mengacu dari tema pembangunan tahap keempat pada RPJPD Kabupaten Banyuwangi, maka tema pembangunan Tahun 2021 - 2026 disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 1.5 Tema Pembangunan dan Prioritas Lima Tahunan Kabupaten Banyuwangi

Tema tahun 2024 yang ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Banyuwangi yaitu **“percepatan pembangunan ekonomi inklusif dan berkualitas yang di akselerasi oleh infrastruktur tematik pariwisata dalam mendukung kawasan ekonomi strategis”**. tetapi isu mengalami perubahan pada tahun 2024, sehingga terjadi penyesuaian tema di tahun 2024 yang mengakomodir hasil evaluasi capaian kinerja dan arah kebijakan nasional maupun arah kebijakan provinsi. Prioritas RPJMD tahun pada tahun 2024 antara lain:

1. Akselerasi infrastruktur layanan dasar dan fasilitasi publik pendukung geopark ijen serta infrastruktur yang beririsan dengan nasional
2. Pembangunan infrastruktur penunjang lingkungan hidup dan kebencanaan
3. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya
4. Penguatan pariwisata yang didukung oleh agrowisata dan industri olahan wisata berkelanjutan
5. Peningkatan manajemen pemerintahan dan layanan sampai tingkat desa

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Lahirnya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyempurnakan konsep otonomi daerah di era modern. Dalam undang - undang tersebut, Pemerintah Daerah dengan konsep otonominya pada dasarnya bertujuan untuk menyederhanakan pelayanan pemerintahan pada konteks geografis dan demografis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan memberikan sebagian kewenangan yang ada di Pemerintah Pusat ke pemerintah Daerah atau yang disebut desentralisasi, harapannya adalah bahwa pelayanan pemerintah semakin didekatkan kepada warganya dan selanjutnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dapat ditingkatkan secara terus menerus seiring dengan semakin seringnya interaksi antara warga dengan pemerintahnya.

Oleh karena itu untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan akses pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah melalui Pemerintah Daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, maka pelayanan yang diberikan bukan hanya pelayanan yang diorientasikan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, tetapi harus berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada pasal 18 ayat 1 dan 3 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa "Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang ketentuan lebih lanjut mengenai SPM diatur dalam Peraturan Pemerintah".

Untuk menindaklanjuti amanat undang - undang tersebut maka, Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.

Adapun jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri atas beberapa bidang antara lain :

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
- 6) Sosial.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal mengamanatkan indikator SPM harus terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021- 2026 telah mengakomodir hal tersebut pada sub kegiatan di perangkat daerah pengampu urusan pelayanan dasar. Walaupun memang belum maksimal diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) masing – masing.

Di Kabupaten Banyuwangi terdapat 8 (delapan) Perangkat Daerah yang mengampu 29 (dua puluh sembilan) jenis – jenis pelayanan dasar daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.12
Perangkat Daerah Pengampu Pelayanan Dasar di Kabupaten Banyuwangi

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH
1.	Pendidikan anak usia dini	Dinas Pendidikan
2.	Pendidikan dasar	Dinas Pendidikan
3.	Pendidikan kesetaraan	Dinas Pendidikan
4.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Dinas Kesehatan
5.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Dinas Kesehatan

6.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Dinas Kesehatan
7.	Pelayanan kesehatan balita	Dinas Kesehatan
8.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Dinas Kesehatan
9.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Dinas Kesehatan
10.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Dinas Kesehatan
11.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Dinas Kesehatan
12.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Dinas Kesehatan
13.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Dinas Kesehatan
14.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Dinas Kesehatan
15.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Dinas Kesehatan
16.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Dinas PU Pengairan
17.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Pemukiman
18.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Pemukiman
19.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Pemukiman
20.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
21.	Pelayanan Informasi rawan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
22.	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
23.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
24.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran
25.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Dinas Sosial
26.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Dinas Sosial
27.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Dinas Sosial
28.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya	Dinas Sosial

	gelandangan dan pengemis di luar panti	
29.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	Dinas Sosial



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Semua data dan capaian kinerja makro didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuwangi maupun Provinsi Jawa Timur. Adapun capaian kinerja makro Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro Kabupaten Banyuwangi

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	73.79	74.30	0.69
2	Angka Kemiskinan	7.34	6.54	-10.89
3	Angka Pengangguran	4.75	4.03	-15.15
4	Pertumbuhan Ekonomi	5.03	4.68	-6.95
5	Pendapatan Perkapita	101,296.62	108,922.59	7.52
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.351	0.312	-11.11

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Adapun *mapping*

perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan wajib maupun pilihan di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan

PER URUSAN PEMERINTAHAN		
1	Pendidikan	: Dinas Pendidikan
2	Kesehatan	: Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	: Dinas PU CKPP
		: Dinas PU Pengairan
		: Dinas Lingkungan Hidup
4	Perumahan Rakyat	: Dinas PU CKPP
		: Bagian Pemerintahan Setda
5	Trantibumlinmas	: Satpol PP
		: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6	Sosial	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB
7	Tenaga Kerja	: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Industri
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB
9	Pangan	: Dinas Pertanian dan Pangan
10	Pertanahan	: Dinas PU CKPP
		: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		: Bagian Pemerintahan Setda
11	Lingkungan Hidup	: Dinas Lingkungan Hidup
12	Administrasi Kependudukan dan Capil	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
14	Pengendalian Penduduk dan KB	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB
15	Perhubungan	: Dinas Perhubungan
16	Komunikasi dan Informatika	: Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Koperasi dan UKM	: Diskop UKM dan Perdagangan
18	Penanaman Modal	: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	Pemuda dan Olahraga	: Dinas Pemuda dan Olahraga
20	Statistik	: Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Persandian	: Dinas Komunikasi dan Informatika

22	Kebudayaan	:	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
23	Perpustakaan	:	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Kearsipan	:	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
25	Kelautan	:	Dinas Perikanan
26	Pariwisata	:	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
27	Pertanian	:	Dinas Pertanian dan Pangan
28	Perdagangan	:	Diskop UKM dan Perdagangan
29	Industri	:	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Industri
30	Transmigrasi	:	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Industri
FUNGSI PENUNJANG			
1	Perencanaan dan Keuangan	:	Inspektorat
		:	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
2	Pengadaan	:	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
3	Kepegawaian	:	Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan
4	Manajemen Keuangan	:	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5	Transparansi Publik	:	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran (output) dapat dilihat dalam Lampiran Capaian IKK Outcome.

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Pencapaian Indikator Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dapat dilihat dalam Lampiran Capaian IKK FPUP.

2.2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

a. target kinerja dalam perjanjian kinerja

Sebagai upaya memperhitungkan dan mengelola dampak pembangunan secara berkelanjutan, memprioritaskan kepentingan masyarakat, dan dilaksanakan monitoring dan evaluasi dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merumuskan kebijakan yang akan dicapai tahun 2024, dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Pada Tahun 2024 Kabupaten Banyuwangi tidak melakukan penyesuaian target pada perjanjian kinerja sehingga indikator dan target tidak mengalami perubahan sesuai dengan Target Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 sesuai dengan Dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Tujuan Strategis 1			
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan yang Berdampak pada Penurunan Kemiskinan			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
IKTS 1. Pertumbuhan Ekonomi		%	4,81
Sasaran Strategis 1 Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan			
IKSS 1.1	Indeks daya saing pariwisata	Indeks	3
IKSS 1.2	Pertumbuhan PDRB sektor unggulan	%	3.57
IKSS 1.3	Indeks kepuasan layanan infrastruktur (IKLI)	Indeks	82,74
IKSS 1.4	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Indeks	71.23
IKSS 1.5	Indeks resiko bencana	Indeks	124,22
IKTS 2. Persentase Penduduk Miskin		%	7,32
Sasaran Strategis 2 Meningkatkan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan untuk keberdayaan keluarga			
IKSS 2.6	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	Indeks	77,95
IKSS 2.7	Tingkat pengangguran terbuka	%	4.68
IKSS 2.8	Gini Ratio	Rasio	0.310

Tujuan Strategis 2			
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
IKTS 3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Indeks	71.75
Sasaran Strategis 3 Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan dan Non Pangan			
IKSS 3.9	Indeks Pendidikan	Indeks	0.62
IKSS 3.10	Indeks Kesehatan	Indeks	0.78
IKSS 3.11	Indeks Pengeluaran	Indeks	0.78
Sasaran Strategis 4 Meningkatkan Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya			
IKSS 4.12	Indeks kesalehan sosial (IKS)	%	66.00
IKSS 4.13	Indeks pembangunan kebudayaan	Indeks	60.00

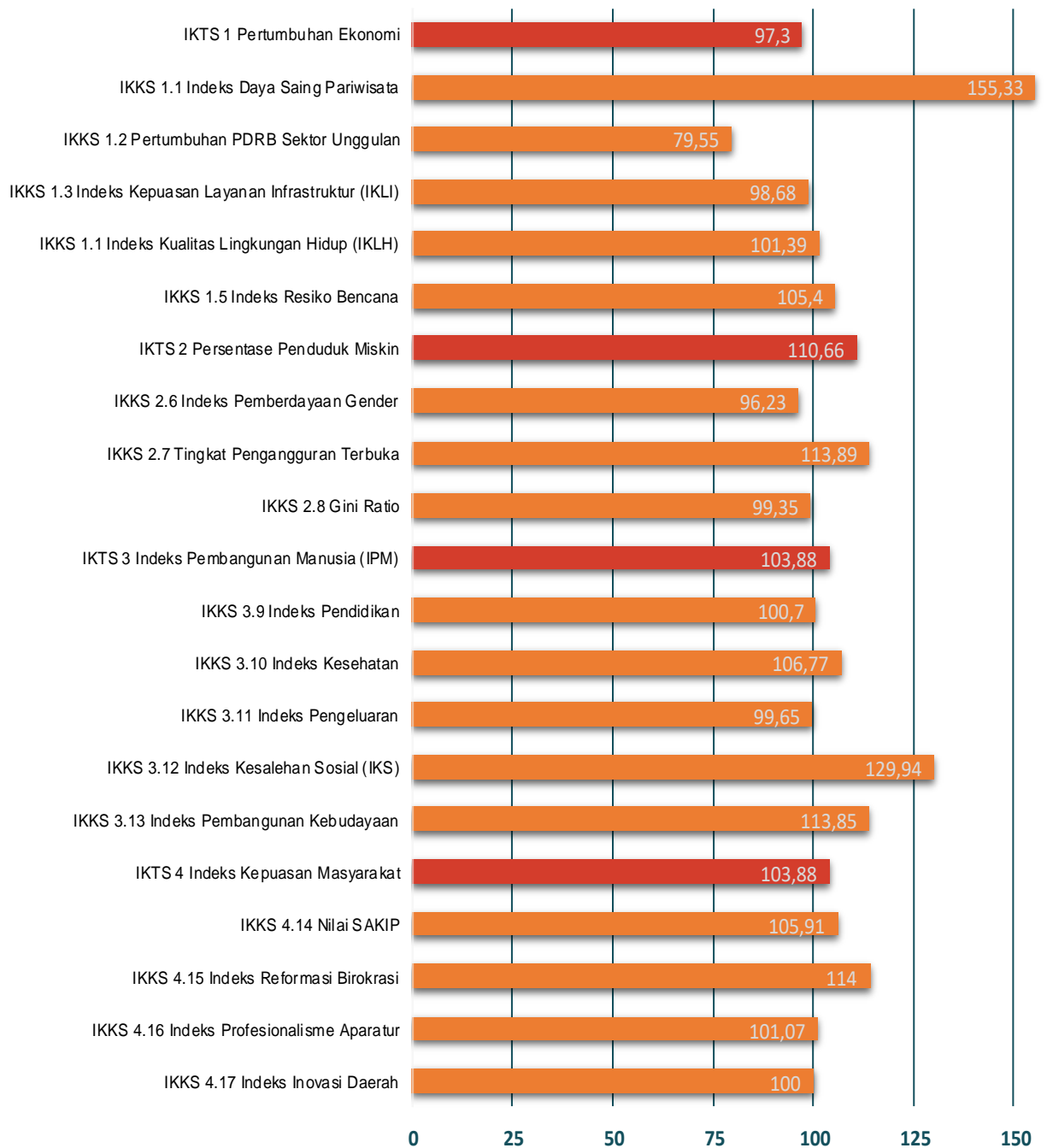
Tujuan Strategis 3			
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
IKTS 4. Indeks Kepuasan Masyarakat		Indeks	91,33
Sasaran Strategis 5 Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan sampai desa			
IKSS 5.14	Nilai SAKIP	Nilai	85,10
IKSS 5.15	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	81.00
IKSS 5.16	Indeks Profesionalisme Aparatur	Indeks	81,31
IKSS 5.17	Indeks inovasi daerah	Kategori	Sangat Inovatif

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tercermin dari capaian tiga tujuan strategis dengan empat indikator kinerja utama tujuan, dan lima sasaran strategis dengan tujuh belas indikator kinerja utama sasaran, Gambaran progres capaian kinerja Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Indikator Tujuan

Indikator Sasaran



Pengukuran Kinerja 2024

Tujuan Strategis 1					
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan yang Berdampak pada Penurunan Kemiskinan					
Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
IKTS 1. Pertumbuhan Ekonomi		%	4,81	4,68	97,30
Sasaran Strategis 1 Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan					
IKSS 1.1	Indeks daya saing pariwisata	Indeks	3	4,66	155,33
IKSS 1.2	Pertumbuhan PDRB sektor unggulan	%	3,57	2,84	79,55
IKSS 1.3	Indeks kepuasan layanan infrastruktur (IKLI)	Indeks	82,74	81,65	98,68
IKSS 1.4	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Indeks	71,23	72,22	101,39
IKSS 1.5	Indeks resiko bencana	Indeks	124,22	117,51	105,40
IKTS 2. Persentase Penduduk Miskin		%	7,32	6,54	110,66
Sasaran Strategis 2 Meningkatkan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan untuk keberdayaan keluarga					
IKSS 2.6	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	Indeks	77,95	75,01	96,23
IKSS 2.7	Tingkat pengangguran terbuka	%	4,68	4,03	113,89
IKSS 2.8	Gini Ratio	Rasio	0,310	0,312	99,35

Tujuan Strategis 2					
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter					
Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
IKTS 3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Indeks	71,75	74,30	103,55
Sasaran Strategis 3 Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan dan Non Pangan					
IKSS 3.9	Indeks Pendidikan	Indeks	0,62	0,624	100,70
IKSS 3.10	Indeks Kesehatan	Indeks	0,78	0,833	106,77
IKSS 3.11	Indeks Pengeluaran	Indeks	0,78	0,777	99,65
Sasaran Strategis 4 Meningkatkan Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya					
IKSS 4.12	Indeks kesalehan sosial (IKS)	%	66,00	85,76	129,94
IKSS 4.13	Indeks pembangunan kebudayaan	Indeks	60,00	68,31	113,85

Tujuan Strategis 3					
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik					
Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
IKTS 4. Indeks Kepuasan Masyarakat		Indeks	91,33	94,87	103,88
Sasaran Strategis 5 Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan sampai desa					
IKSS 5.14	Nilai SAKIP	Nilai	85,10	90,13	105,91
IKSS 5.15	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	81,00	92,34	114,00
IKSS 5.16	Indeks Profesionalisme Aparatur	Indeks	81,31	82,18	101,07
IKSS 5.17	Indeks inovasi daerah	Kategori	Sangat Inovatif	Sangat inovatif	100,00

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten yang diperjanjikan pada tahun 2024, tiga indikator kinerja tujuan setrategis dan dua belas indikator kinerja sasaran setrategis terealisasi sesuai atau melebihi target kinerja, selebihnya satu indikator kinerja tujuan setrategis dan lima indikator sasaran strategis belum dapat direalisasikan sesuai target yang ditetapkan. Capaian Kinerja dibagi dalam empat kriteria Capaian Kinerja :



Analisis Capaian Kinerja

Tujuan ke-1

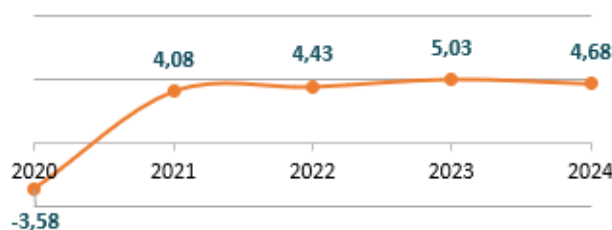
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan yang Berdampak pada Penurunan Kemiskinan



Upaya menjaga keberlanjutan pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2024 melalui pembangunan dan pertumbuhan ekonomi inklusif dengan tetap menjaga indikator pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi tetap positif dan persentase penduduk miskin semakin menurun. Dua indikator ini menjelaskan bahwa peningkatan ekonomi inklusif dan berkelanjutan didukung oleh tingkat produktifitas dan daya saing potensi unggulan serta meningkatnya lapangan kerja dan pemerataan pendapatan untuk keberdayaan keluarga.

IKTS 1 Pertumbuhan Ekonomi

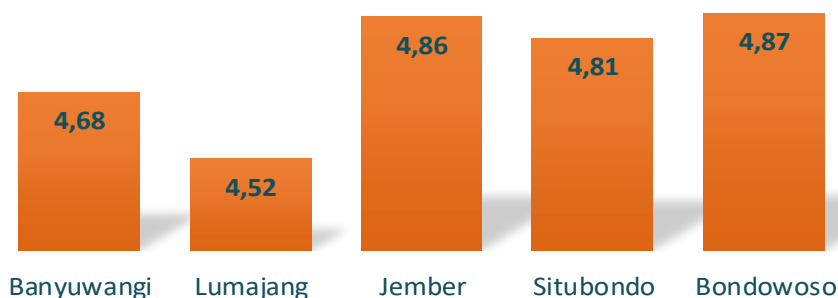
Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai indikator kinerja perekonomian daerah Kabupaten Banyuwangi yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada periode 2021–2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi terus menunjukkan tren positif. Meskipun pada tahun 2024 pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (2023), namun tetap berhasil dijaga di atas empat persen. Pada tahun 2024, capaian kinerja pertumbuhan ekonomi Banyuwangi mencapai 97,30%, dengan target pertumbuhan sebesar 4,81% dan realisasi sebesar 4,68%. Dengan demikian, capaian ini masih masuk dalam kategori kinerja “baik”.



Pertumbuhan Ekonomi	
Tahun 2024	RPJMD 2026
Target : 4,81	Target : 5,34
Realisasi : 4,68	

Capaian 2024
97,30 %

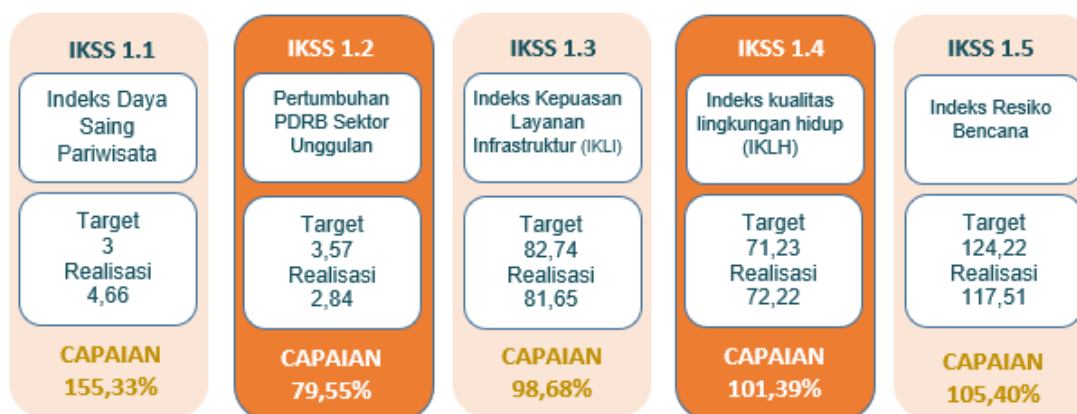
Berdasarkan kinerja perekonomian di wilayah sekitar Kabupaten Banyuwangi atau Eks Karesidenan Besuki dan Lumajang (wilayah Sekar Kijang) pada tahun 2024, Kabupaten Banyuwangi mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,68%. Meskipun pertumbuhan ini sedikit lebih rendah dibandingkan beberapa daerah lain, seperti Bondowoso (4,87%) dan Jember (4,86%), Banyuwangi tetap menunjukkan daya saing yang kuat, melampaui Lumajang (4,52%) dan sejajar dengan Situbondo (4,81%). Capaian ini mencerminkan ketahanan ekonomi banyuwangi dalam menghadapi dinamika ekonomi regional.



Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Sekitar tahun 2024

Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, kontribusi perekonomian Kabupaten Banyuwangi terhadap perekonomian Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024 mencapai 3,43%, Angka ini menunjukkan peran Banyuwangi yang konsisten dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional. Stabilitas kontribusi ini juga terlihat dibandingkan tahun sebelumnya (2023), dimana Banyuwangi mencatat persentase yang sama, menegaskan keberlanjutan pengembangan ekonomi banyuwangi.

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Banyuwangi diterjemahkan kedalam sasaran strategis meningkatnya produktifitas dan daya saing potensi unggulan daerah yang berkelanjutan dengan 5 Indikator :



IKSS 1.1 Indeks Daya Saing Pariwisata

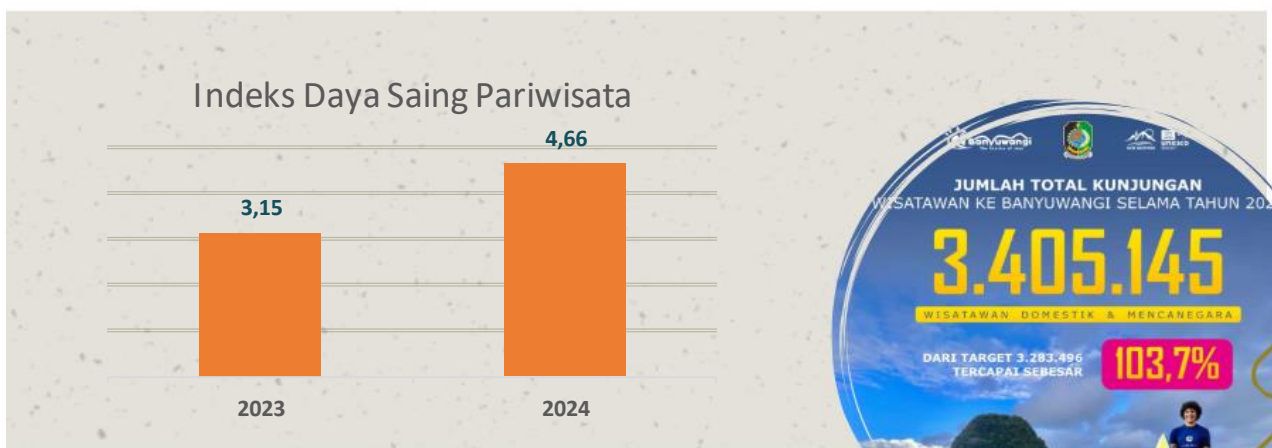
Pariwisata Banyuwangi terus menunjukkan perkembangan yang pesat sebagai salah satu destinasi unggulan.

Capaian 2024 155,33 %	Indeks Daya Saing Pariwisata	
	Tahun 2024	RPJMD 2026
	Target : 3,00	Target : 3,00
	Realisasi : 4,66	

Kinerja sektor pariwisata Banyuwangi pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat positif dengan capaian indikator Indeks Daya Saing Pariwisata sebesar 155,33%, dengan realisasi yang dicapai adalah 4,66 dari target 3 yang telah ditetapkan. Dengan capaian ini menjadikan indikator kinerja Indeks Daya Saing Pariwisata sebagai indikator dengan kategori "baik sekali".

Keberhasilan ini tidak hanya didorong oleh keindahan alamnya Banyuwangi yang beragam, namun juga oleh inovasi dalam pengelolaan pariwisata berbasis budaya, atraksi festival, dan konsep ekowisata yang berkelanjutan serta langkah-langkah efektivitas yang telah diambil pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan daya saing dan daya tarik pariwisata Banyuwangi.

Sejalan dengan peningkatan daya saing pariwisata, tren kunjungan wisatawan ke Banyuwangi juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Sepanjang tahun 2024, tercatat sebanyak 3.405.145 wisatawan berkunjung ke Banyuwangi, terdiri dari 3.213.021 wisatawan nusantara dan 122.904 wisatawan mancanegara. Angka ini mencerminkan semakin kuatnya posisi Banyuwangi sebagai destinasi wisata unggulan, baik ditingkat nasional maupun internasional.



Beberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor penting :

1. Kebijakan yang progresif dalam pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan menjadi kunci dalam menjaga daya tarik pariwisata jangka panjang di Kabupaten Banyuwangi. Dengan menekankan pelestarian sumber daya alam dan budaya, Banyuwangi terus mengembangkan wisata berbasis alam dan kearifan lokal, seperti Ijen Geopark, taman nasional, serta berbagai atraksi, festival tradisi dan budaya khas. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat daya saing pariwisata, tetapi juga memastikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan ekosistem setempat.
2. Mempertahankan strategi pemasaran yang inovatif dan efektif sebagai daya tarik wisatawan domestik dan internasional melalui kalender wisata banyuwangi festival dan optimalisasi pemasaran melalui inovasi seperti AMTOMA.
3. Investasi dalam infrastruktur pariwisata, seperti pembangunan aksesibilitas dan fasilitas pendukung, telah meningkatkan pengalaman wisatawan, memperkuat daya saing destinasi.
4. Sinergi kolaborasi pemerintah daerah, pelaku pariwisata, serta masyarakat lokal, yang bersama-sama menciptakan ekosistem pariwisata yang kompetitif serta lingkungan yang kondusif.

Namun demikian bukan berarti dalam peningkatan daya saing pariwisata di banyuwangi tidak mengalami kendala dan tantangan, tantangan yang terjadi di banyuwangi adalah meskipun banyuwangi dianugrahi wilayah yang sangat indah namun karena luas banyuwangi yang sangat luas dan beragam menciptakan tantangan-tantangan tersendiri yakni :

1. Infrastruktur, pembangunan infrastuktur membutuhkan sumberdaya yang tidak sedikit terutama dalam mendukung destinasi wisata di Banyuwangi mulai dari akses jalan, fasilitas umum pariwisata sehingga perlu skala prioritas dalam pembangunan insfratruktur pendukung pariwisata.
2. Pengelolaan Sampah, wisata alam secara utama memiliki masalah sampah, terutama di area pantai karena sifatnya adalah sampah kiriman sehingga kalua tidak dikelola dengan baik terjadi penumpukan sampah tidak hanya merusak estetika lingkungan tetapi juga dapat menurunkan citra pariwisata.



3. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM): Keterbatasan dalam kualitas SDM disektor pariwisata, seperti kurangnya pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kerja, dapat memengaruhi pelayanan kepada wisatawan dan daya saing destinasi

Meskipun berbagai capaian telah diraih dalam peningkatan Indeks Daya Saing Pariwisata, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk menjaga dan meningkatkan daya saing banyuwangi sebagai destinasi unggulan. Oleh karena itu, diperlukan rencana aksi yang terstruktur dan inovatif guna menjawab tantangan tersebut serta memperkuat posisi Banyuwangi di tingkat nasional maupun internasional. Rencana aksi ke depan akan berfokus pada :

1. Penguatan SDM Pariwisata

Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kebutuhan industri pariwisata, sertifikasi profesi, serta penguasaan teknologi digital guna mendukung pelayanan yang inovatif dan berdaya saing.

2. Strategi Promosi dan Pemasaran Digital

Mengoptimalkan promosi destinasi wisata melalui media sosial dan kampanye interaktif di berbagai platform digital. Selain itu, meningkatkan daya tarik *Banyuwangi Festival* sebagai ajang promosi unggulan yang terstandar.

3. Pariwisata Berkelanjutan

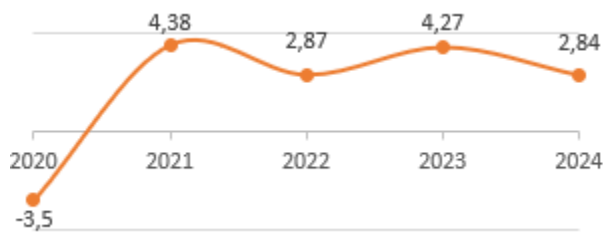
Menerapkan ekowisata dan pariwisata regeneratif, memperkuat pengelolaan lingkungan, serta melestarikan seni dan budaya lokal sebagai daya tarik utama.

4. Penguatan Kolaborasi dan Pemberdayaan Komunitas

Memperkuat sinergi antara pemerintah, swasta, komunitas, dan akademisi dalam pengembangan pariwisata. Mendorong peran aktif Pokdarwis dalam pengelolaan wisata berbasis komunitas serta meningkatkan kontribusi Dewan Kesenian Blambangan dalam pelestarian dan promosi budaya sebagai daya tarik utama.

IKSS 1.2 Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.



Pertumbuhan Ekonomi	
Tahun 2024	RPJMD 2026
Target : 3,57	Target : 4,19
Realisasi : 2,84	

Capaian
2024

79,55 %

Perekonomian Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2024 terus menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun tidak mencapai target yang ditetapkan. target pertumbuhan PDRB sektor unggulan ditetapkan sebesar 3,57%, dengan realisasi sebesar 2,84%, menghasilkan capaian kinerja 79,55% yang masih masuk dalam kategori "baik".

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 mencapai 4,68%, dengan sektor unggulan yang masih menjadi pendorong utama perekonomian daerah. Struktur perekonomian Kabupaten Banyuwangi didominasi oleh sektor unggulan, antara lain:

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (26,42%), meskipun mengalami kontraksi sebesar 1,48% dibandingkan tahun sebelumnya.
2. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (17,65%), dengan pertumbuhan 6,01%.
3. Konstruksi (14,04%), mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 8,19%.
4. Industri Pengolahan (12,94%), mengalami pertumbuhan 7,05%.

Sementara itu, beberapa sektor unggulan menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi dari rata-rata, antara lain:

1. Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,64%, mencerminkan peningkatan aktivitas distribusi dan logistik.
2. Administrasi Pemerintahan tumbuh 8,70%, menandakan peran kebijakan dan tata kelola yang lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
3. Jasa Perusahaan dan Jasa Lainnya juga mengalami pertumbuhan yang kuat masing-masing sebesar 8,36% dan 8,52%, menunjukkan peningkatan peran sektor jasa dalam perekonomian daerah.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terbesar terjadi pada Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 12,43%,

menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi berbasis masyarakat. Selain itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 6,15%, mencerminkan investasi yang masih berlanjut dalam pembangunan infrastruktur dan sektor produktif lainnya.

Meskipun secara keseluruhan sektor unggulan masih mendukung perekonomian daerah, kontraksi pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi tantangan tersendiri, mengingat kontribusinya yang masih dominan. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan strategis ke depan, terutama dalam penguatan ketahanan sektor pertanian dan diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi.

Dengan capaian kinerja 79,55%, sektor unggulan Kabupaten Banyuwangi masih menunjukkan ketahanan yang baik di tengah tantangan ekonomi regional dan global. Ke depan, optimalisasi kebijakan inovatif dan peningkatan daya saing sektor unggulan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mengimplementasikan berbagai program unggulan yang mendukung sektor-sektor kunci dalam PDRB. Beberapa program tersebut meliputi:

1. Program Revitalisasi Pertanian dan Agroindustri

- a. Digitalisasi sektor pertanian melalui smart farming dengan :

CEK PUBERTAS, aplikasi inovatif yang memungkinkan petani mengakses informasi pupuk bersubsidi secara transparan. Dampaknya, jumlah petani yang mengetahui alokasi pupuk meningkat dari 54.256 menjadi 109.587 orang (50,49%), serta mengurangi kasus penyalahgunaan pupuk dari 2,10% menjadi 0,17%.

e-BILAPERDU, aplikasi digital untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan pertanian di tengah keterbatasan SDM, didukung oleh sekolah lapang, pelatihan petani, serta fasilitas komunikasi dan pelatihan bagi penyuluh pertanian.

- E-NAK WANGI, Kartu elektronik yang mencatat data ternak (usia, kepemilikan, kesehatan, dan riwayat kehamilan) guna memastikan pengelolaan ternak lebih akurat dan terkontrol.
- b. Pengembangan agrowisata berbasis komunitas untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan potensi pertanian lokal serta perluasan lapangan kerja guna peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani / peternak di daerah.
2. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas
 - a. Pembangunan dan peningkatan jalan melalui refitalisasi jalan sepanjang 72,24 Km pada Tahun 2024.
 - b. Peningkatan Konektivitas Salah satunya dengan sinergi dengan program pemerintah pusat dalam penyediaan angkutan perintis untuk rute Muncar–Pancer, Jajag–Sarongan, dan Blok Agung–Stasiun Stail, serta pengoperasian angkutan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, serta layanan Angkutan Pelajar/Umum Gratis yang mencakup sembilan rute utama di wilayah perkotaan, serta Angkutan Pariwisata Gratis yang mendukung akses ke lima destinasi unggulan, seperti Gunung Ijen, Taman Nasional Alas Purwo, dan Pantai Pulau Merah.
 3. Penguatan Sektor Perdagangan dan Industri Kreatif
 - a. Program UMKM Naik Kelas, yang mendorong pelaku usaha kecil menengah agar usahanya semakin berkembang.
 - b. Pengembangan sektor perdagangan melalui rehabilitasi lima pasar daerah, relokasi Pasar Rogojampi dengan dukungan Kementerian Perdagangan, serta peningkatan pengelolaan 21 pasar. Untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang pokok, dilakukan pemantauan di 13 pasar utama, pengawasan distribusi di pelabuhan, serta Operasi Pasar dan Pasar Murah di 146 titik selama lebih dari 220 hari, bekerja sama dengan Bulog, Pertamina, dan ritel modern.
 4. Peningkatan Kualitas SDM dan Daya Saing Tenaga Kerja
 - a. Pelatihan wirausaha dan vocational training berbasis kebutuhan industri.
 - b. Program Beasiswa Banyuwangi Cerdas untuk mendorong pendidikan vokasi di sektor unggulan.

- c. Penguatan sinergi dengan perguruan tinggi dalam riset dan inovasi berbasis daerah.
- 5. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Berbasis Budaya
 - a. Penguatan branding Banyuwangi sebagai Destinasi Wisata Hijau dan Berkelanjutan.
 - b. Event tahunan Banyuwangi Festival untuk meningkatkan daya tarik wisatawan dan meningkatkan kontribusi sektor jasa.
 - c. Pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Banyuwangi tahun 2024 masih dalam kategori "baik", tantangan tetap ada dalam meningkatkan kinerja PDRB di masa mendatang. Untuk itu, beberapa strategi perbaikan akan diterapkan, antara lain:

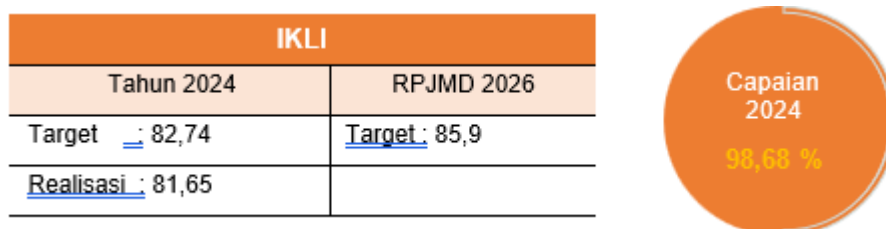
1. Penguatan pertanian dan perikanan berbasis hilirisasi. Modernisasi alat pertanian, sistem irigasi, dan penerapan smart farming terus ditingkatkan guna meningkatkan produktivitas. Hilirisasi hasil pertanian dan perikanan diperkuat dengan pengembangan industri pengolahan, termasuk peningkatan ekspor kopi khas Banyuwangi dan produk perikanan olahan.
2. Optimalisasi sektor perdagangan dan pariwisata. Rehabilitasi pasar daerah, digitalisasi distribusi, serta penguatan rantai pasok dilakukan untuk menjaga stabilitas harga. Di sektor pariwisata, konektivitas ke destinasi unggulan seperti Kawah Ijen, Alas Purwo, Pulau Merah dan wisata strategis terus ditingkatkan guna memperkuat daya tarik wisatawan.
3. Percepatan transformasi digital dan pengembangan industri kreatif. Digitalisasi layanan publik dioptimalkan untuk mempercepat perizinan usaha dan investasi. UMKM didorong untuk memanfaatkan e-commerce dan mendapatkan akses ke pasar nasional maupun internasional, sementara industri kreatif dikembangkan melalui program inkubasi dan pelatihan.
4. Peningkatan investasi dan infrastruktur. Regulasi investasi dipermudah dengan pemberian insentif bagi industri hijau dan manufaktur berkelanjutan. Infrastruktur strategis seperti jalur transportasi, layanan kereta api, dan peningkatan kapasitas Bandara Banyuwangi terus diperkuat untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan langkah-langkah ini, Banyuwangi semakin memperkuat posisinya sebagai pusat perdagangan, industri, dan pariwisata di Jawa Timur.

IKSS 1.3 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

IKLI menjadi alat untuk mengetahui perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat. Untuk mengukur kepuasan masyarakat secara objektif dan komprehensif beberapa kriteria digunakan seperti ketersediaan fisik (availability), kualitas fisik (quality), kesesuaian (appropriateness), pemanfaatan (utility) dan kontribusi terhadap perekonomian.

Pada tahun 2024, target IKLI ditetapkan sebesar 82,74, dengan realisasi mencapai 81,85, sehingga capaian kinerja mencapai 98,68% yang dikategorikan dalam capaian kinerja "baik". Hasil ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Banyuwangi telah berjalan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat



Untuk mendukung capaian kinerja tersebut, beberapa program dan kegiatan telah dijalankan, antara lain:

1. Optimalisasi Infrastruktur Transportasi dan Mobilitas

Untuk meningkatkan konektivitas dan kelancaran mobilitas masyarakat, dilakukan optimalisasi penyelenggaraan transportasi darat, laut, dan udara melalui:

- a. Program penyelenggaraan jalan guna meningkatkan aksesibilitas dan kondisi jalan.
- b. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) untuk memastikan keselamatan dan kelancaran transportasi.
- c. Program pengelolaan penerbangan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan bandara dan akses udara.

- d. Program pengelolaan perkeretaapian guna memperbaiki infrastruktur dan layanan transportasi kereta api.
 - e. Program pengelolaan pelayaran untuk memperkuat konektivitas antarwilayah melalui jalur laut.
2. Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Sistem Drainase
- Dalam rangka menjamin ketersediaan air bersih serta mengurangi risiko banjir, dilakukan penguatan sistem pengelolaan air dan drainase, melalui:
- a. Program pengelolaan sumber daya air (SDA) guna menjaga keseimbangan dan ketersediaan air bagi masyarakat.
 - b. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih.
 - c. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase guna mengurangi genangan dan risiko banjir di daerah rawan.
3. Peningkatan Kualitas Permukiman dan Lingkungan
- Untuk menciptakan lingkungan permukiman yang layak, aman, dan nyaman, dilakukan peningkatan kualitas permukiman dan sarana pendukungnya melalui:
- a. Program kawasan permukiman guna memperbaiki lingkungan tempat tinggal masyarakat.
 - b. Program pengembangan perumahan untuk meningkatkan ketersediaan hunian yang layak.
 - c. Program peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) guna memperkuat fasilitas publik dan infrastruktur dasar di kawasan permukiman.
4. Optimalisasi Tata Ruang dan Bangunan
- Dalam mendukung pembangunan yang tertata dan berkelanjutan, dilakukan optimalisasi penataan ruang dan bangunan melalui:
- a. Program penataan bangunan dan lingkungannya guna memastikan pengelolaan kawasan yang tertata dan sesuai standar.
 - b. Program penataan bangunan gedung untuk meningkatkan kualitas dan keamanan konstruksi bangunan.

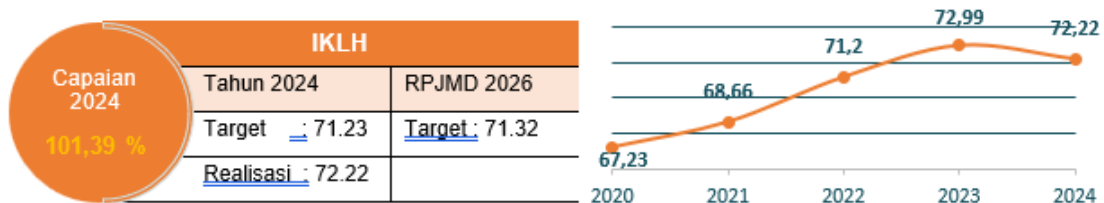
c. Program penyelenggaraan penataan ruang guna mewujudkan tata ruang yang berfungsi optimal sesuai kebutuhan daerah.

5. Penguatan Pengembangan Konstruksi dan Infrastruktur

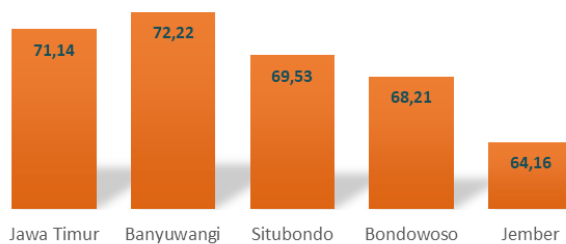
Untuk mendukung keberlanjutan pembangunan, dilakukan penguatan sektor jasa konstruksi dan infrastruktur, melalui program pengembangan jasa konstruksi guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam sektor pembangunan.

Dengan pelaksanaan program-program tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berupaya meningkatkan kualitas layanan infrastruktur agar lebih efektif, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

IKSS 1.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



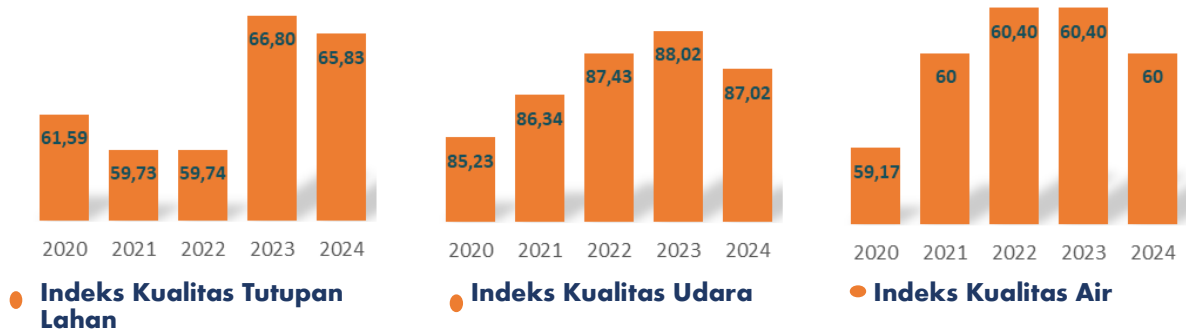
Capaian kinerja Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Banyuwangi tahun 2024 berhasil mencapai 101,39%, yang masuk dalam kategori "baik sekali". Target IKLH yang ditetapkan sebesar 71,23% dapat terlampaui dengan hasil nyata sebesar 72,22%. IKLH ini merupakan indikator utama untuk menilai kualitas lingkungan di suatu daerah. Meskipun Banyuwangi dikenal dengan kekayaan alamnya yang luar biasa, mulai dari pegunungan, hutan, hingga pesisir yang luas, yang membuatnya sangat potensial untuk sektor industri dan pariwisata, perkembangan sektor-sektor ini juga membawa tantangan besar bagi kelestarian lingkungan. Kegiatan industri dan pariwisata yang meningkat berisiko memberi tekanan pada ekosistem. Namun, Banyuwangi berhasil menjaga kualitas lingkungan hidupnya dengan sangat baik, bahkan lebih baik dibandingkan wilayah sekitarnya.



IKLH Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Sekitar Tahun 2024



Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kualitas lingkungan memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam. Analisis Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Banyuwangi tahun 2024 dilakukan untuk meninjau kondisi lingkungan berdasarkan tiga aspek utama, yaitu kualitas udara, kualitas air, dan tutupan lahan



Sebagai daerah yang terus berkomitmen menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan, Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan berbagai langkah strategis sebagai upaya mendukung upaya tersebut.

1. Pemantauan kualitas air, sebagai parameter utama dalam menilai kualitas sungai, dilakukan secara berkala baik pada musim kemarau maupun musim penghujan. Pemantauan ini dilakukan dengan melibatkan laboratorium yang terakreditasi KAN dan terdaftar di KLHK, yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
2. Peningkatan kualitas udara menjadi fokus utama seiring dengan peralihan penggunaan bahan bakar dari premium ke pertalite/pertamax, yang bertujuan mengurangi kadar SO₂ di udara. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga melaksanakan kebijakan program Car Free Day yang rutin diadakan setiap minggu untuk mengurangi emisi kendaraan dan menciptakan udara yang lebih bersih.
3. Dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup, Kabupaten Banyuwangi terus meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan hukum terhadap kegiatan industri juga diperkuat guna memastikan bahwa pengelolaan kualitas udara dilakukan dengan baik, serta meningkatkan sistem pengendalian pencemaran udara di sektor industri.

4. Pengelolaan sampah juga menjadi perhatian utama dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Upaya pengurangan sampah oleh masyarakat didorong, sementara penanganan sampah dilakukan secara terkoordinasi oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui kerjasama multi-stakeholder, yang melibatkan masyarakat, dunia usaha, pemerintah daerah, provinsi, serta nasional. Program Desa/Kelurahan BERSERI menjadi salah satu inisiatif penting dalam pengelolaan sampah, yang juga didukung oleh program Adipura sebagai penghargaan terhadap daerah yang berhasil mengelola lingkungan secara baik.

Upaya peningkatan kinerja yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan di Kabupaten Banyuwangi:

1. Peningkatan sarana prasarana

- Melakukan penyusunan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- Peningkatan beberapa pengelolaan air limbah yang memadai septic tank (*black water*), pengelolaan kotoran hewan ternak, pupuk organik terkontrol pada beberapa wilayah yang masih belum memenuhi baku mutu lingkungan.
- Peningkatan pengelolaan sampah dengan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Banyuwangi akan membangun TPA dan TPST berkapasitas 500 ton/hari pada tahun 2025.

2. Pelatihan dan Edukasi Berkelanjutan:

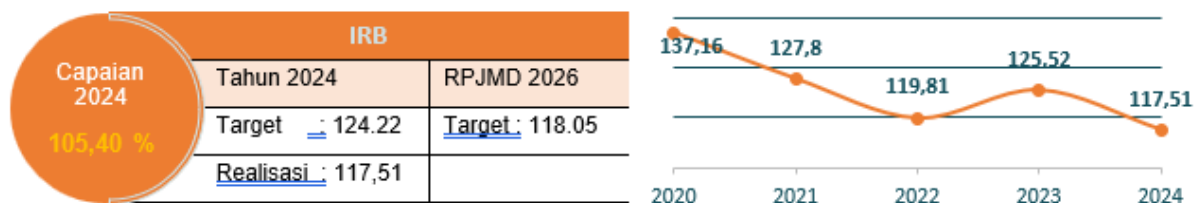
- Peningkatan pemahaman masyarakat pada perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola limbah cair domestik agar tidak mencemari lingkungan terutama air sungai
- Menyelenggarakan peningkatan kapasitas dan pelatihan praktis untuk masyarakat, kelompok, dan sekolah (sekolah adiwiyata, pondok pesantren) mengenai teknologi pengelolaan sampah seperti RDF, eco-enzyme, dan BSF, serta memberikan pendampingan untuk memastikan implementasi yang efektif.



3. Kampanye dan Kolaborasi Komunitas:

- Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar instansi dalam pengelolaan tata guna lahan, pengurangan lahan kritis, serta peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), hutan mangrove, dan penanaman kembali di kawasan sempadan sungai, danau, waduk, pantai, dan lereng curam. Kegiatan ini perlu melibatkan berbagai stakeholder, termasuk Dinas Kehutanan Provinsi, pelaku industri, masyarakat, serta pelajar/mahasiswa. Pengelolaan ini harus dilakukan secara berkelanjutan dengan dukungan sumber daya yang memadai untuk mengatasi degradasi lahan yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk, pembangunan, perambahan hutan, dan kebakaran hutan
- Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye edukasi, pembinaan pengelolaan sampah, dan kolaborasi dengan sekolah (sekolah adiwiyata) dan pondok pesantren (eco pesantren) untuk mempraktikkan teknologi pengelolaan sampah ramah lingkungan di tingkat lokal.

IKSS 1.5 Indeks Resiko Bencana



Kabupaten Banyuwangi telah menunjukkan kemajuan dalam pengurangan risiko bencana dengan capaian kinerja Indikator Indeks Resiko Bencana Banyuwangi tahun 2024 berhasil mencapai 105,40%, yang masuk dalam kategori "baik sekali". Target IRB yang ditetapkan sebesar 124,22% dapat terlampaui dengan hasil sebesar 109.15%.

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat risiko suatu daerah terhadap bencana serta efektivitas strategi mitigasi yang telah diterapkan, sehingga semakin kecil IRB maka tingkat resiko bencana semakin terkendali dan semakin rendah tingkat risiko bencana yang dihadapi. Kabupaten Banyuwangi bila dibandingkan dengan lima wilayah di Jawa Timur yang

memiliki topologi mirip dengan memiliki karakteristik seperti kombinasi pesisir, dataran rendah, perbukitan, dan pegunungan seperti Kabupaten Jember, Kabupaten Malang, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Lumajang, maka kabupaten banyuwangi memiliki IRB lebih rendah dari kabupaten yang lainnya dan hanya lebih tinggi daripada kabupaten Lumajang sehingga secara umum strategi mitigasi yang dilakukan Kabupaten Banyuwangi mampu menurunkan tingkat risiko terhadap bencana.



Pengurangan risiko bencana di Kabupaten Banyuwangi telah mengadopsi strategi penurunan indeks risiko bencana dengan meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana yang mencakup tujuh prioritas utama dalam penguatan kapasitas daerah terhadap bencana, yaitu:

1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan

Kabupaten Banyuwangi telah menerapkan berbagai kebijakan strategis untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana. Salah satu langkah utama adalah penerapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Bencana (PB) serta telah terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang bertanggung jawab atas perencanaan, mitigasi, dan respons terhadap bencana. Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) juga telah dibentuk untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor. Selain itu, kebijakan daerah seperti Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Perda Tata Ruang berbasis PRB telah diterapkan guna memastikan pembangunan daerah yang tangguh terhadap bencana.

2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu

Sebagai langkah mitigasi, Kabupaten Banyuwangi telah menyusun peta bahaya, peta kerentanan, dan peta kapasitas untuk seluruh ancaman bencana di

wilayahnya. Peta-peta ini digunakan dalam perencanaan mitigasi, tanggap darurat, serta rekonstruksi pasca-bencana. Rencana Penanggulangan Bencana yang berbasis pada hasil kajian ini memastikan kesiapsiagaan yang lebih efektif dalam menghadapi potensi bencana.

3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik

Pemerintah daerah terus mengembangkan sistem informasi kebencanaan yang dapat diakses masyarakat. Sosialisasi pencegahan bencana serta pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga tanggap darurat juga dilakukan secara berkala. Penyediaan logistik menjadi fokus utama, dengan pembangunan gudang logistik yang terorganisir serta sistem supply chain yang siap digunakan dalam situasi darurat. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang merupakan bagian dari Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi terus digalakkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama stekholder yang ada di Banyuwangi untuk meningkatkan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan masyarakat

4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana

Penataan ruang berbasis PRB telah diterapkan untuk meminimalisir dampak bencana, termasuk informasi tata ruang yang dapat diakses publik. Program "Sekolah dan Madrasah Aman Bencana" serta "Rumah Sakit/Puskesmas Aman Bencana" diterapkan guna meningkatkan ketahanan fasilitas pendidikan dan kesehatan terhadap bencana. Desa-desa tangguh bencana juga terus dikembangkan untuk memastikan kesiapsiagaan di tingkat komunitas.

5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi

Langkah-langkah mitigasi seperti penerapan resapan air untuk mencegah banjir, perlindungan daerah tangkapan air, restorasi sungai, serta penguatan lereng di kawasan rawan longsor terus dilakukan. Selain itu, penerapan bangunan tahan gempa, penanaman vegetasi penahan gelombang tsunami, serta revitalisasi tanggul dan embung menjadi bagian dari strategi mitigasi di daerah rawan bencana.

6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana

Kabupaten Banyuwangi telah menyiapkan rencana kontinjensi untuk setiap jenis ancaman bencana serta mengembangkan sistem peringatan dini. Jalur dan tempat evakuasi sementara telah ditetapkan, bersama dengan sistem komando

operasi darurat yang memastikan koordinasi cepat dan tepat saat terjadi bencana. Tim Kaji Cepat dan Tim Penyelamatan telah dilatih dan siap diterjunkan ke lokasi bencana dalam waktu singkat.

7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Pasca-bencana, pemulihan pelayanan dasar pemerintah dan infrastruktur penting menjadi prioritas utama. Rehabilitasi rumah penduduk yang terdampak serta pemulihan kehidupan masyarakat dilakukan melalui berbagai program bantuan dan dukungan ekonomi. Tahun 2024, upaya ini semakin diperkuat dengan kolaborasi berbagai pihak untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana.

Meskipun Kapasitas Kabupaten Banyuwangi dalam penanggulangan bencana terus meningkat, masih terdapat beberapa kendala dalam upaya perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana di Kabupaten Banyuwangi terutama pada beberapa tantangan yang ada yakni:

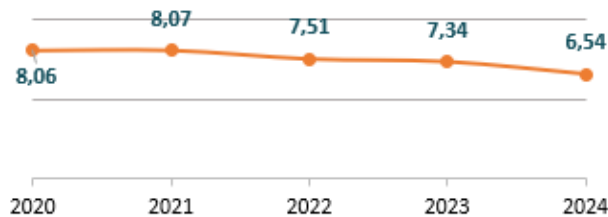
1. Kesiapan dalam penyusunan Rencana Kontinjensi untuk setiap ancaman bencana.
2. Sistem peringatan dini yang belum optimal untuk setiap jenis ancaman.
3. Ketersediaan jalur dan tempat evakuasi sementara yang memadai.
4. Mekanisme penentuan status tanggap darurat dan penerapan sistem komando operasi darurat.
5. Peningkatan efektivitas dalam pengerahan Tim Kaji Cepat dan Tim Penyelamatan Korban.
6. Tantangan dalam pengorganisasian bantuan bagi masyarakat terdampak di wilayah terpencil.
7. Mekanisme penghentian status tanggap darurat bencana.

Strategi kinerja kedepan akan diterapkan sebagai bagian dari langkah perbaikan berkelanjutan terutama diarahkan pada penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana dengan meningkatkan kerja sama multi-sektor sehingga risiko bencana dapat diminimalkan secara efektif dan berkelanjutan.



IKTS 2 Persentase Penduduk Miskin

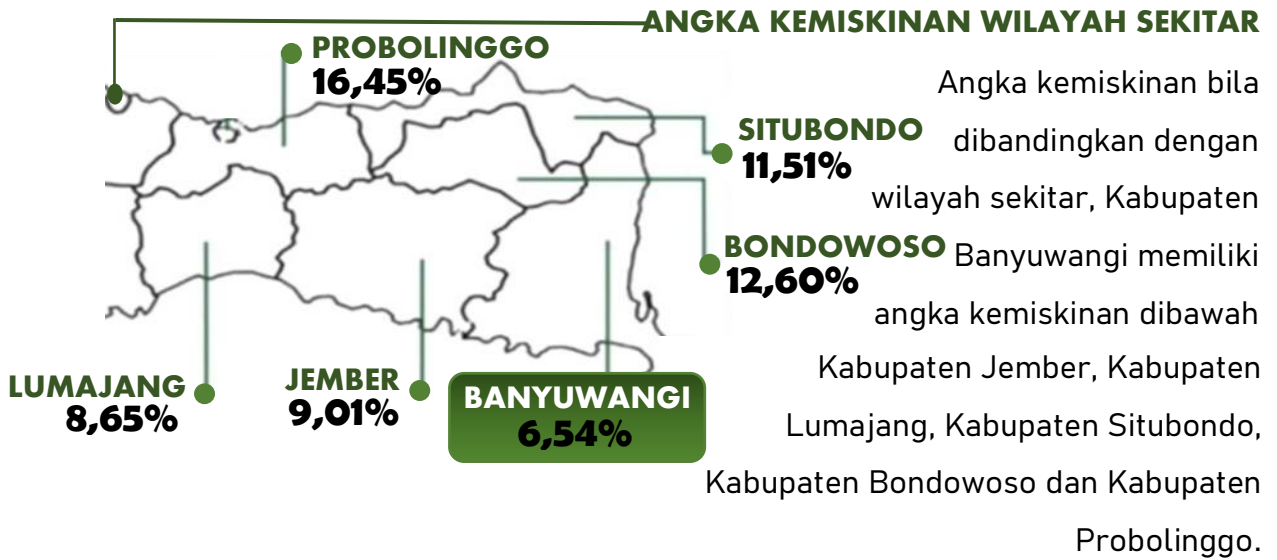
Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan terus diupayakan penanganannya secara optimal. Dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerapkan tiga strategi utama yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, serta menekan potensi transmisi kemiskinan. Upaya tersebut menunjukkan hasil yang positif, dimana persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi terus mengalami penurunan. Pada tahun 2024, angka kemiskinan tercatat sebesar 6,54%, dengan capaian kinerja mencapai 110,66% dari target yang ditetapkan, yaitu 7,32%.



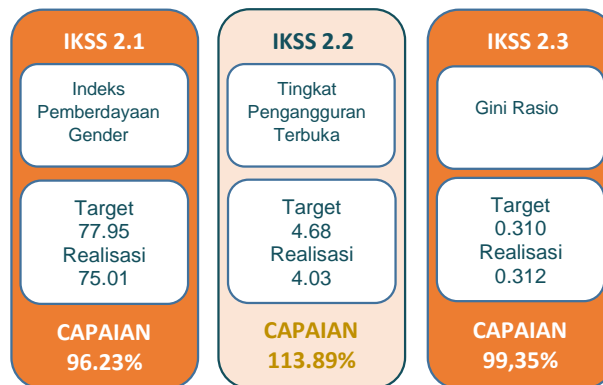
% PENDUDUK MISKIN	
Tahun 2024	RPJMD 2026
Target : 7,32	Target: 7,01
Realisasi : 6,54	

Capaian
2024
110,66 %

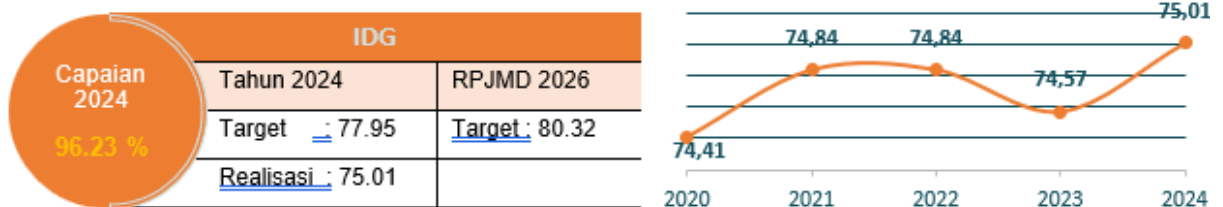
Penurunan angka kemiskinan ini mencerminkan efektivitas dalam menerapkan strategi kebijakan serta upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Banyuwangi, hal ini juga tercermin jika persentase penduduk miskin di Banyuwangi lebih rendah di bandingkan dengan wilayah sekitar.



Indikator persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi diterjemahkan kedalam sasaran strategis meningkatnya lapangan kerja dan pemerataan pendapatan untuk keberdayaan keluarga dengan capaian 3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis :



IKSS 2.6 Indeks Pemberdayaan Gender

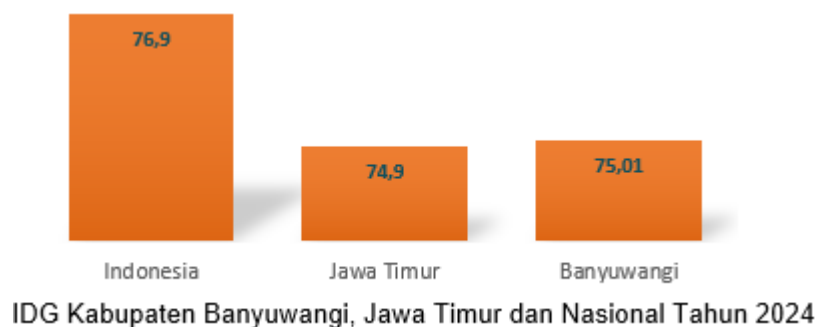


Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkomitmen untuk meningkatkan pemberdayaan gender melalui berbagai kebijakan dan program yang mendorong partisipasi aktif perempuan dalam sektor ekonomi, sosial, dan politik. Pada tahun 2024, target IDG Kabupaten Banyuwangi ditetapkan sebesar 77,95, dengan realisasi



sebesar 75,01, sehingga capaian kinerja mencapai 96,23% dari target yang telah ditetapkan. Jika melihat tren capaian IDG dalam lima tahun terakhir, nilai IDG Kabupaten Banyuwangi mengalami fluktuasi, meskipun terdapat peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, angka realisasi IDG tahun 2024 masih berada dibawah target yang ditetapkan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan terus memperkuat kebijakan dan program yang mendorong peningkatan keterlibatan perempuan dalam sektor strategis, seperti kepemimpinan di berbagai bidang, kewirausahaan, serta peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan. Tentu hal ini dilakukan karena untuk mengoptimalkan peran perempuan dalam pembangunan memiliki beberapa tantangan yang dihadapi diantaranya :

1. Partisipasi perempuan dalam kepemimpinan memberikan andil terhadap seberapa besar peran perempuan dapat menduduki posisi strategis pada sektor pemerintahan, legislasi dan dunia usaha dapan mempengaruhi upaya pemberdayaan secara keseluruhan
2. Akses perempuan terhadap kesempatan ekonomi seperti dalam hal modal usaha, kepemilikan aset, serta kesempatan kerja.
3. Akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan
4. Tingkat beban ganda bagi perempuan yakni tanggung jawab pekerjaan dan rumahtangga akibat kurang dukungan lingkungan.



Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan, khususnya dalam bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan, dengan IDG 75,01 yang dicapai Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024, jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang mencapai 76,9, IDG Kabupaten Banyuwangi berada sedikit di bawah capaian nasional. Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi

Jawa Timur yang sebesar 74,9, Kabupaten Banyuwangi menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan selisih 0,11 poin lebih tinggi.

Capaian ini mencerminkan adanya kemajuan dalam pemberdayaan gender di Kabupaten Banyuwangi, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan agar dapat menyamai atau melampaui rata-rata nasional. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan terus mendorong kebijakan dan program yang mendukung kesetaraan gender serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan.

Berbagai kegiatan di Kabupaten Banyuwangi mendukung responsif gender telah dilaksanakan seperti:

1. Penguatan kapasitas perempuan dalam perencanaan pembangunan desa melalui program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan.
2. Peningkatan akses perempuan terhadap ekonomi produktif melalui program PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) dan dukungan bagi keluarga pekerja migran.
3. Penguatan peran perempuan dalam UMKM dan ekonomi kreatif melalui pelatihan wirausaha, akses permodalan, seta Program Kanggo Riko.
4. Pengembangan forum anak sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan serta program ruang rindu untuk perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Program ini tidak hanya menangani kasus kekerasan terhadap perempuan tetapi juga upaya dari strategi Banyuwangi dalam memperkuat dan memastikan perempuan dan ibu untuk bisa menyampaikan pikiran dan menunjukkan kemampuannya.

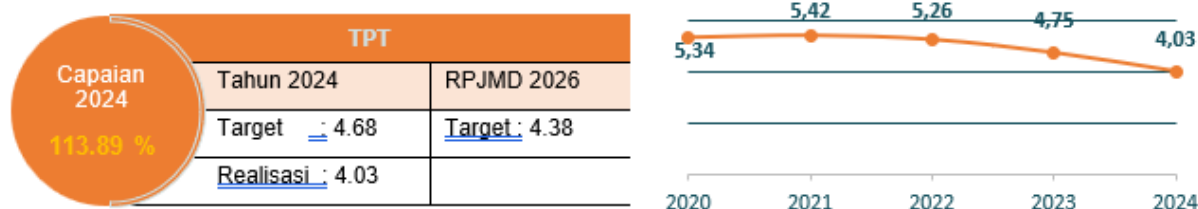
Dengan langkah-langkah yang berkelanjutan, diharapkan IDG Kabupaten Banyuwangi dapat terus meningkat, mencerminkan semakin kuatnya peran perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Banyuwangi.

IKSS 2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan strategis di sektor ketenagakerjaan guna menekan angka pengangguran. Keberhasilan upaya ini diukur melalui indikator Tingkat

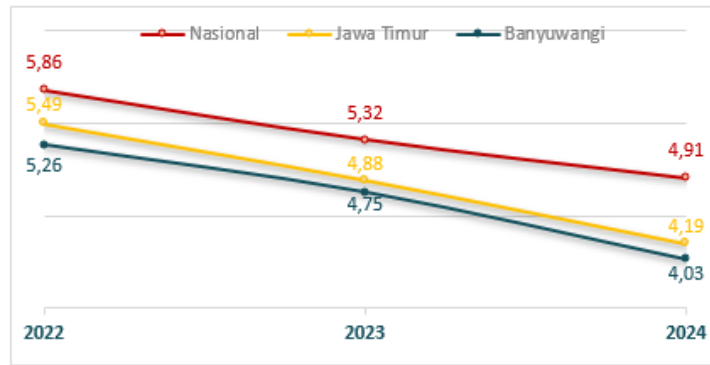


Pengangguran Terbuka (TPT), yang juga merupakan bagian dari Strategi pertama dalam menurunkan tingkat kemiskinan yakni meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan menurunkan angka pengangguran, diharapkan masyarakat memperoleh akses yang lebih luas terhadap lapangan kerja dan peluang ekonomi, sehingga mampu meningkatkan taraf hidupnya.



Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan target TPT sebesar 4,68%. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi TPT menunjukkan angka 4,03%, yang berarti capaian kinerja mencapai 113,89% dari target yang telah ditetapkan. Mengingat bahwa semakin kecil nilai TPT mencerminkan semakin baiknya kondisi ketenagakerjaan, capaian ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Banyuwangi juga mengalami tren penurunan selama lima tahun terakhir dari 5.34 persen di tahun 2020 menjadi 4.03 persen di tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan tren positif dalam perkembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Banyuwangi. Beberapa faktor yang mempengaruhi fenomena tersebut antara lain pemulihan ekonomi pasca pandemi, tahun 2020 merupakan puncak pandemi covid-19 yang menyebabkan peningkatan pengangguran akibat PHK dan lesunya kondisi ekonomi. Pemulihan ekonomi dimulai sejak tahun 2021 yang mulai dirasakan dampaknya ditahun selanjutnya dengan ditandai pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga menumbuhkan kesempatan kerja baru.



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2024

Jika dilihat dan dibandingkan secara regional maupun nasional kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Banyuwangi cenderung mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, TPT Kabupaten Banyuwangi sebesar 5.26 persen turun menjadi 4.03 persen di tahun 2024. Penurunan TPT tersebut juga dialami pada tingkat regional dan nasional, namun penurunan TPT di Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 tercatat paling besar dibandingkan tingkat regional dan nasional yakni sebesar 0.72 persen dari tahun sebelumnya. Kondisi TPT Kabupaten Banyuwangi tetap konsisten berada dibawah rata-rata regional maupun nasional.

Keberhasilan ini didukung oleh implementasi berbagai program unggulan, di antaranya:

1. Peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dan kewirausahaan sehingga meningkatkan daya saing tenaga kerja.
2. Fasilitasi penyerapan tenaga kerja melalui pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),
3. Peningkatan investasi pada sektor pariwisata yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dalam pemulihan ekonomi pascapandemi. Melalui promosi potensi wisata, sektor ini kembali berkembang dengan menciptakan peluang kerja baru di bidang perhotelan, restoran, dan ekonomi kreatif. Hal ini tercermin dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor jasa yang naik dari 44,01% pada tahun 2020 menjadi 45,73% pada tahun 2024.
4. Optimalisasi program padat karya serta peningkatan akses terhadap informasi ketenagakerjaan juga berkontribusi dalam pencapaian target tersebut.

Dalam upaya meningkatkan kualitas ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian khusus. Meskipun telah terjadi kemajuan dalam beberapa aspek, masih terdapat permasalahan yang perlu segera diatasi guna memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Beberapa tantangan utama dalam pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Banyuwangi meliputi :

1. Penyerapan tenaga kerja masih didominasi oleh penduduk yang bekerja di kegiatan informal, proposi Penyerapan tenaga kerja oleh penduduk yang bekerja pada kegiatan informal meskipun sudah menurun yaitu dari 64.51 persen di tahun 2020 menjadi 63.55 persen di tahun 2024.
2. Penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ditengah meningkatnya jumlah penduduk usia kerja. penurunan TPAK di Kabupaten Banyuwangi dari 79.04 persen di tahun 2023 menjadi 75.36 persen di tahun 2024, meskipun kondisi ini lebih baik dibandingkan tahun 2020 dimana TPAK hanya sebesar 71.80 persen. Kondisi ini menggambarkan adanya stagnasi atau bahkan penurunan aktivitas ekonomi di masyarakat, yang apabila tidak ditangani menyebabkan meningkatnya beban sosial, kesenjangan ekonomi, dan penurunan produktivitas ekonomi.

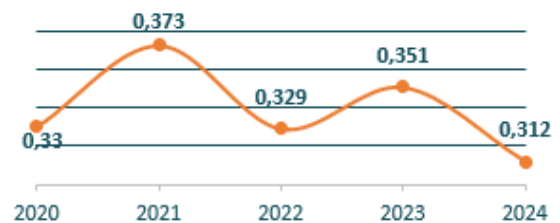
Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pembangunan ketenagakerjaan, diperlukan langkah-langkah strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas tenaga kerja serta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif, produktif, dan berdaya saing, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Adapun langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan meliputi:

1. Intervensi peningkatan keterampilan tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata melalui :
 - a. Penguatan Pelatihan dan Sertifikasi sesuai kualifikasi tenaga kerja standar industri.
 - b. Pemberdayaan UMKM.

- c. Meningkatkan Investasi Berorientasi Padat Karya seperti agribisnis, dan pariwisata berkelanjutan.
2. Intervensi melalui program pemberdayaan masyarakat untuk keseimbangan pasar kerja dengan pertumbuhan ekonomi.
- a. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Vokasi.
 - b. Pemberdayaan Kelompok Rentan.
 - c. Penguatan Sistem Informasi Pasar Kerja.

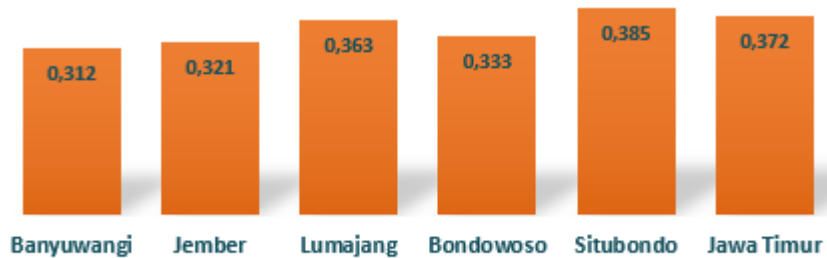
IKSS 2.8 Gini Ratio

Capaian 2024 99,35 %	Gini Rasio	
	Tahun 2024	RPJMD 2026
	Target : 0,31	Target : 0,30
	Realisasi : 0,312	



Pada tahun 2024, tingkat ketimpangan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan capaian yang cukup baik. Dengan target Gini Rasio sebesar 0,31, realisasi yang dicapai adalah 0,312, menghasilkan capaian kinerja sebesar 99,35%. Berdasarkan kategori capaian, angka ini masuk dalam klasifikasi "baik", yang mencerminkan adanya upaya nyata dalam mendorong pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan sosial di daerah ini.

Jika melihat tren dalam lima tahun terakhir, Gini Rasio di Kabupaten Banyuwangi mengalami fluktuasi, namun tetap menunjukkan arah yang positif. Pada tahun 2020, angka Gini Rasio tercatat sebesar 0,33, kemudian meningkat menjadi 0,373 pada tahun 2021, yang menandakan adanya peningkatan ketimpangan saat itu. Namun, pada tahun 2022 angka tersebut mulai menurun menjadi 0,329, sebelum kembali meningkat menjadi 0,351 pada tahun 2023. Baru pada tahun 2024, Gini Rasio kembali mengalami perbaikan signifikan dengan capaian 0,312. Penurunan ini menunjukkan adanya kebijakan dan program yang semakin efektif dalam mengatasi ketimpangan ekonomi di masyarakat.



Gini Rasio Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Sekitar Tahun 2024

Dibandingkan dengan kabupaten lain di sekitarnya, Kabupaten Banyuwangi menunjukkan angka ketimpangan yang lebih rendah di bandingkan kabupaten sekitar seperti Kabupaten Jember, Lumajang, Bondowoso dan Situbondo dan juga lebih rendah dari Gini Rasi Jawa Timur.

Keberhasilan dalam menekan ketimpangan ekonomi ini tentu tidak terlepas dari berbagai faktor yang berperan penting berkontribusi terhadap penurunan ketimpangan di Banyuwangi antara lain:

1. Peningkatan UMKM dan Ekonomi Kreatif: Program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas membantu meningkatkan kesejahteraan kelompok ekonomi menengah ke bawah.
2. Peningkatan Kesejahteraan Sosial: Bantuan sosial yang lebih merata bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Peningkatan Akses Pendidikan dan Pelatihan Kerja: Program pendidikan dan pelatihan vokasi membantu meningkatkan keterampilan tenaga kerja, sehingga pendapatan lebih merata.
4. Pembangunan Infrastruktur yang Merata: Pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan meningkatkan akses ekonomi bagi masyarakat di daerah terpencil.

Dengan pencapaian yang baik ini, Kabupaten Banyuwangi perlu terus melanjutkan upaya pemerataan ekonomi dengan mengembangkan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Konsistensi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta dukungan terhadap sektor-sektor produktif yang mampu menyerap tenaga kerja akan menjadi kunci utama dalam memastikan ketimpangan terus berkurang. Ke depan, dengan langkah-langkah yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Banyuwangi dapat semakin memperkuat posisinya sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan.



Tujuan ke-2

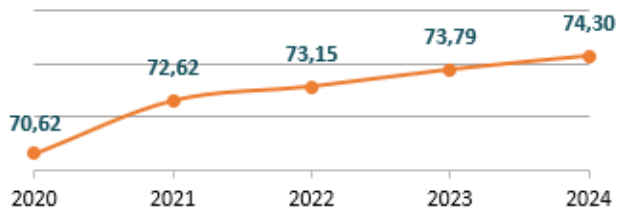
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan pilar utama dalam mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Kabupaten Banyuwangi menempatkan pembangunan manusia sebagai tujuan strategis daerah dengan mengintegrasikan berbagai aspek, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, optimalisasi layanan kesehatan, hingga penguatan kesejahteraan ekonomi. Lebih dari sekadar membangun kapasitas individu, upaya ini juga diarahkan untuk memperkuat karakter masyarakat melalui nilai-nilai budaya dan moral, sehingga melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas dan kompetitif, tetapi juga memiliki jati diri yang berkarakter.

Dalam upaya menyelaraskan kualitas pembangunan manusia, fokus utama pembangunan ini meliputi penyediaan sistem pendidikan yang berkualitas, peningkatan layanan kesehatan yang merata, serta penguatan daya beli masyarakat melalui indikator melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IKTS 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

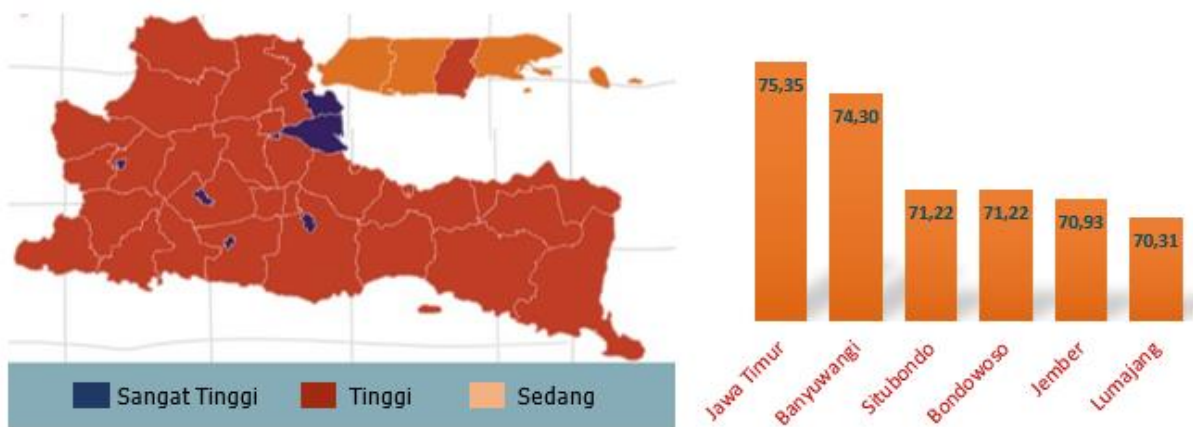
Keberhasilan pembangunan manusia di Kabupaten Banyuwangi diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencerminkan pencapaian di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pada tahun 2024, IPM Banyuwangi meningkat menjadi 74,30, dengan tingkat pencapaian kinerja mencapai 103,55%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 71,75%. Capaian ini tergolong dalam kategori "baik sekali".



IPM	
Tahun 2024	RPJMD 2026
Target : 71,75	Target : 72,59
Realisasi : 74,30	

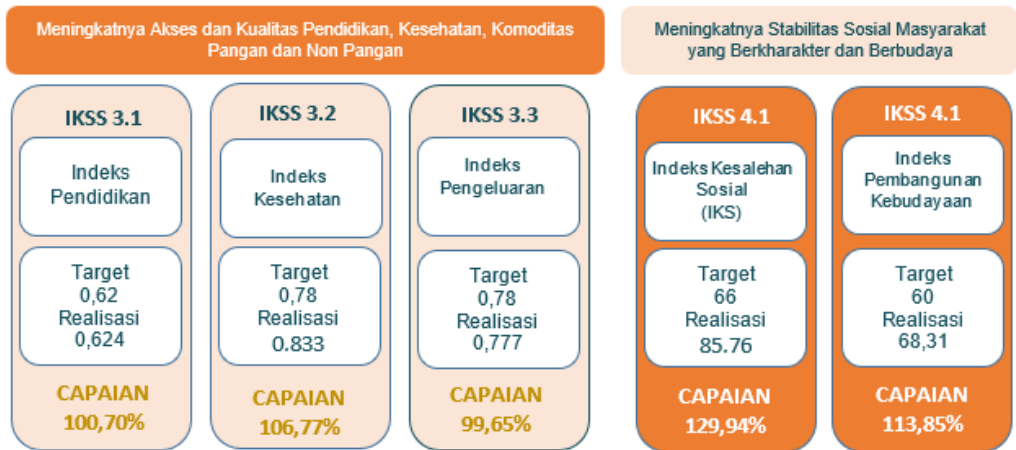
Capaian
2024
103,55 %

Berdasarkan kinerja pembangunan manusia (IPM) Jawa Timur 2024, Kabupaten Banyuwangi tergolong dalam kategori Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi di Provinsi Jawa Timur. Dengan capaian IPM sebesar 74,30 pada tahun 2024, Banyuwangi menempati posisi yang lebih baik dibandingkan beberapa daerah disekitarnya, seperti Situbondo dan Bondowoso yang masing-masing memiliki IPM 71,22, Jember 70,93, serta Lumajang 70,31. Sementara itu, rata-rata IPM Jawa Timur berada pada angka 75,35. Pencapaian ini mencerminkan kemajuan Banyuwangi dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan ekonomi masyarakat, sejalan dengan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

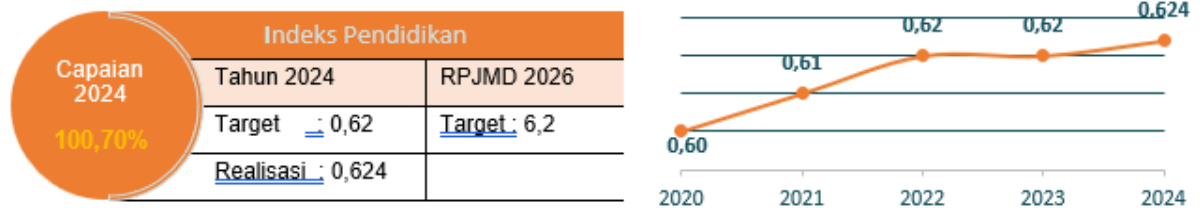


IPM Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Sekitar Tahun 2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dikabupaten banyuwangi didukung oleh kedalam 2 sasaran strategis yakni Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan dan Non Pangan dengan 3 Indikator kinerja dan sasaran strategis Meningkatkan Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya dengan 2 indikator kinerja.

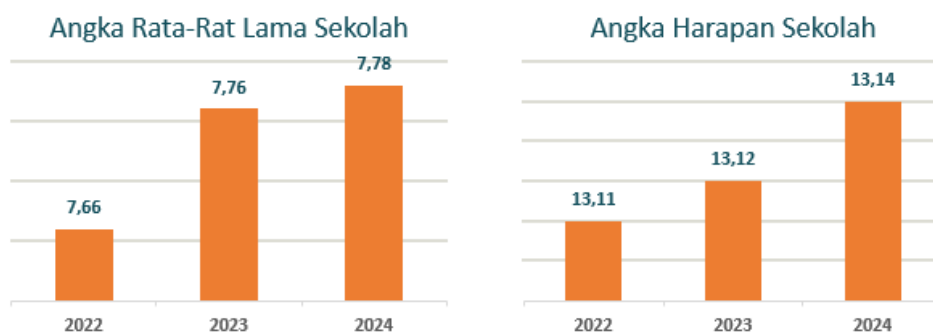


IKKS 3.9 Indeks Pendidikan



Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Pada tahun 2024, Indeks Pendidikan Banyuwangi mencapai 0,624, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 0,62. Dengan capaian 100,70%, kinerja ini memperoleh predikat "baik sekali" dan jika melihat tren dalam lima tahun terakhir, Indeks Pendidikan Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan yang konsisten.

Peningkatan Indeks Pendidikan ini tidak terlepas dari dua faktor utama yang membentuknya, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator ini menjadi tolok ukur dalam menilai sejauh mana akses dan kualitas pendidikan dapat dinikmati oleh masyarakat Banyuwangi.



Sejalan dengan peningkatan Indeks Pendidikan, ARLS menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Indikator ini mencerminkan rata-rata lama pendidikan yang ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas, yang meningkat dari 7,66 tahun pada 2022, menjadi 7,76 tahun pada 2023, dan 7,78 tahun pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang mengenyam pendidikan hingga jenjang SMP.

Di sisi lain, HLS, yang menggambarkan harapan lama bersekolah bagi anak-anak di Banyuwangi, juga mengalami kenaikan. Pada 2022, angka ini mencapai 13,11 tahun, meningkat menjadi 13,12 tahun pada 2023, dan 13,14 tahun pada 2024. Tren ini mencerminkan semakin besarnya peluang bagi anak-anak untuk menempuh pendidikan hingga jenjang SMA atau pendidikan tinggi (Diploma 1).

Berbagai program dan inovasi di bidang pendidikan terus dikembangkan untuk memastikan akses yang lebih luas, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memberikan dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan. Beberapa faktor utama yang mendukung keberhasilan ini antara lain:

1. Penguatan Pengelolaan Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjalankan program Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan Melalui Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan untuk memastikan bahwa setiap anak tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sebagai solusi bagi :

- a. Siswa putus sekolah akibat keterbatasan biaya, faktor budaya, atau lingkungan pergaulan yang ingin melanjutkan pendidikan namun tidak berkeinginan masuk kembali ke pendidikan formal, maka pendidikan non formal/ kesetaraan merupakan solusi untuk tetap dapat melanjutkan pendidikan.
- b. Masyarakat yang ingin melanjutkan pada pendidikan setara Jenjang Pendidikan Dasar (SD dan SMP) dan Pendidikan Menengah (SMA) maka melalui Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan dapat mengikuti paket A dan B untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan paket c untuk Pendidikan SMA.

2. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan melalui program
 - a. Banyuwangi Cerdas – Beasiswa Bidik Misi, Program ini memberikan bantuan bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan hingga ke pendidikan tinggi.
 - b. Akselerasi Sekolah Masyarakat (AKSARA), Inisiatif ini membuka akses pendidikan bagi masyarakat usia 23 hingga 58 tahun yang belum menyelesaikan jenjang Pendidikan SD, SMP dan SMA. Inovasi pendidikan yang selama ini dijalankan dipertajam lagi berbasis desa/kelurahan melalui inovasi Rintisan Desa Tuntas Pendidikan 12 Tahun (RINDU BULAN), dengan melakukan *crosscutting kinerja* dengan seluruh stakeholder/pemangku kepentingan serta pemerintahan tingkat kecamatan sampai dengan kelurahan/ desa untuk ikut dalam penanganan, pendampingan, menjangking dan memfasilitasi ATS Kembali ke sekolah
3. Kemudahan Aksesibilitas pendidikan dan Inovasi Sosial
 - a. Bantuan Garda Ampuh, program ini memberikan bantuan pendidikan kepada siswa miskin usia 7-18 tahun untuk mendukung pelaksanaan pendidikan siswa miskin rentan/putus sekolah karena biaya, budaya maupun pergaulan dan ATS sehingga mereka tetap dapat bersekolah tanpa kendala ekonomi.
 - b. Bantuan Uang Saku dan Transportasi merupakan bantuan financial untuk mendukung pelaksanaan siswa miskin usia 7-18 tahun rentan/putus sekolah karena biaya, budaya maupun pergaulan dan ATS yang tidak mampu, sehingga dengan dukungan financial yang diberikan pemerintah mereka tetap dapat bersekolah.
 - c. Siswa Asuh Sebaya (SAS), sebuah program inovatif yang menanamkan empati dan kepedulian sosial dikalangan siswa.

Inovasi SAS merupakan inovasi yang berkelanjutan, saat ini sudah berkembang menjadi SAS 5 (lima), yaitu:

 - 1) Siswa Asuh Sebaya, Siswa mampu menyisihkan uang jajannya dikumpulkan bersama dan kelola mandiri oleh siswa untuk membantu teman sebaya yang kurang mampu memenuhi kebutuhan personal (sepatu sekolah, tas, alat tulis, kaca mata sepeda dll).
 - 2) Sekolah Asuh Sekolah, Sekolah yang memiliki kelebihan dari segi

anggaran, fasilitas, kapasitas mengasuh sekolah laindukungan untuk sekolah lain yang membutuhkan (sarpas, eskul).

- 3) Sekolah Asuh Stunting, Siswa dan guru berkolaborasi memberikan makanan bergizi bagi balita stunting dan bumil risti (ibu hamil resiko tinggi) yang berada dalam lingkup wilayah sekolah tersebut. Serta bekerjasama dengan UMKM mlijo didaerah sasaran stunting.
 - 4) Sekolah Asuh Sungai, Sekolah mempunyai berkontribusi dalam menjaga kebersihan sungai, setiap sekolah SD, SMP dengan radius 1 km dari sungai diberikewajiban merawat sungai, sd sepanjang 200 meter, smp sepanjang 400 meter
 - 5) Sekolah Asuh Sampah, Sekolah memngelola sampah dilingkungan sekolah dengan cara 3R (reduce, reuse, recycle) sehingga meningkatkan edukasi dalam lingkungan pemeliharaan lingkungan. (terdapat 239 sekolah dari jenjang SD, SMP yang mengasuh sampah secara intens mampu mengelola sampah secara mandiri).
4. Pengawasan, Pembinaan, dan Penilaian Kelayakan Lembaga
- Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dilakukan pengawasan terhadap satuan pendidikan dan Lembaga Pendidikan kesetaraan/ nonformal (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) guna memastikan standar pendidikan tetap terjaga serta optimalisasi pelaksanaan program. Selain itu, dilakukan pembinaan dan pendampingan terhadap lembaga pendidikan SD, SMP, PAUD, serta pendidikan kesetaraan/nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat agar memenuhi standar akreditasi melalui fasilitasi akreditasi lembaga. Selanjutnya, dilakukan penilaian kelayakan terhadap usulan perizinan lembaga pendidikan SD, SMP, PAUD, dan pendidikan kesetaraan/nonformal yang dikelola masyarakat sesuai dengan regulasi yang berlaku.

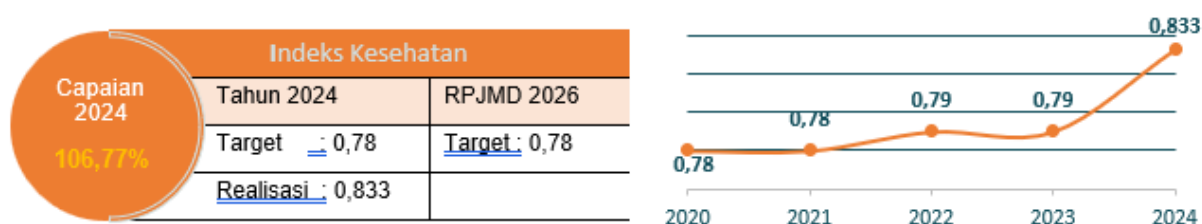
Kabupaten Banyuwangi berkomitmen membangun pendidikan yang inklusif dan berkualitas melalui berbagai program dan inovasi yang memperluas aksesibilitas bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan kurang mampu. Namun, tantangan ke depan tetap harus diantisipasi, seperti perubahan dinamika sosial,

perkembangan teknologi, dan tuntutan dunia kerja yang semakin kompetitif. Beberapa tantangan utama yang perlu dihadapi antara lain:

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga pendidik, guna memastikan proses pembelajaran berjalan optimal serta mampu membentuk fondasi akademik dan karakter peserta didik.
2. Pemerataan akses pendidikan, terutama di wilayah terpencil dan bagi kelompok masyarakat yang masih kesulitan mengakses pendidikan formal.
3. Penguatan literasi dan numerasi, sebagai fondasi utama dalam meningkatkan daya saing generasi muda.
4. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, guna menciptakan sistem pendidikan yang lebih fleksibel dan inovatif.

Kedepan perbaikan dan pengembangan pendidikan akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan komunitas pendidikan menjadi kunci dalam memastikan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas. Dengan langkah ini, Banyuwangi optimis mencetak generasi yang cerdas, berdaya saing, dan siap menghadapi masa depan

IKSS 3.10 Indeks Kesehatan



Pada tahun 2024, Indeks Kesehatan Kabupaten Banyuwangi menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dengan target yang ditetapkan sebesar 0,78, realisasi indeks kesehatan berhasil mencapai 0,833, dengan capaian kinerja 106,77%. Capaian ini masuk dalam kategori "Baik Sekali", yang mencerminkan keberhasilan berbagai program kesehatan yang telah dijalankan di Banyuwangi.

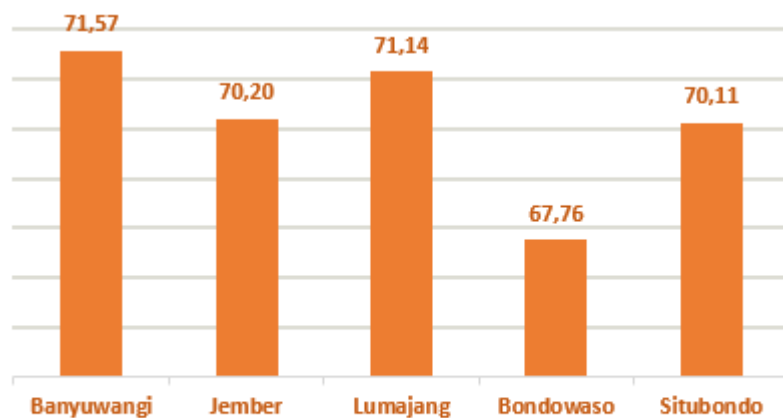
Jika melihat tren lima tahun terakhir, Indeks Kesehatan Banyuwangi mengalami peningkatan yang konsisten, dari 0,78 pada tahun 2020, naik menjadi 0,82 pada

2021, kemudian 0,83 pada 2022 dan 2023, hingga mencapai 0,833 pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan program kesehatan yang terus berkembang, termasuk peningkatan akses layanan kesehatan, kualitas tenaga medis, serta kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat.

Peningkatan Indeks Kesehatan Kabupaten Banyuwangi tidak terlepas dari beberapa faktor utama:

1. Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) mencerminkan rata-rata lama hidup penduduk berdasarkan kondisi kesehatan dan kualitas layanan kesehatan yang diterima.



Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Sekitar Tahun 2024

Pada tahun 2024, Kabupaten Banyuwangi berhasil mencatat Umur Harapan Hidup di wilayah sekitarnya dengan capaian 71,57. Angka ini menempatkan Banyuwangi di posisi teratas, melampaui Lumajang (71,14), Jember (70,20), Situbondo (70,11), dan Bondowoso (67,76). Keberhasilan ini merupakan hasil dari berbagai upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan, yang mencakup akses kesehatan yang lebih baik, penurunan angka kematian, peningkatan status gizi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat.

2. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berkomitmen untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang

memadai, baik dari segi fasilitas, tenaga medis, maupun sarana pendukung lainnya.

Upaya ini tercermin dalam berbagai capaian penting yang menunjukkan peningkatan kualitas layanan Kesehatan tahun 2024, antara lain:

- a) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan: 84,91%
- b) Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus: 100%
- c) Persentase Puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar: 15,56%
- d) Persentase Sarana Kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Sarana Pengelolaan Makanan dan Minuman yang berizin: 73,48%

3. Penurunan Angka Kematian Bayi dan Balita serta Tantangan Stunting

Keberhasilan program kesehatan ibu dan anak di Banyuwangi tercermin dari penurunan angka kematian bayi, yang kini berada di 9,8 per 1.000 kelahiran hidup (KH). Hal ini menunjukkan efektivitas program imunisasi, layanan neonatal, dan peningkatan gizi bayi serta balita.

Namun, prevalensi balita stunting masih mencapai 21,9%, yang menunjukkan bahwa perbaikan status gizi anak tetap menjadi prioritas utama dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Intervensi gizi yang lebih intensif, termasuk edukasi gizi bagi ibu hamil dan peningkatan akses pangan bergizi.

4. Tantangan dalam Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) saat melahirkan masih berada di angka 160,1 per 100.000 KH. Angka ini menjadi indikator penting dalam menilai kualitas layanan kesehatan bagi ibu hamil serta ketersediaan tenaga medis yang memadai. Untuk menekan angka ini, diperlukan:

- a) Perluasan akses terhadap fasilitas kesehatan yang aman dan pelayanan spesialistik
- b) Peningkatan layanan kesehatan ibu dan bayi
- c) Peningkatan tenaga medis yang kompeten dan terdistribusi dengan baik seperti dokter spesialis dan ketersediaan dokter subspecialis fetomaternal di Kab. Banyuwangi



5. Kesadaran Masyarakat dan Pola Hidup Sehat

Selain layanan medis, kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat juga meningkat. Saat ini, 49,77% desa di Banyuwangi telah menjadi Desa Siaga Aktif, yang berperan dalam membangun kesiapsiagaan kesehatan di tingkat komunitas.

Peningkatan jumlah Desa Siaga menunjukkan kemajuan dalam kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, termasuk:

- a) Meningkatnya kebiasaan konsumsi makanan bergizi
- b) Kesadaran akan pentingnya aktivitas fisik dan olahraga
- c) Pengurangan faktor risiko penyakit tidak menular

Sebagai daerah dengan capaian Indeks Kesehatan yang terus meningkat, Kabupaten Banyuwangi menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Keberhasilan yang telah diraih bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan pijakan untuk terus berinovasi dan memperluas jangkauan layanan kesehatan bagi seluruh warga.

Menjaga pencapaian ini membutuhkan upaya berkelanjutan melalui berbagai program inovatif di bidang kesehatan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus menggiatkan inisiatif strategis seperti Banyuwangi Tanggap Stunting (BTS) dan Sekolah Asuh Stunting (SAS) untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak. Selain itu, program Chip Primadona dan Pelayanan Stop Angka Kematian Ibu dan Anak (SAKINA) menjadi langkah konkret dalam menekan angka kematian ibu serta bayi baru lahir.

Tidak hanya itu, pendekatan berbasis pelayanan langsung ke masyarakat juga diperkuat melalui Jemput Bola Layanan Kesehatan, yang menjadi bagian dari program Laju Desa (Layanan Jemput Bola bagi Warga Desa), memastikan layanan kesehatan menjangkau seluruh pelosok. Program Pemburu Ibu Hamil Berisiko Tinggi (bumil risti) juga terus dioptimalkan untuk memberikan pendampingan intensif kepada ibu hamil yang membutuhkan perhatian khusus. Sementara itu, inovasi Mall Orang Sehat, yang memfasilitasi klinik konsultasi kesehatan di Puskesmas, semakin meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih mudah dan berkualitas.

Dengan penguatan berbagai program inovatif ini, Kabupaten Banyuwangi terus berupaya menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara merata. Sinergi antara pemerintah, tenaga medis, dan kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun daerah yang lebih sehat, berkualitas, dan sejahtera di masa depan.

IKSS 3.11 Indeks Pengeluaran

Indeks Pengeluaran	
Capaian 2024 99,65%	Tahun 2024
	Target : 0,78
	Realisasi : 0,777
	RPJMD 2026
	Target: 0,79

Pada tahun 2024, capaian Indeks Pengeluaran Kab Banyuwangi menunjukkan hasil yang positif dengan realisasi sebesar 0,777 dari target yang ditetapkan sebesar 0,78.

Dengan capaian kinerja mencapai 99,65%, Banyuwangi berhasil masuk dalam kategori "Baik". Capaian ini mencerminkan daya beli, tingkat konsumsi, serta stabilitas ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di banyuwangi.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara konsisten berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kebijakan strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya beli. Beberapa faktor dan strategi yang mendukung capaian Indeks Pengeluaran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 antara lain:

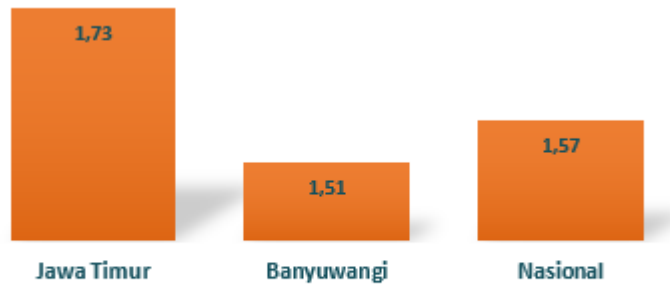
1. Stabilitas Pendapatan dan Daya Beli Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan lapangan kerja dan mendukung sektor usaha produktif, terutama UMKM, sektor pertanian, dan pariwisata sehingga menjaga daya beli masyarakat.

2. Pengendalian Inflasi dan Stabilitas Harga

Kebijakan pemerintah daerah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok melalui operasi pasar, subsidi pangan, dan program stabilisasi harga turut membantu menjaga daya beli masyarakat agar tetap tinggi. Inflasi Banyuwangi

year on year (YOY) 2024 sebesar 1,73% dan lebih tinggi dari inflasi Jawa Timur dan Nasional.



Inflasi ((year to date/y-t-d) Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2024

Namun demikian Angka Inflasi Banyuwangi masih berada di rentang target inflasi pemerintah dan Bank Indonesia (BI) tahun 2024, yakni sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen alias sebesar 1,5–3,5 persen. Penyumbang inflasi tahunan ini didominasi oleh kelompok perawatan pribadi dan lainnya dengan inflasi sebesar 10,5 persen dan andil inflasi sebesar 0,81. Khusus komoditas pangan yang menjadi penyumbang inflasi tahunan tertinggi padi, daging ayam ras, dan bawang.

3. Program Bantuan Sosial dan Subsidi

Berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Beras, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Padat Karya, Bantuan kepada pelaku usaha mikro, subsidi pangan, serta program penguatan ekonomi keluarga telah tersinkronisasi dan mengintegrasikan dengan data penanggulangan kemiskinan masyarakat banyuwangi melalui Program Unit Gawat Darurat Kemiskinan (UGDK), UGDK salah satu kebijakan strategis kabupaten banyuwangi menangani kemiskinan, disinkronkan dan diintegrasikan dengan berbagai dinas dan pemangku kepentingan, serta menggunakan aplikasi berbasis web untuk menyiapkan data kemiskinan sehingga penerima bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran dan dapat di monitoring sehingga dengan ketepatan sasaran tersebut menjaga kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga pengeluaran mereka tetap stabil.

4. Sektor Ekonomi Produktif

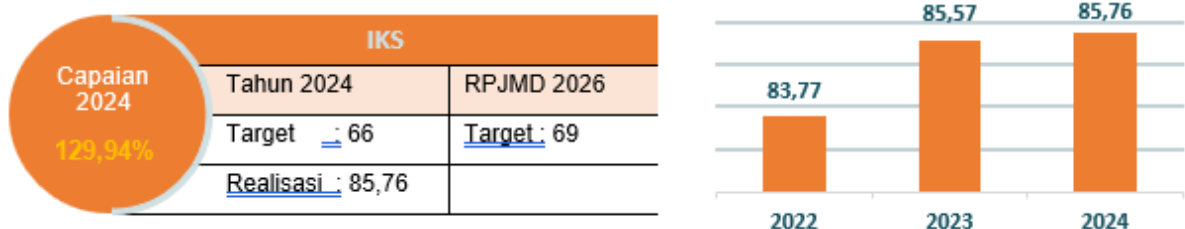
Penguatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan daya beli yang lebih stabil.

Maka untuk memastikan peningkatan indeks di tahun-tahun mendatang, pemerintah daerah akan terus mendorong program-program strategis, seperti:

1. Peningkatan lapangan kerja dan penguatan sektor ekonomi
2. Pengendalian harga kebutuhan pokok dan penguatan program subsidi
3. Dukungan terhadap UMKM dan usaha mikro
4. Peningkatan investasi dan inovasi ekonomi daerah

Dengan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, Kabupaten Banyuwangi optimis dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai target yang lebih tinggi dalam Indeks Pengeluaran di tahun mendatang.

IKSS 4.12 Indeks Kesalehan Sosial (IKS)

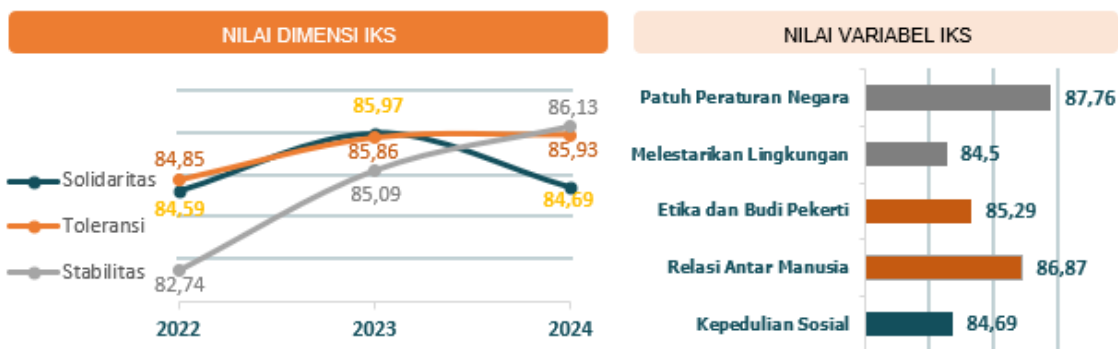


Capaian kinerja Indeks Kesalehan Sosial tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat positif. Dari target sebesar 66, realisasi yang berhasil dicapai mencapai 85,76, menghasilkan capaian kinerja sebesar 129,94% dengan kategori “Baik Sekali.” Pencapaian ini mencerminkan meningkatnya kepedulian sosial, kebersamaan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga harmoni dan nilai-nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat.

Jika melihat tren kinerja dalam tiga tahun terakhir, Indeks Kesalehan Sosial terus menunjukkan peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2022, IKS tercatat sebesar 83,77, kemudian meningkat menjadi 85,57 pada tahun 2023, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2024 dengan nilai 85,76. Kenaikan ini mencerminkan bahwa

berbagai program dan inisiatif sosial yang dijalankan semakin efektif dalam membangun kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam menjaga nilai-nilai moral dan sosial.

Tren positif ini mencerminkan keberlanjutan program sosial yang berjalan dengan baik. Indeks Kesalehan Sosial (IKS) berperan sebagai indikator penting dalam mengukur sejauh mana masyarakat mampu mengembangkan karakter berbasis gotong royong, toleransi, serta nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal. IKS dibangun dari tiga dimensi utama, yaitu Nilai Solidaritas, Nilai Toleransi, dan Nilai Stabilitas, yang masing-masing diperkuat oleh lima variabel: Kepedulian Sosial, Relasi Antar-Manusia, Etika dan Budi Pekerti, Pelestarian Lingkungan, serta Kepatuhan terhadap Peraturan Negara.



Dengan nilai positif diatas 84 dari ketiga dimensi dan lima variabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam program sosial telah berjalan dengan baik. Capaian ini selaras dengan penguatan pilar ketiga dari Gerakan Banyuwangi Rebound, yaitu membangun ekosistem yang harmonis dan inklusif bagi seluruh masyarakat.



Meskipun capaian Indeks Kesalehan Sosial (IKS) telah menunjukkan tren positif, upaya perbaikan dan peningkatan kinerja tetap menjadi prioritas untuk memastikan keberlanjutan serta dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan terus memperkuat program sosial dengan pendekatan yang lebih inovatif dan berbasis data, guna meningkatkan efektivitas setiap dimensi dan variabel dalam IKS.

Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh mencakup penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, optimalisasi peran komunitas dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat diantaranya:

1. Memperkuat peningkatan solidaritas, penguatan nilai sosial budaya lokal dalam pendidikan usia dini yang memupuk tanggung rasa pada generasi muda serta dapat berupa penguatan pada program-program sosial yang telah ada seperti Siswa asuh sebaya.
2. Menguatkan peran organisasi kemasyarakatan berbasis agama yang menysar langsung pada masyarakat akar rumput dalam memberikan edukasi terkait toleransi, kerja sama, dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Organisasi kemasyarakatan yang dapat menjadi partner strategis dalam hal ini antara lain adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Banyuwangi, dan ormas-ormas keagamaan masing-masing agama di Kabupaten Banyuwangi.

IKSS 4.13 Indeks Pembangunan Kebudayaan



Sebagai Kabupaten yang menjadikan kebudayaan sebagai salah satu pilar utama pembangunan, kebudayaan bukan hanya warisan yang harus dijaga, tetapi juga kekuatan yang dapat mendorong akselerasi pembangunan. Dengan pengelolaan yang baik, kebudayaan mampu menciptakan keseimbangan antara kemajuan

ekonomi, sosial, serta pelestarian nilai-nilai lokal yang menjadi identitas Banyuwangi.

Pada tahun 2024, pengukuran Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) menetapkan target IPK sebesar 60, namun dengan kerja keras dan kebijakan yang efektif, realisasi yang kami capai melampaui ekspektasi, mencapai angka 68,3. Dengan capaian sebesar 113,85% dari target, kami berhasil meraih kategori "baik sekali". Hal ini mengindikasikan bahwa Banyuwangi memiliki keunggulan dalam pengelolaan dan pembangunan kebudayaan dibandingkan dengan provinsi dan tingkat nasional. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa strategi kebijakan pembangunan kebudayaan telah memberikan dampak positif, memperkuat identitas budaya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan indikator penting dalam mengukur perkembangan sektor kebudayaan di suatu daerah. IPK terdiri dari tujuh dimensi utama, yaitu: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender.

Keberhasilan capaian IPK di Kabupaten Banyuwangi didukung oleh berbagai faktor strategis yang mencerminkan komitmen daerah dalam pengembangan kebudayaan, yakni:

1. Tingginya jumlah pelaku kebudayaan yang menjadikan kegiatan kebudayaan sebagai sumber utama perekonomian, yang mencapai 12,58% dalam skala lokal. Hal ini menunjukkan bahwa sektor kebudayaan memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian masyarakat banyuwangi.
2. Internalisasi nilai-nilai kebudayaan dalam sektor pendidikan menjadi aspek penting dalam menjaga keberlanjutan budaya. Proses ini dilakukan melalui penanaman nilai-nilai budaya dalam kurikulum serta berbagai kegiatan edukatif yang mendorong generasi muda untuk memahami dan melestarikan warisan budaya mereka salah satu contoh event budaya pagelaran gandung sewu yang melibatkan pelajar seluruh banyuwangi.



3. Toleransi terhadap keberagaman budaya juga menjadi salah satu pilar ketahanan sosial di Kabupaten Banyuwangi. Masyarakat yang heterogen mampu membangun harmoni sosial dengan tetap mempertahankan identitas budaya masing-masing. Hal ini diperkuat dengan berbagai inisiatif yang mendorong dialog budaya dan memperkuat semangat keberagaman.
4. Kabupaten Banyuwangi secara aktif melaksanakan upaya perlindungan terhadap warisan budaya benda maupun tak benda. Penetapan bangunan, struktur, dan situs cagar budaya menjadi salah satu bentuk nyata pelestarian warisan budaya benda. Sementara itu, pelestarian warisan budaya tak benda diwujudkan dalam penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari, yang menunjukkan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga identitas budaya lokal
5. Upaya pelestarian budaya di Banyuwangi juga tercermin dalam penyelenggaraan Banyuwangi Festival, sebuah ajang budaya yang mengangkat kearifan lokal dan menjadikannya sebagai daya tarik wisata. Festival ini tidak hanya menjadi wadah bagi ekspresi budaya masyarakat, tetapi juga memperkuat citra Banyuwangi sebagai destinasi wisata berbasis budaya. Dengan konsep "semua tempat adalah destinasi dan semua pertunjukan adalah atraksi," Banyuwangi Festival berhasil sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di daerah tersebut.

Meskipun Kabupaten Banyuwangi telah menunjukkan berbagai capaian positif dalam pembangunan kebudayaan, tentu dalam pembangunan kebudayaan berkelanjutan selalu terdapat tantangan, maka perlu strategi kebijakan dan peningkatan kinerja yang lebih terarah dan berkelanjutan, antara lain:

1. Penguatan Ekonomi Budaya dengan meningkatkan kemudahan akses pembiayaan dan perlindungan bagi pelaku budaya dan mempromosikan produk budaya lokal pada jejaring nasional seperti Festival Gandrung Sewu dan

Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) masuk dalam kalender Kharisma Event Nusantara (KEN) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2. Peningkatan Pendidikan Berbasis Budaya dengan memperkuat keikutsertaan dunia pendidikan menjadi bagian dari pembangunan budaya sebagai muatan lokal dan pelatihan guru dan memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran budaya.
3. Pelestarian Warisan Budaya melalui perlindungan situs cagar budaya dan memperbanyak dokumentasi warisan budaya tak benda.
4. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan atraksi budaya.

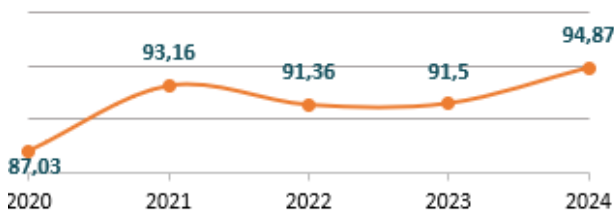


Tujuan ke-3

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator utama dalam mengukur kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada masyarakat. Sebagai alat kendali mutu, IKM berperan dalam menilai efektivitas dan kinerja layanan yang telah diselenggarakan serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan strategis guna meningkatkan kualitas layanan serta mendorong pengembangan inovasi untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat

IKTS. 4 Indeks Kepuasan Masyarakat



IKM	
Tahun 2024	RPJMD 2026
Target : 91.33	Target: 92.01
Realisasi : 94.87	

Capaian
2024
103,88%

Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024 menunjukkan capaian yang sangat positif, dengan target sebesar 91.33, realisasi mencapai 94.87, dan tingkat capaian 103.88%. Dengan kategori capaian "baik sekali", hasil ini mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi. Nilai rata-rata IKM berada dalam kategori Baik hingga Sangat Baik, yang menegaskan efektivitas berbagai kebijakan dan inovasi yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik.

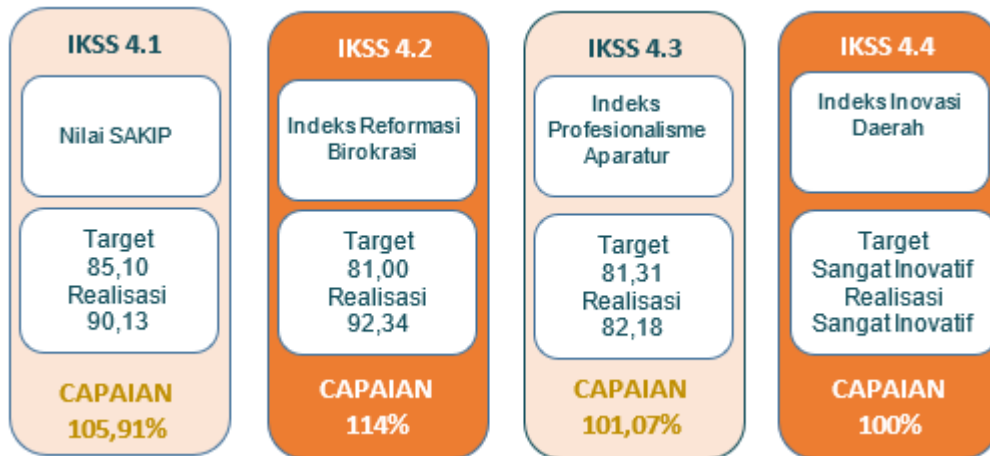
Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian IKM tahun 2024 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Sejak tahun 2020 dengan nilai 87.03, kemudian meningkat menjadi 93.16 di tahun 2021, mengalami sedikit penurunan

pada tahun 2022 sebesar 91.36, dan tahun 2023 sebesar 91.5, tren IKM kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2024 mencapai 94.87. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam berbagai aspek pelayanan publik, baik dalam peningkatan standar layanan, pemanfaatan teknologi, maupun penguatan budaya pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan hasil yang positif ini, diharapkan tren peningkatan kualitas pelayanan publik dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang

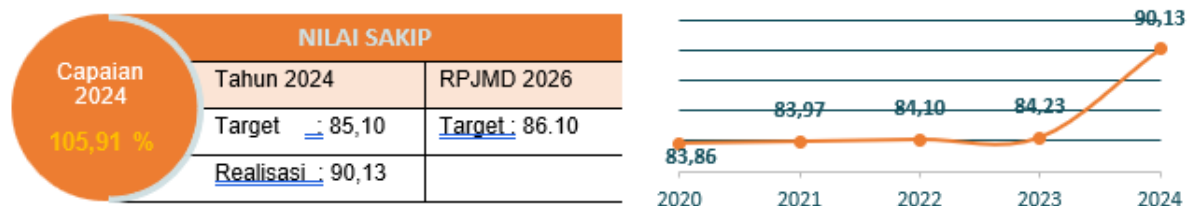
Beberapa kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang berkontribusi terhadap peningkatan ini antara lain:

1. Inovasi Pelayanan Digital – Implementasi layanan berbasis teknologi seperti Smart Kampung merupakan aplikasi layanan online dan sistem administrasi terpadu telah memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan public di Kabupaten Banyuwangi.
2. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur – Pelatihan dan peningkatan kapasitas pegawai negeri sipil serta tenaga layanan publik telah meningkatkan kompetensi dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Penyederhanaan Prosedur Administrasi – Reformasi birokrasi dengan pemangkasan prosedur yang tidak efisien telah mempercepat proses pelayanan.
4. Penguatan Infrastruktur Pelayanan – Peningkatan Pelayanan dengan mall pelayanan Publik, Pasar Layanan Publik dan Gerai Pelayanan Publik telah memberikan kenyamanan dan alternatif pilihan bagi masyarakat dalam mengakses layanan.
5. Transparansi dan Partisipasi Publik – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan keterbukaan dalam memberikan informasi kepada masyarakat serta melibatkan semua dalam proses evaluasi layanan.

Indeks Kepuasan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Banyuwangi diterjemahkan kedalam sasaran strategis meningkatnya tatakelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan sampai desa dengan 4 Indikator :



IKSS 5.14 Nilai SAKIP

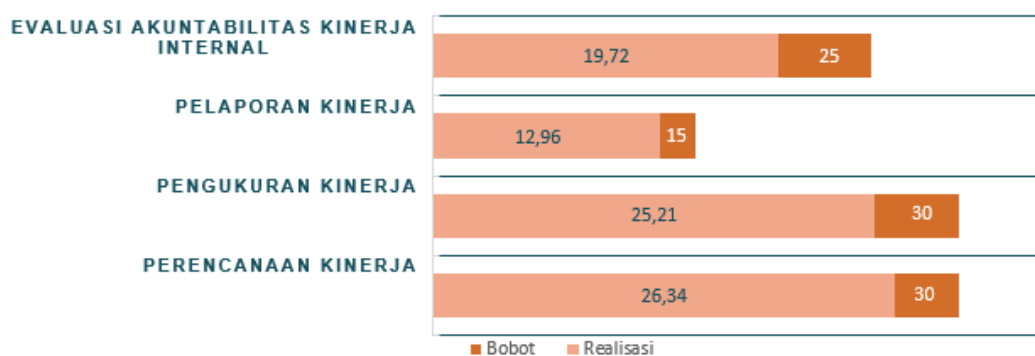


Kabupaten Banyuwangi terus menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Capaian nilai SAKIP yang diperoleh mencerminkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja yang semakin baik. Pada tahun 2024, Kabupaten Banyuwangi berhasil mencapai nilai SAKIP sebesar 90,13, melampaui target yang ditetapkan sebesar 85,10, dengan tingkat capaian kinerja mencapai 105,91%. Dengan hasil ini, Banyuwangi meraih kategori "Baik Sekali", yang mencerminkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintahan yang semakin optimal. Capaian ini menjadi bukti nyata atas komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja serta efektivitas penggunaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat.

Lebih membanggakan lagi, Kabupaten Banyuwangi menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang memperoleh predikat SAKIP kategori AA, sebuah pencapaian yang menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat tinggi dan berorientasi pada hasil. Dalam skala nasional, prestasi ini menempatkan Banyuwangi sejajar dengan Kota Surabaya untuk kategori kota, serta Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk

kategori provinsi. Keberhasilan ini semakin memperkuat posisi Banyuwangi sebagai salah satu daerah dengan tata kelola pemerintahan terbaik di Indonesia, sekaligus menjadi motivasi untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja pemerintahan yang profesional, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Capaian Nilai sakin Kabupaten Banyuwangi terdiri dari 4 komponen yang dinilai yakni :



Keberhasilan capaian SAKIP Tahun 2023 memiliki faktor pendukung :

1. Perencanaan Kinerja

Kabupaten Banyuwangi menerapkan sistem perencanaan kinerja yang berbasis outcome dan menuangkannya kedalam Penjenjangan Kinerja dan menetapkan pada dokumen perencanaan dengan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dirancang memiliki sasaran yang jelas, terukur, dan selaras dengan visi pembangunan daerah. Penguatan integrasi antara perencanaan strategis dan perencanaan anggaran juga menjadi kunci efektivitas dalam penggunaan sumber daya.

2. Pengukuran Kinerja

Sistem pengukuran kinerja dioptimalkan dengan menggunakan aplikasi Sistem Monitoring Kinerja Pegawai (Sim-K) dengan penggunaan indikator yang spesifik, terukur, dan realistis, sehingga capaian program dapat dievaluasi secara objektif dan setiap pegawai dapat terlihat kinerjanya dan kontribusinya dalam pencapaian Kinerja Organisasi, Monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program serta mengidentifikasi kendala yang perlu segera diselesaikan guna menjaga kualitas pencapaian

kinerja dan Pengukuran kinerja ini terhubung kedalam pemberian reward dan punishment Pegawai.

3. Pelaporan Kinerja

Penyusunan laporan kinerja dilakukan secara transparan, akurat, dan akuntabel, sesuai dengan prinsip good governance. Pemanfaatan teknologi dalam sistem pelaporan terintegrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi ke dalam system e-Sakip Banyuwangi memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat dan terintegrasi, sehingga proses evaluasi dan perbaikan kebijakan dapat dilakukan lebih responsif.

4. Evaluasi Akuntabilitas Internal

Evaluasi internal dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa seluruh perangkat daerah menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja secara optimal. Melalui mekanisme pengawasan yang ketat, audit internal oleh Tim Penilai Internal Auditor sehingga Kabupaten Banyuwangi berhasil meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan dan mencapai predikat SAKIP tertinggi di tingkat kabupaten

Dalam rangka memastikan akuntabilitas tetap terjaga dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis, serta seiring dengan meningkatnya nilai akuntabilitas, diperlukan upaya perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan ke depan antara lain:

1. Penguatan Perencanaan Kinerja

Memastikan bahwa sistem perencanaan kinerja yang berbasis outcome semakin matang, dengan penjenjangan kinerja yang lebih terstruktur dan penguatan integrasi antara perencanaan strategis dan anggaran agar setiap program lebih tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah.

2. Optimalisasi Pengukuran Kinerja

Mengembangkan dan menyempurnakan Sistem Monitoring Kinerja Pegawai (Sim-K) agar lebih efektif dalam memantau kontribusi setiap pegawai terhadap capaian kinerja organisasi. Penguatan mekanisme reward dan

punishment juga diperlukan guna meningkatkan motivasi pegawai dalam mencapai target kinerja.

3. Peningkatan Kualitas Pelaporan Kinerja

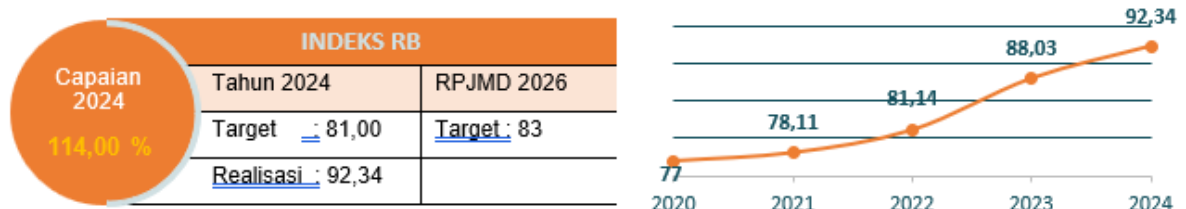
Memaksimalkan penggunaan e-SAKIP Banyuwangi untuk mengintegrasikan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja dalam satu sistem yang lebih responsif, transparan, dan berbasis data akurat guna mempercepat pengambilan keputusan berbasis evidence-based policy.

4. Penguatan Evaluasi Akuntabilitas Internal

Meningkatkan efektivitas mekanisme pengawasan dan audit internal oleh Tim Penilai Internal Auditor, guna memastikan bahwa prinsip akuntabilitas kinerja diterapkan secara optimal di seluruh perangkat daerah. Evaluasi yang lebih mendalam dan berbasis data akan menjadi dasar dalam melakukan perbaikan kebijakan yang berkelanjutan.

IKSS 5.15 Indeks Reformasi Birokrasi

memperkuat reformasi birokrasi sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang efektif, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas telah dilakukan pemerintah kabupaten banyuwangi secara berkelanjutan. Tahun 2024 sesuai hasil yang dikeluarkan Surat Kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi bahwa capaian sementara Indeks Reformasi birokrasi sebesar 92.34.



Pada tahun 2024, capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan yang signifikan, dengan target sebesar 81, realisasi mencapai 92,34, dan tingkat capaian mencapai 114% dengan kategori capaian kinerja "baik sekali". Capaian ini mencerminkan efektivitas implementasi berbagai strategi reformasi yang telah diterapkan. Jika melihat tren dari tahun-tahun sebelumnya, IRB Kabupaten Banyuwangi terus menunjukkan peningkatan, yang

menegaskan bahwa berbagai inovasi dan perbaikan dalam sistem birokrasi telah berjalan secara efektif dan memberikan dampak yang nyata.

Keberhasilan capaian reformasi birokrasi di Kabupaten Banyuwangi tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung yang telah diterapkan secara konsisten. Berbagai langkah strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi reformasi birokrasi telah memastikan efektivitas perubahan di seluruh aspek tata kelola pemerintahan. Keberhasilan ini diwujudkan melalui dua aspek utama, yaitu penguatan reformasi birokrasi general dan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik, yang masing-masing berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas birokrasi.

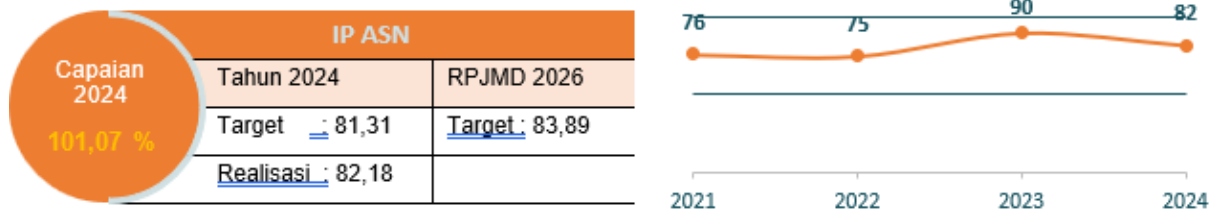
1. Penguatan Kebijakan dalam Reformasi Birokrasi General :

- a. Penguatan perencanaan aksi dan implementasi pembangunan reformasi birokrasi yang terintegrasi dengan kebijakan daerah.
- b. Penyederhanaan birokrasi di Kabupaten Banyuwangi serta penerapan sistem kerja baru bagi pegawai guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi.
- c. Peningkatan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hingga tahun 2024, Kabupaten Banyuwangi telah berhasil mencetak 1 OPD/Unit Kerja dengan predikat WBBM dan 3 OPD/Unit Kerja dengan predikat WBK.
- d. Pengelolaan sumber daya manusia aparatur berbasis sistem merit, guna menciptakan birokrasi yang profesional, kompeten, dan berintegritas.
- e. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan optimalisasi teknologi dalam tata kelola pemerintahan, seperti e-Government, sistem akuntabilitas kinerja berbasis digital, serta pelayanan publik berbasis digital guna mempercepat proses pelayanan dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

2. Pelaksanaan reformasi birokrasi tematik dengan berfokus pada empat penyelesaian isu-isu strategis yang berdampak langsung pada masyarakat yakni penyelesaian pengentasan kemiskinan, realisasi investasi, digitalisasi administrasi pemerintah pada penanganan stunting, penggunaan produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi melalui berbagai program inovatif yang telah

dikembangkan untuk meningkatkan reformasi birokrasi yang menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan berdampak kepada masyarakat.

IKSS 5.16 Indeks Profesionalisme Aparatur



Kabupaten Banyuwangi terus berupaya meningkatkan profesionalisme aparatur sebagai bagian dari komitmen dalam mewujudkan birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan berorientasi pada hasil. Pada tahun 2024, Indeks Profesionalisme Aparatur (IP ASN) mencapai 82,18 dari target 81,31, dengan capaian kinerja sebesar 101,07%, yang masuk dalam kategori "baik sekali". Capaian ini mencerminkan peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas aparatur, baik dalam aspek kompetensi, kinerja, disiplin, maupun kualifikasi aparatur, sehingga mampu mendukung optimalisasi pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Dari segi tren capaian IP ASN, dalam empat tahun terakhir terjadi Fluktuasi Nilai Indeks. Pada tahun 2021, IP ASN Kabupaten Banyuwangi tercatat sebesar 76, kemudian mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2023 menjadi 90. Sementara itu, pada tahun 2024, indeks berada pada angka 82, mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penambahan indikator baru dalam perhitungan IP ASN, yang memperluas cakupan aspek profesionalisme yang dinilai yakni memasukkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kedalam penilaian IP ASN pada tahun 2024. Meskipun demikian, capaian tahun 2024 tetap menunjukkan bahwa aparatur Kabupaten Banyuwangi memiliki profesionalisme yang tinggi serta mampu beradaptasi dengan standar penilaian yang semakin kompleks.

Keberhasilan capaian Indeks Profesionalisme Aparatur (IPA) Kabupaten Banyuwangi tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung yang berkontribusi

dalam peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Peningkatan disiplin, komitmen pimpinan, serta dorongan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan menjadi aspek utama yang mendorong efektivitas kinerja aparatur. Namun, di sisi lain, terdapat sejumlah kendala yang masih menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan profesionalisme ASN secara menyeluruh.

Faktor Pendukung Keberhasilan :

1. Meningkatnya disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yang mendorong peningkatan kinerja serta efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
2. Kesadaran ASN dalam meningkatkan kualifikasi pendidikan semakin meningkat, yang berdampak pada peningkatan kompetensi serta kemampuan aparatur dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara lebih profesional.
3. Adanya komitmen pimpinan dalam peningkatan indeks profesionalitas ASN, yang ditunjukkan melalui berbagai kebijakan dan program pengembangan kapasitas ASN, serta penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme ASN, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar pencapaian IPA dapat lebih optimal. Beberapa faktor yang menjadi penghambat keberhasilan dalam peningkatan profesionalisme aparatur di Kabupaten Banyuwangi antara lain :

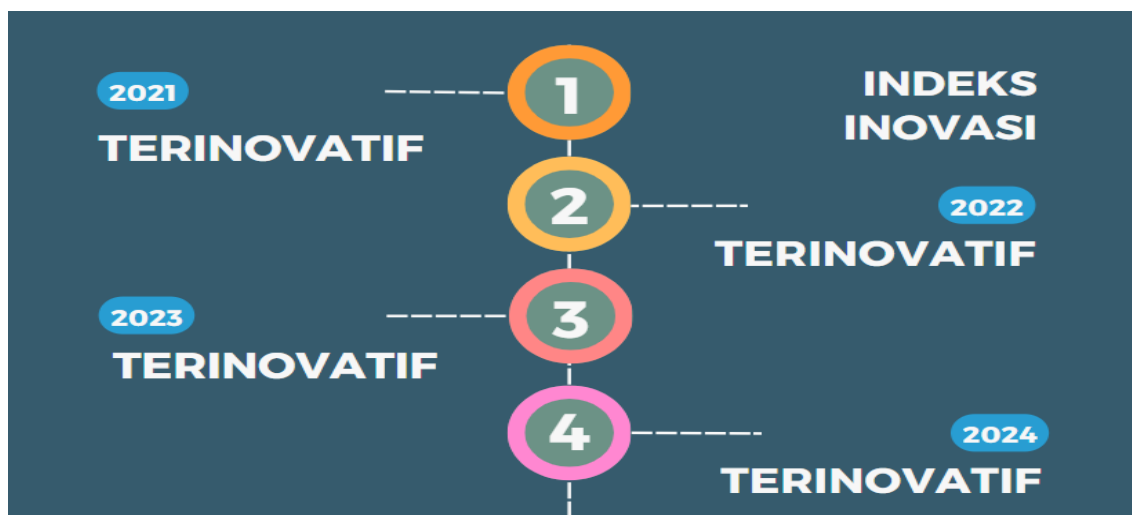
1. Perubahan sistem penilaian oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang mempengaruhi standar dan metode pengukuran profesionalitas ASN, sehingga memerlukan adaptasi dalam penerapannya.
2. Masih rendahnya partisipasi ASN dalam program pengembangan kompetensi, baik melalui pelatihan maupun pendidikan lanjutan, yang berdampak pada optimalisasi kinerja dan penguasaan tugas jabatan.
3. Budaya kerja yang masih menghambat pengakuan terhadap kinerja sangat baik, terutama dalam proses penilaian oleh pimpinan, sehingga jumlah ASN yang memperoleh penilaian kinerja sangat baik masih terbatas.
4. Penempatan ASN yang belum sepenuhnya sesuai dengan kualifikasi pendidikan, yang dapat menghambat efektivitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang keahliannya.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan strategi perbaikan yang berkelanjutan, termasuk peningkatan sistem penilaian kinerja berbasis objektivitas, optimalisasi program pengembangan kompetensi, serta penguatan budaya kerja yang lebih profesional dan berbasis kinerja. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan profesionalisme ASN di Kabupaten Banyuwangi dapat terus meningkat, sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas tata kelola pemerintahan.

IKSS 5.17 Indeks Inovasi Daerah

Inovasi daerah menjadi faktor kunci dalam meningkatkan capaian kinerja pemerintah daerah. Penerapan inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, selain itu juga sebagai strategi untuk mencapai target pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Capaian kinerja indikator Indeks Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 yaitu 100%. Target kinerja Indeks Inovasi daerah Tahun 2024 Sangat Inovatif berhasil dicapai dengan baik, bahkan Kabupaten Banyuwangi mendapatkan Predikat Kabupaten Terinovatif.



Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mempunyai komitmen dalam membangun inovasi yang berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dengan selama tujuh tahun berturut-turut, Banyuwangi berhasil meraih predikat Kabupaten Terinovatif dalam

ajang Innovative Government Award (IGA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (2018-2024).

Pemerintah Daerah terus menjaga keberlanjutan inovasi di Banyuwangi dengan menerapkan Manajemen Inovasi Daerah dan penguatan di beberapa aspek sebagai berikut:

1. Regulasi

Regulasi merupakan fondasi utama dalam penerapan inovasi daerah. Regulasi disiapkan yaitu SK kepala perangkat Daerah, SK bupati/Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah Kabupaten Banyuwangi

2. Sumberdaya

Penguatan Sumberdaya baik itu sumberdaya manusia, pendanaan, serta sarana prasarana pendukung dalam pelaksanaan inovasi.

3. Kolaborasi,

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selain membangun sinergi secara internal dengan beberapa Perangkat Daerah, juga membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti akademisi, dunia usaha, komunitas/masyarakat, dan media (pendekatan pentahelix). Dengan keterlibatan berbagai pihak, inovasi yang dihasilkan lebih berorientasi pada kebutuhan Masyarakat.

4. Pengembangan Teknologi,

Pengembangan e-Government dan digitalisasi layanan public dengan tujuan memberikan pelayanan lebih cepat, efisien, dan transparan. Pengembangan platform inovatif seperti Smart Kampung, e-budgeting, dan sistem informasi pelayanan publik juga menjadi contoh bagaimana teknologi dapat mempercepat transformasi birokrasi.

5. Monitoring Evaluasi,

Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala yang melibatkan Perguruan Tinggi.

6. Reward dan Punishment,

Untuk menanamkan budaya inovasi dalam birokrasi, pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerapkan sistem reward and punishment yang adil dan transparan melalui Rapor SKPD. Inovasi merupakan salah satu Indikator dalam

penilaian Raport SKPD yang mana reward dan punishmentnya diperhitungkan melalui Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus mendorong percepatan pembangunan melalui inovasi sebagai strategi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Inovasi tidak hanya menjadi sarana untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, tetapi juga sebagai upaya mempercepat pencapaian kinerja instansi pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan. Dengan komitmen kuat dalam membangun budaya inovasi, Banyuwangi mampu menghadirkan solusi efektif dalam penyelesaian permasalahan pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, bahkan di tengah keterbatasan dan dinamika perubahan yang terus berkembang.

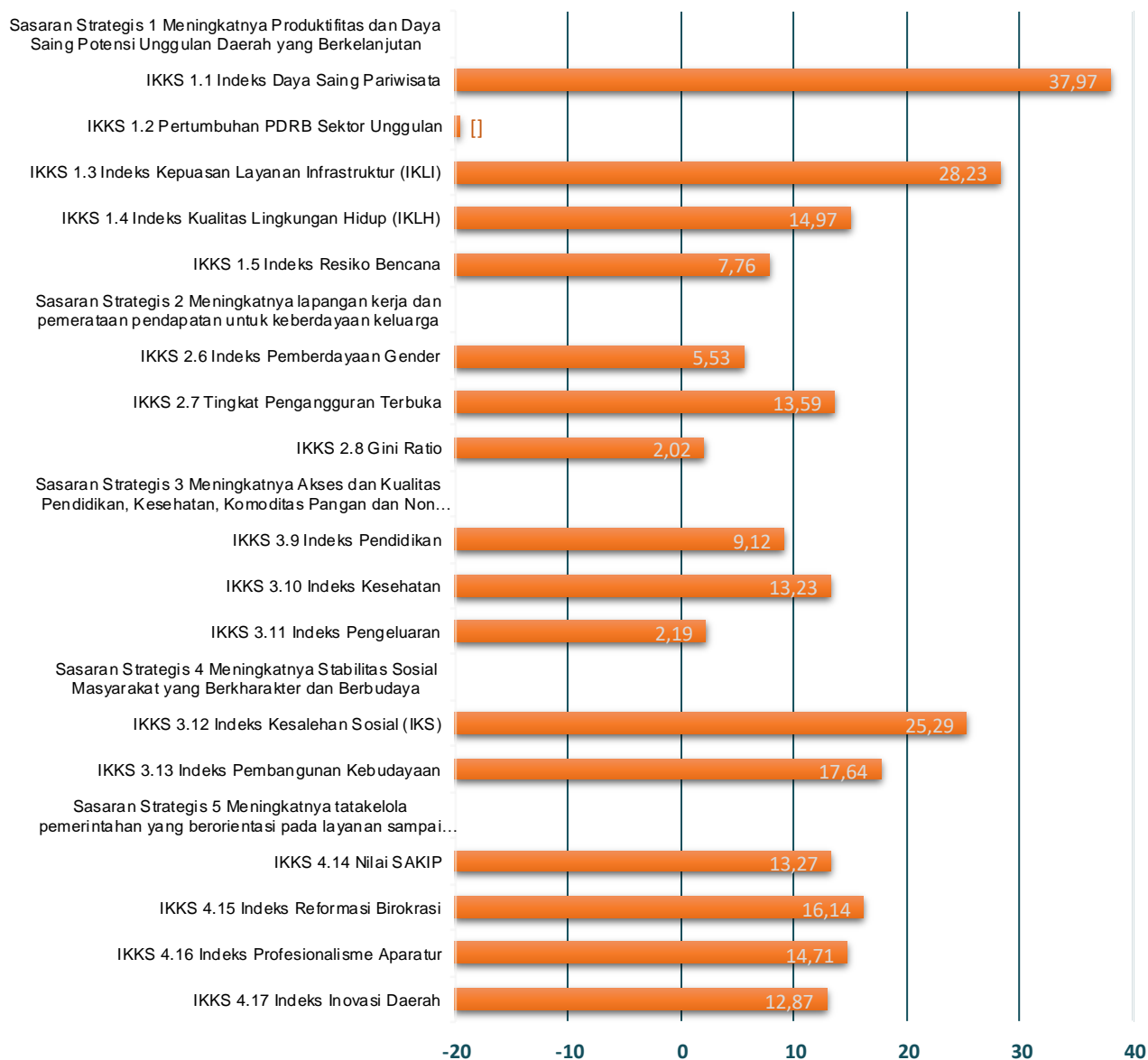
c. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai

Efisiensi pada pelaporan ini dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran sasaran dengan capaian indikator sasaran dan realisasi anggaran sasaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran sasaran dengan capaian indikator sasaran sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.



Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Strategis Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 :

• Efisiensi Indikator Sasaran Strategis



Pencapaian kinerja didukung oleh pelaksanaan Program dan Kegiatan. Keterkaitan Antara Sasaran, Indikator, dan Program dengan Target dan Realisasi anggaran adalah untuk melihat dan mengukur target dan realisasi program dalam menunjang pencapaian kinerja indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2024.

Realisasi anggaran Program Pendukung Ketercapaian Sasaran Strategis Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 :

SASARAN	Pagu	Realisasi	%
Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan	736.582.964.876,00	546.061.696.987,24	74,13
Meningkatnya Lapangan Kerja Dan Pemerataan Pendapatan Untuk Keberdayaan Keluarga	36.728.767.925,00	35.760.424.938,00	97,67
Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan dan Non Pangan	544.629.784.154,00	500.819.802.818,43	91,96
Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya	89.661.547.502,00	86.922.655.830,00	96,95
Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang Berorientasi pada Layanan Sampai Desa	2.321.012.058.357,00	2.148.827.402.791,41	92,58

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 tercermin dalam enam belas indikator dari tujuh belas indikator sasaran strategis dengan efisiensi pada 11 indikator diatas 10% dan 5 indikator di bawah 10% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 90,66%. Upaya efisiensi ini dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan anggaran yang berbasis pada hasil guna memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak maksimal terhadap pembangunan daerah.

Efisiensi anggaran tahun 2024 telah didorong oleh berbagai kebijakan strategis yang terus diperkuat pada tahun 2024, antara lain:

1. Refocusing dan Realokasi Anggaran

Mengoptimalkan belanja daerah dengan fokus pada program prioritas yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan target pembangunan, serta menyesuaikan alokasi anggaran berdasarkan evaluasi efektivitas program yang telah berjalan.

2. Penyusunan Pohon Kinerja dalam Perencanaan Pembangunan

Menyusun struktur kinerja yang lebih sistematis dan terukur melalui pendekatan pohon kinerja, yang menghubungkan sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan secara hierarkis. Dengan demikian, setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan dapat lebih terarah serta memiliki keterkaitan yang kuat antara input, output, dan outcome.

3. Percepatan Kinerja dengan Inovasi

Mendorong pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi layanan publik serta mempercepat implementasi program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Dengan pendekatan ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan kinerja pembangunan daerah secara lebih efektif, efisien, serta berkelanjutan.



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang telah ditentukan menjadi urusan Pemerintah Pusat. Pelaksanaan pemerintahan daerah menurut undang-undang ini berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Asas desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah, dan domain dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pusat kemudian menjadi milik daerah. Asas dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu (untuk urusan pemerintah absolut) atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum di wilayahnya. Sedangkan, asas tugas pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten / kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga (K/L). Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menunjukkan bahwa penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan

dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada pemberi penugasan. Berdasarkan pokok – pokok pemikiran tersebut, maka sangat penting dalam pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan untuk diberikan pengaturan secara lebih mendasar dan komprehensif.

3.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten

Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah. Sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi tersebut dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditugaskan. Dengan membangun kerjasama baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur maka di Tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi mendapatkan bantuan dana tugas pembantuan yang secara langsung ditujukan ke Perangkat Daerah teknis. Adapun Instansi Pemerintah pemberi Tugas Pembantuan tersebut adalah :

a. Kementerian Pertanian

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Pertanian mendapatkan dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian sebesar Rp. 455.000.000. Tugas pembantuan tersebut digunakan untuk melaksanakan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen. Sampai dengan akhir tahun 2024, capaian realisasi anggaran penyelenggaraan Tugas Pembantuan oleh Dinas Pertanian dan Pangan



di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp 452.517.179 atau sebesar 99,45% dari pagu yang diberikan.

b. Kementerian Koperasi dan UKM



Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Pertanian mendapatkan dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian sebesar Rp. 4.901.990.000. Tugas pembantuan tersebut digunakan untuk melaksanakan

Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi serta Program Perdagangan Dalam Negeri. Sampai dengan akhir tahun 2024, capaian realisasi anggaran penyelenggaraan Tugas Pembantuan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 4.080.619.252 atau sebesar 83,24% dari pagu yang diberikan.

Tabel 3.1
Tugas Pembantuan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024

No.	Asal Penugasan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Kementerian Pertanian RI	455.000.000	452.517.179	99,45%
2.	Kementerian Koperasi dan UKM RI	4.901.990.000	4.080.619.252	83,24%

Sumber : LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2024

3.3 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

3.3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Kabupaten Banyuwangi

Uraian target dan realisasi Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat Yang Dilaksanakan oleh Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program dan Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan
1.	Kementerian Pertanian RI	SP DIPA-018.04.4.059056/2024	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri						
			Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Banyuwangi	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi	350.000.000	348.210.000	99,49	Kegiatan terlaksana 100%
		SP DIPA-018.04.4.059056/2024	Program Dukungan Manajemen						
			Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Banyuwangi	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi	105.000.000	104.307.179	99,34	Kegiatan terlaksana 100%
2.	Kementerian Koperasi dan UKM RI	SP DIPA-044.01.4.051115/2024	Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi						

			Kegiatan Penguatan Rantai Pasok Usaha Mikro	Banyuwangi	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi	1.401.990.000	1.398.127.000	99,72	Kegiatan terlaksana 100%
		SP DIPA-090.02.4.059521/2024	Program Perdagangan Dalam Negeri						
			Pengembangan Sarana Perdagangan dan Kapasitas Logistik	Banyuwangi	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi	3.500.000.000	2.682.492.252	76,64	Kegiatan terlaksana 100%

3.3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/ Kota Nihil

3.4 Permasalahan dan Kendala

Tugas Pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian Tugas Pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi Daerah dan Desa.

Pada melaksanakan tugas pembantuan tahun 2024 dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi melalui Perangkat Daerah teknis mendapatkan beberapa permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Permasalahan Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2024

No	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program	Permasalahan
1.	SP DIPA-018.04.4.059056/2024	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Kesulitan Penyediaan Kemasan / Packaging pada Olahan Tanaman Obat / Biofarmaka dengan Spesifikasi yang Dibutuhkan Mengingat Kuota Pemesanan yang Sedikit dengan Keterbatasan Anggaran Tersedia
2.	SP DIPA-018.04.4.059056/2024	Program Dukungan Manajemen	
3.	SP DIPA-044.01.4.051115/2024	Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi	Harus menyesuaikan penyesuaian belanja sesuai kebutuhan karena DIPA turun di Triwulan III
4.	SP DIPA-090.02.4.059521/2024	Program Perdagangan Dalam Negeri	

3.5 Saran dan Tindak Lanjut

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Tugas Pembantuan dibutuhkan koordinasi intens dengan kementerian terkait untuk membahas detail pelaksanaan kegiatan demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal,

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Penerapan dan Penetapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan antara lain :

- a. Kesesuaian kewenangan, SPM diterapkan sesuai dengan kewenangan Daerah kabupaten/kota menurut pembagian Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
- b. Ketersediaan, SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal;
- c. Keterjangkauan, SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar, mudah diperoleh oleh setiap Warga Negara;
- d. Kesiambungan, SPM ditetapkan dan diterapkan untuk memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar Warga Negara secara terus-menerus;
- e. Keterukuran, SPM ditetapkan dan diterapkan dengan barang dan/atau jasa yang terukur untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara; dan

- f. Ketepatan sasaran, SPM ditetapkan dan diterapkan untuk pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal dan pemenuhan oleh Pemerintah Daerah ditujukan kepada Warga Negara dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan didukung dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, yang menjadi Urusan Wajib bagi Pemerintahan Kabupaten/ Kota Khususnya Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi adalah:

Tabel 4.1
Jenis Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	b. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	c. Tata cara pemenuhan standar

Adapun yang dimaksud dengan mutu pelayanan dasar Pendidikan adalah sebagai berikut :

a. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan atau Jasa

Tabel 4.2
Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan atau Jasa

NO	JENJANG	JUMLAH DAN KUALITAS BARANG DAN/ATAU JASA			
		STANDAR SATUAN PENDIDIKAN	KUALITAS DAN PEMERATAAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK	PARTISIPASI DAN PEMERATAAN PESERTA DIDIK	KUALITAS DAN PEMERATAAN LAYANAN
1	PAUD	a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi c. Standar Proses d. Standar Sarana dan Prasarana e. Standar Pengelolaan f. Standar Pembiayaan g. Standar Penilaian Pendidikan	-	-	a. Angka b. Partisipasi Murni c. Angka Partisipasi Sekolah d. Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah Kuintil Terendah Dengan Kuintil Tertinggi
2	Pendidikan Dasar (SD dan SMP)	a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi c. Standar Proses d. Standar Sarana dan Prasarana e. Standar Pengelolaan f. Standar Pembiayaan g. Standar Penilaian Pendidikan	a. Kompetensi Literasi b. Kompetensi Numerasi	a. Kesenjangan Kompetensi Literasi Berdasarkan Gender Dan Status Sosial Ekonomi b. Kesenjangan Kompetensi Numerasi Berdasarkan Gender Dan Status Sosial Ekonomi	a. Angka Partisipasi Kasar b. Angka Partisipasi Sekolah
3	Pendidikan Kesetaraan	a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi c. Standar Proses d. Standar Sarana dan Prasarana e. Standar Pengelolaan f. Standar Pembiayaan g. Standar Penilaian Pendidikan	a. Kompetensi Literasi b. Kompetensi Numerasi	a. Kesenjangan Kompetensi Literasi Berdasarkan Gender dan Status Sosial Ekonomi b. Kesenjangan Kompetensi Numerasi Berdasarkan Gender dan Status Sosial Ekonomi	a. Angka Partisipasi Kasar b. Angka Partisipasi Sekolah

b. Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tabel 4.3
Standar Jumlah Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

NO.	JENJANG	KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
		PENDIDIK	TENAGA KEPENDIDIKAN	
			KEPALA SATUAN PENDIDIKAN	TENAGA PENUNJANG
1	PAUD	a. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah S1/DIV bidang PAUD, bimbingan konseling atau psikologi b. Bersertifikat Pendidik	a. Berasal dari guru b. Memiliki kualifikasi akademis paling rendah S1/DIV bidang PAUD, bimbingan konseling atau psikologi c. Bersertifikat Pendidik d. Memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun e. Memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	-
2	Pendidikan Dasar (SD/SMP)	a. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah S1/DIV b. Bersertifikat Pendidik	a. Berasal dari guru b. Memiliki ijazah paling rendah S1/DIV c. Bersertifikat Pendidik d. Memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun e. Memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	a. Memiliki ijazah paling rendah SMA/ sederajat
3	Pendidikan Kesetaraan	a. Memiliki ijazah paling rendah S1/DIV sesuai dengan rumpun atau bidang yang diampu	a. Memiliki ijazah paling rendah S1/DIV sesuai dengan rumpun atau bidang yang diampu	a) Memiliki ijazah paling rendah SMA/ sederajat

4.1.2 Target Pencapaian

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 59 Tahun 2021, yang menjadi target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan adalah :



Tabel 4.4

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	KET.
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 5-6 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-15 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-18 tahun)	Setiap tahun	
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi	Meningkat dari hasil dua	Setiap tahun				

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	KET.
		siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	tahun sebelumnya					

4.1.3 Realisasi

Tabel 4.5
Hasil Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					100.00 %
1.	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	42595	42595	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1. Angka partisipasi sekolah	%	96.02	96.02	0	100.00 %
	2. Angka partisipasi murni	%	72.65	72.65	0	100.00 %
	3. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	84.81	84.81	0	100.00 %
	4. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	89.32	89.32	0	100.00 %
	5. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	2	2	0	100.00 %
	6. Kecukupan formasi guru ASN	%	100	100	0	100.00 %
	7. Indeks distribusi guru	%	0.4	0.4	0	100.00 %
	8. Proporsi PTK bersertifikat	%	62.98	62.98	0	100.00 %
	9. Proporsi PTK penggerak*	%	3.52	3.52	0	100.00 %



NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
2.	PENDIDIKAN DASAR					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	64906	64906	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	SD					100.00 %
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100.43	100.43	0	100.00 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	98.44	98.44	0	100.00 %
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	84.55	84.55	0	100.00 %
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	78.88	78.88	0	100.00 %
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	3.03	3.03	0	100.00 %
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	1.08	1.08	0	100.00 %
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	75	75	0	100.00 %
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	75.48	75.48	0	100.00 %
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	58.4	58.4	0	100.00 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	9.73	9.73	0	100.00 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	0.33	0.33	0	100.00 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	32.95	32.95	0	100.00 %
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0	100.00 %
	SMP					100.00 %
	1 . Angka partisipasi kasar	%	109.33	109.33	0	100.00 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	99.2	99.2	0	100.00 %
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	82.01	82.01	0	100.00 %
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	78.1	78.1	0	100.00 %
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	2.77	2.77	0	100.00 %
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	1.89	1.89	0	100.00 %
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	69.61	69.61	0	100.00 %
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	73.35	73.35	0	100.00 %
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	56.68	56.68	0	100.00 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	1.42	1.42	0	100.00 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	0.37	0.37	0	100.00 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	42.44	42.44	0	100.00 %
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
3.	PENDIDIKAN KESETARAAN					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	3781	3781	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Angka partisipasi kasar	%	0	0	0	100.00 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	14.67	14.67	0	100.00 %
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	60.54	60.54	0	100.00 %
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	59.31	59.31	0	100.00 %
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	4.05	4.05	0	100.00 %
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	4.07	4.07	0	100.00 %
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	70.65	70.65	0	100.00 %
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	63.82	63.82	0	100.00 %
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	56.42	56.42	0	100.00 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0	100.00 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	0	0	0	100.00 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	0	100.00 %
13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0	100.00 %	

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran yang mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan adalah secara keseluruhan Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)
1	Program Pengelolaan Pendidikan		327.654.740.050	299.752.659.376
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	159.152.079.600	150.284.363.646
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	83.357.406.100	78.735.816.635



NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	40.358.840.400	35.723.459.131
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	44.786.413.950	35.009.019.96
2	Program Pengembangan Kurikulum		41.400.000	39.386.600
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	41.400.000	39.386.600
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan		24.998.100	24.266.700
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	24.998.100	24.266.700
4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan		149.953.850	100.766.600
		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	79.968.850	58.728.500
		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	69.985.000	53.106.000
5	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra			
		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000	0
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		760.533.625.169	732.844.008.688
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	751.699.000	372.956.509
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	701.659.399.769	676.894.929.000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.000.000	96.280.200
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	349.999.000	333.183.700
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.822.549.200	1.566.887.150
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	377.727.400	49.800.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.671.700.000	53.386.743.712
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	800.550.800	143.228.417
		TOTAL	1.088.691.069.119	1.032.936.575.764

4.1.5 Dukungan Personil

Dalam upaya penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi didukung oleh seluruh Bidang, Sub Bagian, Koordinator Wilayah Kerja Satuan Pendidikan, Pengawas dan Penilik serta guru dan tenaga kependidikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.7
Dukungan Personil untuk Pencapaian SPM Dinas Pendidikan Tahun 2024

JABATAN	ESELON	PANGKAT	GOL/RUANG	JUMLAH
Kepala Dinas	Eselon II.B	Pembina Utama Muda	IV/c	1
Kepala Bidang	Eselon III.B	Pembina Tingkat I	IV/b	2
		Pembina	IV/a	1
	Eselon III.A	Pembina Tk. I	IV/b	1
	Eselon IV.A	Pembina Tk. I	IV/b	1
		Penata Tk. I	III/d	3
Kepala Sub Bagian	Eselon IV.A	Penata	III/c	1
Staf		Pengatur	II/c	7
		Penata Muda	III/a	2
		Penata Muda Tk.I	III/b	3
		Penata	III/c	2
		Pembina Tk.I	IV/b	1
Pejabat Fungsional		Penata Tk. I	III/d	1
		Penata Muda	III/a	2
		PPPK	IX	2
Guru		Pengatur Muda	II/a	9
		Pengatur Muda Tk.I	II/b	18
		Pengatur	II/c	4
		Pengatur Tk.I	II/d	2
		Penata Muda	III/a	96
		Penata Muda Tk.I	III/b	658
		Penata	III/c	304
		Penata Tk.I	III/d	1074
		Pembina	IV/a	332
		Pembina Tk.I	IV/b	775
		Pembina Utama Muda	IV/c	269
		PPPK	IX	2993
		Pengawas Sekolah		Penata Tk.I
Pembina	IV/a			4
Pembina Tk.I	IV/b			16
Pembina Utama Muda	IV/c			5
Penilik		Pembina Tk.I	IV/b	4
Tenaga Kependidikan		Juru	I/c	2
		Juru Tk.I	I/d	8
		Pengatur Muda	II/a	13
		Pengatur Muda Tk.I	II/b	32
		Pengatur	II/c	47
		Pengatur Tk.I	II/d	4
		Penata Muda	III/a	6
		Penata	III/c	1
		Penata Tk.I	III/c	5
Guru		Non PNS		1673
Tenaga Kependidikan		Non PNS		869

JABATAN	ESELON	PANGKAT	GOL/RUANG	JUMLAH
Staf Dinas		THL		24
Staf Korwil		THL		20
PTT Korwil		THL		38
TOTAL				9339

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

a. Pendidikan Anak Usia Dini

1) Angka Partisipasi Sekolah

a) Permasalahan

- Jumlah Angka Partisipasi Sekolah jenjang PAUD masih belum mencapai 100% yaitu pada capaian 96,02% Hal tersebut menunjukkan masih ada anak usia 5-6 tahun yang belum bersekolah di jenjang PAUD.

b) Solusi

- Melakukan koordinasi dengan dinas terkait, perangkat desa/kelurahan, kecamatan, badan penyelenggara satuan pendidikan, Kemenag dan stakeholder lainnya untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mendorong Satuan PAUD untuk mendapatkan izin menyelenggarakan pendidikan (izin pendirian dan izin operasional) bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk mendapatkan NPSN agar dapat terdata di DAPODIK.

2) Angka Partisipasi Murni

a) Permasalahan

- Jumlah Angka Partisipasi Murni jenjang PAUD adalah 72,65%. Hal ini disebabkan masih ada peserta didik yang bersekolah di PAUD tidak sesuai dengan usia ideal 5-6 tahun.

b) Solusi

- Melakukan koordinasi dengan perangkat desa/kelurahan, badan penyelenggara satuan pendidikan, Kemenag dan stakeholder lainnya untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memberikan sosialisasi dan advokasi kepada orang tua peserta didik dan masyarakat untuk bersekolah pada jenjang PAUD sesuai dengan usia ideal di jenjang PAUD yaitu 5-6 tahun.
- 3) Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B
- a) Permasalahan
 - Jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B sebesar 89,32%, walaupun sudah sesuai target yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan , namun masih ada Satuan PAUD yang mendapatkan nilai akreditasi kurang dari B. Hal ini disebabkan adanya pendirian lembaga baru dan terbatasnya kuota pelaksanaan akreditasi Satuan Pendidikan yang sudah ditentukan oleh BAN PNF (Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal) , serta kenaikan standar nilai pada setiap point penilaian akreditasi.
 - b) Solusi
 - Dinas Pendidikan melaksanakan pendampingan teknis, konsultatif maupun pendampingan sesuai kebutuhan PAUD dalam hal kelembagaan dan manajemen untuk mencapai PAUD berkualitas.
 - Dinas pendidikan melaksanakan sosialisasi penguatan evaluasi sistem Pendidikan anak usia dini untuk penyelenggaraan PAUD berkualitas. Selain itu, Dinas Pendidikan juga melakukan advokasi kepada satuan pendidikan dalam menyusun perencanaan berdasarkan indikator PAUD berkualitas.

b. Pendidikan Dasar

- 1) Angka Partisipasi Sekolah
 - a) Permasalahan
 - Jumlah Angka Partisipasi Sekolah jenjang SD dan SMP masih baru mencapai 98,44% dan 99,2% atau belum mencapai 100%.
 - b) Solusi
 - Melakukan koordinasi dengan dinas terkait, perangkat desa/kelurahan, kecamatan, badan penyelenggara satuan pendidikan, Kemenag dan

stakeholder lainnya untuk penjangkauan, pengembalian, dan pendampingan ATS (anak tidak sekolah) sesuai dengan akar masalah.

- Melaksanakan inovasi pemberian bantuan biaya pendidikan dan perlengkapan penunjang pembelajaran kepada peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu.

c. Pendidikan Kesetaraan

1) Permasalahan

- Capaian Kemampuan dan Kemampuan Numerasi masih belum maksimal.

2) Solusi

- Dinas Pendidikan peningkatan kualitas pembelajaran pada Pendidikan Kesetaraan terutama yang berkaitan dengan Peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh satuan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan antara lain :

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- d. Pelayanan Kesehatan Balita
- e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
- j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
- k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

- l. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)
- yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif, diantaranya :
- Peningkatan kesehatan;
 - Perlindungan spesifik;
 - Diagnosis dini dan pengobatan tepat;
 - Pencegahan kecacatan;
 - Rehabilitasi.

Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta. Pelayanan dasar dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan, juga oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan.

4.2.2 Target Pencapaian

Tabel 4.8

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	KET.
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu bersalin yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	KET.
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah bayi baru lahir yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Balita usia 36-59 bulan	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah balita yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah anak usia pendidikan dasar yang akan dipenuhi)		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	KET.
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara usia produktif yang akan dipenuhi)		
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara usia lanjut yang akan dipenuhi)		
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia \geq 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara Penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)		
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah penderita diabetes mellitus usia \geq 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatk	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang akan		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN					
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR		
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN
		an pelayanan kesehatan sesuai standar				dipenuhi)	
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi)	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang akan dipenuhi)	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang akan dipenuhi)	

4.2.3 Realisasi

Tabel 4.9
Hasil Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					100.00 %	
1.	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL						100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	17400	17400	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	7174	7174	0	100.00 %	
	2. Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	2360160	2360160	0	100.00 %	
	3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	18170	18170	0	100.00 %	
	4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	18170	18170	0	100.00 %	
	5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	18170	18170	0	100.00 %	
	6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	18170	18170	0	100.00 %	
	7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	45	45	0	100.00 %	
	8. Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	45	45	0	100.00 %	
	9. Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	18170	18170	0	100.00 %	
	10. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	45	45	0	100.00 %	
	11. Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi)	Botol	305	0	305	100.00 %	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)						
	12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"	Orang	430	430	0	100.00 %	
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	2182	2182	0	100.00 %	
	14 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	1319	1319	0	100.00 %	
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	313	313	0	100.00 %	
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	136	136	0	100.00 %	
	17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	15400	15400	0	100.00 %	
2 .	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN						100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	17523	17523	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Formulir partograf	Formulir	18170	18170	0	100.00 %	
	2 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	18170	18170	0	100.00 %	
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	18170	18170	0	100.00 %	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	(Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)						
	4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	45	45	0	100.00 %	
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	430	430	0	100.00 %	
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Paket	1319	1319	0	100.00 %	
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	2182	2182	0	100.00 %	
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	313	313	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	136	136	0	100.00 %	
3 .	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR						100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	17225	17225	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	10610	10610	0	100.00 %	
	2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul	16603	16603	0	100.00 %	
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang	16603	16603	0	100.00 %	
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	16603	16603	0	100.00 %	
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	16603	16603	0	100.00 %	



NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	16603	16603	0	100.00 %	
	7 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	45	45	0	100.00 %	
	8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	430	430	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1319	1319	0	100.00 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2182	2182	0	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	313	313	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	28	28	0	100.00 %	
	13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	136	136	0	100.00 %	
	14 . Kader Kesehatan	Orang	10231	10231	0	100.00 %	
4 .	PELAYANAN KESEHATAN BALITA						100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	97179	97179	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	80019	80019	0	100.00 %	
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	80019	80019	0	100.00 %	
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	80019	80019	0	100.00 %	
	4 . Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	25250	25250	0	100.00 %	
	5 . Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	231650	231650	0	100.00 %	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	12898	12898	0	100.00 %	
	7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	14454	14454	0	100.00 %	
	8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	13576	13576	0	100.00 %	
	9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	12936	12936	0	100.00 %	
	10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	16479	16479	0	100.00 %	
	11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	14132	14132	0	100.00 %	
	12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	16479	16479	0	100.00 %	
	13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	10749	10749	0	100.00 %	
	14 . Peralatan Anafilaktik	Paket	45	45	0	100.00 %	
	15 . Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	45	45	0	100.00 %	
	16 . Tenaga medis : Dokter	Orang	405	405	0	100.00 %	
	17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1319	1319	0	100.00 %	
	18 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2182	2182	0	100.00 %	
	19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	136	136	0	100.00 %	
	20 . Guru PAUD	Orang	0	0	0	100.00 %	
	21 . Kader Kesehatan	Orang	10231	10231	0	100.00 %	
5 .	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR						100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	213196	213196	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatanku	Buku	205000	205000	0	100.00 %	



NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	(Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)						
	2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Buku	205000	205000	0	100.00 %	
	3 . Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	205000	205000	0	100.00 %	
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	45	45	0	100.00 %	
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	45	45	0	100.00 %	
	6 . Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)	Tablet	505000	505000	0	100.00 %	
	7 . Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat	45	45	0	100.00 %	
	8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip	205000	205000	0	100.00 %	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	9 . Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	45	45	0	100.00 %	
	10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	28800	28800	0	100.00 %	
	11 . Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	512	512	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1319	1319	0	100.00 %	
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2182	2182	0	100.00 %	
	14 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	136	136	0	100.00 %	
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	313	313	0	100.00 %	
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	45	45	0	100.00 %	
	17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	0	0	0	100.00 %	
	18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer counselor	Orang	10231	10231	0	100.00 %	
6 .	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF						100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1119519	1119519	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	45	45	0	100.00 %	
	2 . Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	45	45	0	100.00 %	



NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	3 . Alat : Tensimeter	Unit	45	45	0	100.00 %	
	4 . Alat : Glukometer	Unit	45	45	0	100.00 %	
	5 . Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	45	45	0	100.00 %	
	6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	45	45	0	100.00 %	
	7 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	45	45	0	100.00 %	
	8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	45	45	0	100.00 %	
	9 . Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	45	45	0	100.00 %	
	10 . Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen	45	45	0	100.00 %	
	11 . Alat Pelayanan KB	Unit	135	135	0	100.00 %	
	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	45	45	0	100.00 %	
	13 . Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	8093	8093	0	100.00 %	
	14 . Tenaga medis : Dokter	Orang	405	405	0	100.00 %	
	15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1319	1319	0	100.00 %	
	16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2182	2182	0	100.00 %	
	17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	136	136	0	100.00 %	
	18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	45	45	0	100.00 %	
	19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	10231	10231	0	100.00 %	
7.	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT						100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	243821	243821	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
			hi				
	1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	45	45	0	100.00 %	
	2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	45	45	0	100.00 %	
	3 . Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	45	45	0	100.00 %	
	4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	45	45	0	100.00 %	
	5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	45	45	0	100.00 %	
	6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	93124	93124	0	100.00 %	
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	45	45	0	100.00 %	
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	405	405	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1319	1319	0	100.00 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2182	2182	0	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	136	136	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	45	45	0	100.00 %	
	13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	945	945	0	100.00 %	
8 .	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI						100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	106061	106061	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	100.00 %	



NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
			Dilayani / Dipenuhi	i / Terpenuhi	i / Terpenuhi		
	1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	45	45	0	100.00 %	
	2 . Obat Hipertensi	Paket	525457	525457	0	100.00 %	
	3 . Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	45	45	0	100.00 %	
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	45	45	0	100.00 %	
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	45	45	0	100.00 %	
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	405	405	0	100.00 %	
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1319	1319	0	100.00 %	
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2182	2182	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	136	136	0	100.00 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	28	28	0	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	313	313	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	45	45	0	100.00 %	
9 .	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS						100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	26678	26678	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	100.00 %	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
			Dilayani / Dipenuhi	i / Terpenuhi	i / Terpenuhi		
	1 . Obat Diabetes Melitus	Paket	24094	24094	0	100.00 %	
	2 . Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit	45	45	0	100.00 %	
	3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	45	45	0	100.00 %	
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	45	45	0	100.00 %	
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Paket	45	45	0	100.00 %	
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	405	405	0	100.00 %	
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1319	1319	0	100.00 %	
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2182	2182	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	313	313	0	100.00 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	45	45	0	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	136	136	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	134	134	0	100.00 %	
10 .	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT						100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
			Yang Harus Dilayani				



NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
			i				
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2873	2873	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	45	45	0	100.00 %	
	bentuk fisik atau elektronik)						
	2 . Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Jenis	45	45	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	45	45	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	45	45	0	100.00 %	
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	45	45	0	100.00 %	
	6 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	405	405	0	100.00 %	
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	45	45	0	100.00 %	
	8 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	1	1	0	100.00 %	
	9 . Tenaga profesional lainnya	Orang	1	1	0	100.00 %	
11 .	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS						100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	(80%)		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	21234	21234	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	45	45	0	100.00 %	
	2 . Reagen Zn TB	Kit	45	45	0	100.00 %	
	3 . Masker bedah dan Masker N95	Paket	1	1	0	100.00 %	
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	45	45	0	100.00 %	
	5 . Katrid tes cepat molekuler	Test	6300	6300	0	100.00 %	
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	45	45	0	100.00 %	
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	45	45	0	100.00 %	
	8 . Tuberkulin	Vial	1	1	0	100.00 %	
	9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	428	428	0	100.00 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2182	2182	0	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	313	313	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	45	45	0	100.00 %	
	13 . Tenaga kesehatan : Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	171	171	0	100.00 %	
	14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	7	7	0	100.00 %	
	15 . Kader Kesehatan	Orang	10231	10231	0	100.00 %	



NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
12.	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIUS)					100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	25276	25276	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	45	45	0	100.00 %	
	2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	1289	1289	0	100.00 %	
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	45	45	0	100.00 %	
	4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	45	45	0	100.00 %	
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	449	449	0	100.00 %	
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1319	1319	0	100.00 %	
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2182	2182	0	100.00 %	
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	171	171	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	45	45	0	100.00 %	
	10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	0	0	0	100.00 %	

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi Tahun 2024 sebesar Rp. 337.667.905.613 tercantum dalam program-program yaitu :

Tabel 4.10

Alokasi Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024

NO	PROGRAM	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	173.321.362.471	159.726.095.188,07
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.077.845.000	2.754.230.650
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	110.000.000	95.497.200
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan	3.323.615.260	3.129.193.980
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	157.835.082.882	152.557.115.993,22
TOTAL		337.667.905.613	318.262.133.011,29

4.2.5 Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan kesehatan, dukungan personil yang dilibatkan dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) baik tenaga kesehatan maupun non kesehatan yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan jenis pelayanan.

Tabel 4.11

Dukungan Personil untuk Pencapaian SPM Dinas Kesehatan Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	DUKUNGAN PERSONEL
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dokter/Dokter Spesialis : 430 orang Bidan : 1.319 orang Perawat : 2.182 orang Tenaga Gizi : 136 Guru PAUD : 312 orang Kader Kesehatan : 11.537 orang
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dokter/Dokter Gigi : 512 orang Bidan : 1.319 orang Perawat : 2.182 orang Ahli Gizi : 136 orang Tenaga Kesmas : 45 orang Guru : 9.655 orang Kader Kesehatan : 2.620 orang
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dokter : 405 orang Bidan : 1.319 orang Perawat : 2.182 orang Ahli Gizi : 136 orang Tenaga Kesmas : 45 orang Tenaga Non Kesehatan terlatih : 45 orang

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	DUKUNGAN PERSONEL
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dokter : 405 orang Bidan : 1.319 orang Perawat : 2.182 orang Ahli Gizi : 136 orang Tenaga Kesmas : 45 orang Tenaga Non Kesehatan terlatih : 45 orang
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dokter : 405 orang Bidan : 1.319 orang Perawat : 2.182 orang Tenaga Kesmas : 45 orang
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Dokter : 405 orang Bidan : 1.319 orang Perawat : 2.182 orang Ahli Gizi : 136 orang Tenaga Kesmas : 45 orang
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Dokter : 405 orang perawat terlatih jiwa : 45 orang tenaga kesehatan lainnya : 24 orang
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru : 428 orang Perawat : 2.182 orang Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM) 171 orang Tenaga Kefarmasian : 313 orang Penata Rontgen : 7 orang Tenaga Kesmas : 49 orang Kader kesehatan : 10.231 orang
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis kulit dan kelamin: 449 orang Perawat : 2.182 orang Bidan : 1.319 orang Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM) 171 orang Tenaga Kesmas : 45 orang

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Realisasi cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil pada Tahun 2024 mencapai 100% hal tersebut sudah sesuai dengan target. Disamping itu masih terdapat beberapa kendala yaitu :

- 1) Belum optimalnya kunjungan ibu hamil di trimester pertama karena:
 - a) budaya masyarakat yang tabu memeriksakan kehamilan saat masih dibawah 4 bulan
 - b) Kehamilan yang disembunyikan (kehamilan anak, kehamilan tidak diinginkan)
 - c) Kesadaran masyarakat yang kurang.

- 2) Pemahaman bidan desa/kelurahan mengenai definisi operasional indikator dan teknis pengisian kohort belum seragam sehingga menyebabkan pencatatan dan pelaporan tidak sinkron
- 3) Belum optimalnya pengetahuan masyarakat terhadap program-program kesehatan khususnya yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak
- 4) Komunikasi antar pemberi layanan (PMB,DPM, RS, klinik, dan puskesmas) belum berjalan baik

Solusi :

- 1) Melakukan sweeping sasaran dengan bantuan kader kesehatan/dasa wisma sesuai dengan program ILP termasuk untuk sasaran yang mobilitasnya tinggi
- 2) Promosi dan pemberian informasi-informasi seputar layanan kesehatan ibu anak di banyak tempat dan sasaran
- 3) Meningkatkan KIE petugas kesehatan kepada masyarakat yang meliputi KIE yang sarasanya kepada remaja usia subur, calon pengantin wanita serta ibu hamil
- 4) Melakukan dan peningkatan pemahaman scoring kesejahteraan ibu hamil dengan benar sehingga resiko terjadinya kasus abortus bisa diminimalkan.
- 5) Meningkatkan koordinasi dengan faskes yang memberikan layanan kesehatan ibu dan anak di wilayah puskesmas untuk wajib melaporkan layanan – layanan yang diberikan di faskes tersebut terkait dengan cakupan layanan KIA.
- 6) Mengoptimalkan Pemeriksaan kehamilan dengan USG 2D dan pendampingan oleh dokter spesialis kandungan melalui Puskesmas Asuhan Specialistik
- 7) Mengoptimalkan pemantauan status Ibu Hamil melalui kohort excel yang ada di google drive.

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Realisasi cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin pada Tahun 2024 mencapai 100% hal tersebut sudah sesuai dengan target.

Hal – hal yang perlu dioptimalkan :

- 1) Mobilisasi penduduk biasanya ada saat menjelang persalinan ibu pulang ke rumah nya di luar wilayah puskesmas / kabupaten.
- 2) Persalinan di puskesmas sangat sedikit jika dibandingkan dengan faskes lain.



- 3) Kegiatan pembahasan dan pembelajaran kasus maternal untuk Puskesmas yang terdapat kematian ibu belum optimal.
- 4) alur pelaporan dari jejaring ke puskesmas wilayah kerja belum seragam

Solusi :

- 1) Mengaktifkan konsep Integrasi Layanan Primer sehingga sasaran ibu bersalin terkoneksi dengan kader dan tenaga kesehatan
- 2) membuat alur laporan jejaring
- 3) mengkampanyekan tanda bahaya kehamilan di masyarakat dan optimalisasi edukasi melalui buku KIA

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Realisasi cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir pada Tahun 2024 mencapai 100% hal tersebut sudah sesuai dengan target. Disamping itu masih terdapat beberapa kendala yaitu :

- 1) Standar pelayanan kesehatan neonatal dasar tidak selalu diterapkan
- 2) Belum optimalnya pemahaman ibu/suami, keluarga masyarakat tentang pentingnya ketepatan waktu pemeriksaan bayi baru lahir
- 3) Pelayanan kunjungan rumah pada bayi baru lahir dan ibu nifas belum optimal dilakukan
- 4) Persepsi masyarakat pelayanan bayi baru lahir hanyalah imunisasi
- 5) puskesmas hanya melayani pasien sesuai dengan kepesertaan BPJS nya

Solusi :

- 1) Pengkajian dan tindak lanjut penyebab ketidakpatuhan pada standar pelayanan kesehatan neonatal esensial.
- 2) Mengoptimalkan pendampingan oleh dokter spesialis anak melalui Puskesmas Asuhan Spesialistik
- 3) Peningkatan mekanisme integrasi dengan program yang sudah berjalan dan memastikan bahwa pelayanan kesehatan ibu dan neonatal diberikan sesuai dengan standar pelayanan dan tepat waktu.
- 4) Fasilitasi peningkatan kompetensi nakes dalam memberikan pelayanan neonatus esensial melalui metode pendampingan *inhouse training* dan/atau *on the job training*.

- 5) Memfasilitasi peningkatan pengetahuan ibu/suami, keluarga dan masyarakat/kader tentang praktik perawatan neonatal di rumah, deteksi dini neonatal sakit serta pola pencarian pertolongan mendapatkan pelayanan kesehatan.

d. Pelayanan Kesehatan Balita

Realisasi cakupan pelayanan kesehatan balita pada Tahun 2024 mencapai 100% hal tersebut sudah sesuai dengan target. Disamping itu masih terdapat beberapa kendala yaitu :

- 1) Belum optimalnya kesadaran orang tua untuk datang ke posyandu karena anak sudah masuk PAUD/TK.
- 2) SDITK belum optimal dilakukan
- 3) Belum optimalnya sarana untuk media promosi dalam penyuluhan.
- 4) Belum optimalnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kunjungan anak balita baik anak dalam keadaan sehat maupun sakit.
- 5) cakupan sasaran posyandu yang datang masih kurang
- 6) belum terjalin komunikasi dan koordinasi tentang pencatatan dan pelaporan tumbuh kembang balita dari guru PAUD dan TK

Solusi :

- 1) Dilakukan kerjasama antara PKM dengan PAUD/TK yang ada di wilayah kerja Puskesmas untuk melakukan pendataan sehingga capaian bisa lebih maksimal.
- 2) Mengoptimalkan pendampingan oleh dokter spesialis anak melalui Puskesmas Asuhan Spesialistik
- 3) Optimalisasi penggunaan buku KIA.
- 4) Mengaktifkan konsep Integrasi Layanan Primer sehingga sasaran ibu bersalin terkoneksi dengan kader dan tenaga kesehatan

e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Realisasi cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar pada Tahun 2024 mencapai 213.196 orang dari target proyeksi 214.724 orang (99.3%) hal tersebut belum memenuhi target sasaran sebesar 100%. Hal-hal yang perlu dioptimalkan :



- 1) Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada anak usia dasar dilaksanakan mulai Bulan Juli 2023 sampai dengan Bulan Juni 2024 (mengikuti tahun ajaran baru)
- 2) Saat pelaksanaan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar di sekolah terdapat beberapa siswa yang tidak masuk sekolah, dan ketika dirujuk ke puskesmas beberapa siswa tidak datang
- 3) Kurangnya dukungan sekolah dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar

Solusi

- 1) Koordinasi dengan guru sekolah terkait jadwal pelaksanaan pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar
- 2) Peningkatan kapasitas kader kesehatan di sekolah sehingga dapat membantu dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan
- 3) Memberikan feedback hasil pelayanan kesehatan sehingga sekolah dapat merujuk siswa yang belum mendapat pelayanan
- 4) Mengoptimalkan peran TP UKS, koordinasi lintas sektor terkait, sekolah, guru UKS

f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Realisasi cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif pada Tahun 2024 mencapai 100%, hal tersebut sudah memenuhi target sasaran sebesar 100%. Untuk mengoptimalkan capaian selanjutnya, maka rencana tindak lanjut yang dilaksanakan :

- 1) Meningkatkan gerakan sayang ibu dengan melakukan kegiatan skrining kanker servik (IVA Test).
- 2) Mendukung puskesmas dengan paradigma sehat, diharuskan puskesmas juga melakukan PANDU PTM (Pelayanan Terpadu PTM).
- 3) Melakukan Pemantauan wilayah setempat dengan menambah dan melatih kader2 kesehatan setingkat RT
- 4) Optimalisasi kegiatan KAMPUNG CERDIK

g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Realisasi cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut pada Tahun 2024 mencapai 100% hal tersebut sudah sesuai dengan target. Selain itu masih terdapat hal – hal yang belum optimal yaitu :

- 1) Form skrining geriatri belum digitalisasi dan alat cek kolesterol dan gula darah.
- 2) para lansia masih menggunakan paradigma sakit saat mengakses layanan kesehatan
- 3) Posyandu belum menjangkau ke seluruh sasaran lansia. Lansia yang tempat tinggalnya jauh dan lansia yang bekerja di siang hari kesulitan untuk mengakses layanan di posyandu

Solusi :

- 1) Advokasi desa untuk supporting posyandu siklus hidup dengan menambah psosyandu sesuai dengan posyandu balita serta menyediakan sarana dan prasarana posyandu
- 2) Mengaktifkan konsep Integrasi Layanan Primer sehingga sasaran ibu bersalin terkoneksi dengan kader dan tenaga kesehatan
- 3) Melakukan kunjungan ke rumah lansia risti
- 4) mempromosikan paradigma hidup sehat Germas
- 5) melakukan posyandu dengan tempat yang bergilir di tiap RT.

h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Realisasi cakupan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi pada Tahun 2024 mencapai 100% hal tersebut sudah memenuhi target sasaran sebesar 100%. Strategi yang dilakukan dalam mengoptimalkan capaian adalah :

- 1) Adanya Inovasi Gerbang Pantura (Gerakan Banyuwangi Pantau Tekanan darah)
- 2) Meningkatkan pemantauan rujukan oleh Nakes/kader
- 3) Memberi edukasi pada keluarga untuk menjadi Pendamping Minum Obat
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan
- 5) penguatan wilayah setempat dengan mengoptimalkan inovasi Kampung Cerdik



- 6) Mengembangkan dan memperluas jaringan kegiatan posbindu PTM, di instansi pemerintah dan swasta, di tempat – tempat umum, dan di sekolah.
- 7) Mendukung puskesmas dengan paradigma sehat, diharuskan puskesmas juga melakukan PANDU PTM (Pelayanan Terpadu PTM).

i. **Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)**

Realisasi cakupan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM) pada Tahun 2024 mencapai 100% hal tersebut belum memenuhi target sasaran sebesar 100%. Strategi yang dilakukan dalam mengoptimalkan capaian adalah

- 1) Meningkatkan pemantauan rujukan oleh tenaga kesehatan/kader
- 2) Memberi edukasi pada keluarga untuk menjadi Pendamping Minum Obat
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan .
- 4) Penguatan wilayah setempat dengan mengoptimalkan inovasi Kampung Cerdik
- 5) Mendukung puskesmas dengan paradigma sehat, diharuskan puskesmas juga melakukan PANDU PTM (Pelayanan Terpadu PTM).

j. **Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**

Realisasi cakupan pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) Berat pada Tahun 2024 mencapai 100% hal tersebut belum memenuhi target sasaran 100%. Upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan capaian :

- 1) Melibatkan Pemberdayaan ODGJ berbasis Masyarakat
- 2) Optimalisasi peran Tim TPKJM
- 3) Optimalisasi kader kesehatan dan pelatihan peningkatan kader kesehatan jiwa
- 4) Peningkatan sistem penjemputan ODGJ Gaduh gelisah oleh RS Radjiman Wediodiningrat Lawang
- 5) Pengembangan pendidikan keswa di sekolah Peningkatan/ pengembangan kualitas inovasi keswa diseluruh puskesmas
- 6) Optimalisasi Inovasi Buka Tali (Terbuka, Tanggap dan peduli) sebagai upaya kesehatan jiwa terintegrasi guna meningkatkan pelayanan Kesehatan jiwa, dan meningkatkan pemberdayaan keluarga dan Masyarakat terkait Kesehatan jiwa di Kabupaten Banyuwangi

k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Realisasi cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis pada Tahun 2024 melebihi target 100% sebesar 119. Meskipun telah mencapai target, masih ditemukan permasalahan dalam pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis, yaitu :

- 1) Belum semua puskesmas capaian SPM nya mencapai target 100%
- 2) Belum semua fasyankes yang menemukan terduga melakukan pemeriksaan TCM
- 3) Terdapat fasyankes yang belum menjalankan jejaring internal secara optimal dan *Under-reporting* kasus TBC.
- 4) Pelibatan multisector belum optimal.
- 5) Pasien kesulitan mengeluarkan dahak diakibatkan takut terhadap stigma apabila hasil TCM positif TBC.
- 6) Kegiatan penemuan terduga TBC masih banyak pada penemuan secara *passive*

Solusi

- 1) Memperkuat Jejaring dengan DPM klinik dan Rumah Sakit dalam menemukan terduga TBC,
- 2) Memperkuat Peran lintas sektor seperti desa, komunitas dalam menggerakkan masyarakat untuk penemuan dini terduga TBC
- 3) Penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten/kota untuk mendukung percepatan eliminasi TBC 2030.
- 4) Mendorong tenaga kesehatan untuk mengurangi stigma di masyarakat terhadap TBC.
- 5) Optimalisasi upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian infeksi.
- 6) Peningkatan skrining sehingga penemuan bisa fokus pada penemuan aktif hingga massive
- 7) Peningkatan layanan dalam bentuk skrining (skrining TB pada penderita Diabetes mellitus, skrining TB pada penderita HIV, dan skrining TB pada anak, skrining pada penderita stunting, dan skrining pada populasi tertentu)

l. Pelayanan Kesehatan dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)

Realisasi cakupan pelayanan kesehatan dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) pada Tahun 2024 telah mencapai target 101%. Meskipun telah mencapai target, masih ditemukan permasalahan dalam penanganan HIV diantaranya :

- 1) Kolaborasi lintas program dengan KIA dan TBC kurang maksimal dalam pencatatan.
- 2) Kurang optimal peran lintas sektor dalam penjangkauan populasi kunci Lelaki Seks Lelaki dan Pekerja Seks Perempuan.
- 3) Layanan Waga Binaan Masyarakat, kurang optimal dalam kegiatan pemeriksaan dikarenakan kekurangan SDM,
- 4) Kurangnya alokasi untuk pengadaan RDT HIV
- 5) Belum Optimalnya validasi data tiap bulan antara lintas Program terkait,
- 6) Penjangkauan Populasi kunci WPS terkendala dengan kebijakan Tutupnya Lokalisasi,
- 7) Sulitnya Komunitas LSL akses Layanan Kesehatan,
- 8) Kegiatan penemuan kasus pada populasi kunci belum berjalan Optimal terkhusus pada populasi Pekerja Seks Perempuan (PSP)
- 9) Penjangkauan PSP relatif agak susah dibandingkan dengan populasi kunci lainnya, dikarenakan *hotspot* untuk PSP saat ini agak sulit di jangkau karena lokalisasi di Banyuwangi telah ditutup, serta saat ini tren PSP yang awalnya Aktifitasnya bersifat langsung namun saat ini bersifat tidak langsung bahkan tertutup aktifitasnya.
- 10) Masih banyak pasien TBC dan pasien IMS masih belum melakukan pemeriksaan HIV karena masih belum optimalnya kolaborasi dan sinergi lintas program, serta populasi khusus Warga Binaan Pemeriksaan (WBP) tes HIV masih relatif di angka 32% dikarenakan LAPAS kelas IIa Banyuwangi masih melakukan pemeriksaan bagi WBP yang akan mau masuk dan yang akan mau keluar dari LAPAS.
- 11) Belum Semua layanan FKTP swasta dan FKTL Swasta melaporkan IBU hamil dan pasien TBC tes HIV ke sistem Pelaporan SIHA.

- 12) Penjangkauan pada Populasi PSP masih pada daerah Hotspot yang tersedia sedangkan PSP Tidak Langsung masih belum Terjangkau oleh Tim Penjangkau lapangan.
- 13) Penjangkauan pada LSL masih tergantung pada Petugas Penjangkau yang jumlah SDM yang hanya pada wilayah tertentu belum secara menyeluruh penjangkaunnya di wilayah Banyuwangi.
- 14) Belum semua WBP di lapas Banyuwangi dilakukan pemeriksaan periodik oleh petugas lapas dan Puskesmas Pemangku Wilayah.

Solusi

- 1) Memperkuat Jejaring dengan lintas sektor terkait dengan penanggulangan HIV terutama pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam kegiatan penjangkauan kelompok kunci PSP serta Penguatan jejaring dengan tim Penjangkau
- 2) Memperkuat jejaring dengan penjangkau PSP dengan kelompok penggiat HIV seperti Laskar dan KKBS untuk mengoptimalkan penjangkau PSP yang Beraktifitas secara langsung maupun beraktifitas secara tidak langsung.
- 3) Berkolaborasi dan sinergi dengan lintas program khususnya Program TBC, IMS dan KIA dengan melakukan validasi data laporan setiap bulannya.
- 4) Penguatan Koordinasi lintas program dan lintas sektor, dan penguatan Kapasitas SDM di layanan
- 5) Pemenuhan anggaran pengadaan RDT HIV melalui APBD
- 6) Mengoptimalkan jejaring Klinik dan DPM terkait puskesmas,

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal menyebutkan bahwa jenis pelayanan dasar dalam bidang pekerjaan umum adalah :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik



Pelaksanaan di Kabupaten Banyuwangi 2 (dua) jenis pelayanan dasar tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman. Oleh karena itu, uraian berikutnya pada sub bab Bidang Pekerjaan Umum bersumber dari 2 (dua) perangkat daerah tersebut.

4.3.2 Target Pencapaian

Tabel 4.12

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	KET.
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

4.3.3 Realisasi

Tabel 4.13

Hasil Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					100%	
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	555244	556509	-1265	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100 %	
JARINGAN PERPIPAAN							
	1 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	137726	139565	-1839	100%	
	2 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	137726	139565	-1839	100.00 %	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCA PAIAN	AKSI
BUKAN JARINGAN PERPIPAAN							
	3 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	410	413	-3	100.00 %	
	4 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	410	413	-3	100.00 %	
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	376	376	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	64	64	0	100.00 %	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	2 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	15	15	0	100.00 %	
	3 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	15	15	0	100.00 %	

4.3.4 Alokasi Anggaran

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2024 mendapat alokasi anggaran dari dana APBD sebesar Rp. 255.604.519.211. Berikut adalah rincian penggunaan alokasi anggaran serta realisasi.

Tabel 4.14
Alokasi Anggaran Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi
(Bidang Pekerjaan Umum) Tahun 2024

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)	
		K	Rp	K	Rp
1	2	3		4	
		K	Rp	K	Rp
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	94,50	30.456.449.553	94	20.664.068.019
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	143.000.000	100	138.924.400
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65	118.000.000	65	113.929.400
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	25.000.000	5	24.995.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	18.868.607.064	100	9.690.016.925
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	85	18.818.607.314	85	9.640.982.625
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	49.999.750	4	49.034.300
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	499.985.000	100	498.899.500
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	500	499.985.000	500	498.899.500
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	2.607.907.800	99	2.298.492.066
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11	99.999.800	11	99.828.500
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25	749.934.900	25	749.312.650
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26	99.999.750	26	99.848.350
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10	464.999.700	9	415.917.100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3	442.978.650	3	372.291.600	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11	749.995.000	11	561.293.866
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	7.786.960.189	100	7.508.587.328
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	9.000.000	12	2.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	369.760.189	12	324.137.328
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	7.408.200.000	12	7.182.450.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	549.989.500	98	529.147.800
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	149.989.500	12	130.179.800
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	400.000.000	1	398.968.000
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	68,00	203.610.198.658	-	162.088.928.088
		89,00			
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	76.645.221.508	-	62.268.742.688
	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	1	200.000.000	1	199.537.300
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	150	1.329.120.000	150	1.148.647.200
	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	1	74.637.600	1	74.584.000
	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	16	21.251.500.000	71	18.007.560.210
	Normalisasi/Restorasi Sungai	22	3.799.963.908	22	2.796.491.000
	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	0	200.000.000	0,25	199.561.400
	Pembangunan Tanggul Sungai	22	42.590.000.000	102,60	35.627.412.300
	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	0	4.000.000.000	0	1.551.663.078

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)	
	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	17	1.550.000.000	11	1.448.271.700
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	80	330.000.000	80	297.804.900
	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	2	400.000.000	2	201.234.000
	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir		-		-
	Rehabilitasi Tanggul Sungai	0,85	920.000.000	1	715.975.600
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	126.964.977.150	18	99.820.185.400
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	35	70.280.000.000	83	54.349.505.400
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	2	12.070.000.000	18	10.507.732.300
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	49	37.465.000.000	76	27.822.190.000
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	290	7.149.977.150	290	7.140.757.700
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	96,00	21.537.871.000	-	17.570.894.780
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	100	21.537.871.000	-	17.570.894.780
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	14	6.593.815.000	17	5.335.370.540
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	40	66.880.000	50	35.365.000
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	60	2.925.000.000	47	2.737.764.700

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)	
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	80	11.952.176.000	122	9.462.394.540
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program			255.604.519.211	94	200.323.890.887

Adapun Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman Alokasi anggaran di tahun anggaran 2024 alokasi anggaran sebesar Rp. 438.031.768.978 untuk Rekapitulasi pagu anggaran dan Realisasi yang tersedia pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15
Alokasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	438.031.768.978	296.262.328.981
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	44.090.042.052	40.170.892.760
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	110.920.000	106.341.350
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	904.480.000	870.095.800
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	713.990.000	638.628.550
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	135.000.000	121.246.800
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	110.650.000	109.168.750
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000	99.960.425
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	430.633.750	139.254.300,
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000	49.931.500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	650.000.000	592.379.700
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.000.000	88.613.050
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	496.010.000	379.149.423
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	22.177.765.677	21.679.539.706
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.537.000.000	3.373.750.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.021.200.000	979.332.180
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	198.501.000
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	22.846.618.350	6.219.126.443
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	22.846.618.350	6.219.126.443
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	11.502.774.470	8.828.864.128
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.502.774.470	8.828.864.128
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	321.135.567.302	204.240.977.665
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	321.135.567.302	204.240.977.665
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	330.000.000	303.619.440
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	238.136.450	235.034.000
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	88.157.650	68.585.440
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	3.705.900	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.517.679.959	924.751.935
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	802.679.959	590.799.644
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	372.500.000	231.385.093
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	342.500.000	190.632.110
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	11.161.589.445	5.819.737.700
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	11.161.589.445	5.819.737.700
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.874.496.500	3.771.107.594

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.874.496.500	3.771.107.594
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.406.000.000	770.314.880
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	450.000.000	181.335.503
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000	73.509.854
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	210.000.000	157.692.450
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	206.000.000	105.779.900
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	440.000.000	251.997.173
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	7.304.000.000	2.529.109.911
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	94.000.000	70.101.561
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	7.160.000.000	2.459.008.350
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	50.000.000	0
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	11.863.000.000	1.947.830.424
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	11.863.000.000	1.947.830.424

4.3.5 Dukungan Personil

Guna menjalankan semua kegiatan dan program untuk mensukseskan pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Tahun 2024 di bidang pekerjaan umum khususnya program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah Kabupaten Banyuwangi, maka Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi melibatkan seluruh staf dinas khususnya Bidang Kesekretariatan Bagian Penyusunan Program, Bidang Pembangunan dan Pengembangan serta Bidang Bina Manfaat dan Kemitraan. Dengan sinergi dan kerja sama yang bagus maka pencapaian SPM Dinas PU Pengairan Tahun 2023 dapat diperoleh hasil yang maksimal. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan telah berkoordinasi dengan PUDAM Kabupaten Banyuwangi untuk data Jaringan

Perpipaan di Kawasan Perkotaan. Sehingga, untuk kedepannya akan lebih memudahkan dalam sinkronisasi data dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Tabel 4.16
Dukungan Personil untuk Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum
DPU Pengairan Tahun 2024

NO	GOLONGAN	JUMLAH ORANG
1	PNS	72
2	THL	241
	JUMLAH	113

Adapun untuk rincian pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Banyuwangi sejumlah 265 Pegawai sebagai Dukungan Personil SPM Tahun 2024 adalah sebagai berikut Total Daftar Pegawai PNS dan THL pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 sejumlah 242 pegawai :

Tabel. 4.17
Dukungan Personil untuk Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum
DPUCKPP Kab. Banyuwangi Tahun 2024

GOL/ RUANGAN	ESELON					STAFF	THL	TOTAL
	I	II	III	IV	V			
Golongan IV/b Golongan IV/a			- 1	1		88	154	242
Golongan III/d Golongan III/c				-				

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dalam kategori indeks pencapaian SPM terkait Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari di Dinas Pengairan Umum Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Permasalahan : Pendataan mengenai pengguna Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan masih dalam proses.

Solusi : Proses survey untuk pendataan para pengguna SPAM bukan jaringan perpipaan.

b. Penghitungan Kebutuhan

Permasalahan : Penghitungan kebutuhan untuk pemakai air minum masih terus dilakukan.

Solusi : Melakukan sinkronisasi data dengan PUDAM secara berkala setiap tahun.

c. Perencanaan dan Penganggaran

Permasalahan : Jumlah jaringan perpipaan yang terbangun tidak sesuai dengan yang telah di targetkan dikarenakan keterbatasan anggaran.

Solusi : Melakukan pembangunan jaringan perpipaan yang diprioritaskan kepada masyarakat dengan kemiskinan ekstrim.

d. Pelaksanaan

Permasalahan : Jalur pembangunan pipa air bersih dan sumur bor sering kali melewati tanah hak milik warga, sedangkan warga tersebut bukan merupakan sasaran pembangunan sehingga warga menolak jika tanahnya dilewati jaringan perpipaan atau sumur bor.

Solusi : Melaksanakan sosialisasi dan hibah tanah ketika menggunakan tanah hak milik. Jika warga tetap menolak, maka solusinya adalah mengubah jalur perpipaan yang berakibat semakin jauh.

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian. Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Pelaksanaan di Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman.

Jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar dalam bidang Perumahan Rakyat adalah :

- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/kota

4.4.2 Target Pencapaian

Tabel 4.18

**Target dan Indikator Pencapaian SPM
Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2024**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Ket.
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

4.4.3 Realisasi

Tabel 4.19

Hasil Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman

INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					100.00 %	
Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %	
Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)						<u>3510</u>
Download SK Yang Telah Di Upload 3510-20250113114814SK TD Srono.pdf						
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	88	88	0		
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi		
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
1 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	16	16	0	100.00 %	
2 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	4	4	0	100.00 %	
3 . Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	100.00 %	
4 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	100.00 %	
Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					100.00 %	
Ada Relokasi Program Pemerintah						<u>3510</u>
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%		
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		

INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4	0	4	100.00%	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi		
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	

4.4.4 Alokasi Anggaran

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman Alokasi anggaran di tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 438.031.768.978,- untuk Rekapitulasi pagu anggaran dan Realisasi yang tersedia pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.20

Alokasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	438.031.768.978	296.262.328.981
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	44.090.042.052	40.170.892.760
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	110.920.000	106.341.350
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	904.480.000	870.095.800
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	713.990.000	638.628.550
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	135.000.000	121.246.800
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	110.650.000	109.168.750
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000	99.960.425
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	430.633.750	139.254.300,
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000	49.931.500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	650.000.000	592.379.700

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000	88.613.050
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	496.010.000	379.149.423
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	22.177.765.677	21.679.539.706
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.537.000.000	3.373.750.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.021.200.000	979.332.180
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	198.501.000
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	22.846.618.350	6.219.126.443
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	22.846.618.350	6.219.126.443
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	11.502.774.470	8.828.864.128
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.502.774.470	8.828.864.128
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	321.135.567.302	204.240.977.665
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	321.135.567.302	204.240.977.665
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	330.000.000	303.619.440
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	238.136.450	235.034.000
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	88.157.650	68.585.440
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	3.705.900	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.517.679.959	924.751.935
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	802.679.959	590.799.644
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	372.500.000	231.385.093
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	342.500.000	190.632.110
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	11.161.589.445	5.819.737.700



PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	11.161.589.445	5.819.737.700
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.874.496.500	3.771.107.594
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.874.496.500	3.771.107.594
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.406.000.000	770.314.880
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	450.000.000	181.335.503
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000	73.509.854
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	210.000.000	157.692.450
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	206.000.000	105.779.900
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	440.000.000	251.997.173
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	7.304.000.000	2.529.109.911
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	94.000.000	70.101.561
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	7.160.000.000	2.459.008.350
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	50.000.000	0
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	11.863.000.000	1.947.830.424
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	11.863.000.000	1.947.830.424

4.4.5 Dukungan Personil

Total Daftar Pegawai PNS dan THL pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 sejumlah 265 pegawai :

Tabel 4.21
Dukungan Personil untuk Pencapaian SPM DPUCKPP Kab. Banyuwangi

GOL/ RUANGAN	ESELON					STAFF	THL	TOTAL
	I	II	III	IV	V			
Golongan IV/b			-			88	154	242
Golongan IV/a			1	1				
Golongan III/d								
Golongan III/c				-				

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah - langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Permasalahan dalam urusan bidang pekerjaan umum di OPD kami ada beberapa indikator kinerja/ jenis layanan SPM untuk penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik antara lain;

a. Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan dan penganggaran disesuaikan dengan pagu anggaran di tahun berjalan yang ada pada OPD, khususnya pada bidang perumahan dan permukiman. Anggaran untuk pembangunan rumah bagi masyarakat yang terdampak relokasi program kabupaten/kota tidak terealisasi dikarenakan di Kabupaten Banyuwangi tidak ada relokasi program kab/kota.

b. Pelaksanaan

Terkait permasalahan dalam pelaksanaannya dengan dasar Perbup Nomor 31 tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Kab. Banyuwangi. Maka ada tahapan- tahapan yang harus disesuaikan untuk pelaksanaannya, contoh salah satunya untuk bencana yang terjadi pada tahun 2023 saat ini akan bisa diproses atau baru bisa ditindak lanjuti pada waktu awal tahun penganggaran atau perubahan anggaran kegiatan tahun 2024/ PAK. Sehingga masyarakat yang terkena bencana tersebut biasanya sudah terbantu dari desa/ CSR.

Solusi

- a. Perlu adanya kolaborasi bersama dengan dinas – dinas lain agar bersinergi, terutama dalam memperoleh data untuk kelancaran penerapan SPM sehingga di tahun yang selanjutnya dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan tepat sasaran.
- b. Di pencapaian SPM kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota jumlah total yang terlayani sebesar 0 orang dikarenakan tidak ada masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah/kota tetapi untuk mengukur tahapan perencanaan bidang terkait hanya melakukan pendataan Lokasi yang berpotensi menimbulkan relokasi program pemerintah daerah, seperti permukiman kumuh/ illegal, daerah sepadan Sungai (DSS), daerah SUTET, kolong jembatan, sepadan Rel KA, dan daerah rawan bencana.

4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal menyebutkan bahwa jenis pelayanan dasar dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah :

- a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pelayanan Informasi rawan bencana;
- c. Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Pelaksanaan di Kabupaten Banyuwangi 1 (satu) jenis pelayanan dasar tersebut dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), 3 (tiga) jenis dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan 1 (satu) jenis oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Oleh karena itu, uraian berikutnya pada sub bab bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat bersumber dari 3 (tiga) perangkat daerah tersebut.

4.5.2 Target Pencapaian

Tabel 4.22

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	KET.
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di provinsi dan kabupaten/kota
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan)	Setiap tahun	

						an terhadap bencana yang akan dipenuhi)		
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

4.5.3 Realisasi

Tabel 4.23

Hasil Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas

NO	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/ OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					100.00 %	
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	248	248	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		

NO	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/ OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	Unit	27	27	0	100.00 %	
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusakan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	12	12	0	100.00 %	
Data Dukung : 3510-20240718093459SOP Trantibum.pdf Status : Approved							
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	Orang	50	50	0	100.00 %	



NO	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/ OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	(Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)						
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	1	1	0	100.00 %	
Data Dukung : 3510-20240923075127Layanan Dampak Ganti Rugi Akibat Penegakan Perda dan Perkada.pdf Status : Approved							
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	Orang	1	1	0	100.00 %	
	(kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)						
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	Orang	1	1	0	100.00 %	
	(pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau						

NO	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/ OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	berat)						
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					100.00 %	
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	136649	136649	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen	1	1	0	100.00 %	
	Data Dukung : 3510-20240925094304KRB upload SPM triwulan 2 th 2024.pdf Status : Approved						
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`	Orang	38002	38002	0	100.00 %	
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	Orang	103765	103765	0	100.00 %	



NO	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/ OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	(tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)						
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	313	313	0	100.00 %	
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	141	141	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana	Unit	303	303	0	100.00 %	
	(seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)						
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	Orang	25	25	0	100.00 %	
	(terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)						

NO	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/ OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %	
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)						
Download SK Yang Telah Di Upload 3510-20250114025015SK Status Darurat Bencana Tahun 2024_all 5.pdf							
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	141	141	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Posko	1	1	0	100.00 %	
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Orang	141	141	0	100.00 %	
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	1	1	0	100.00 %	



NO	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/ OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Layanan	0	0	0	100.00 %	
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	1	1	0	100.00 %	
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						100.00 %	
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	175	175	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok	Layanan	244	635	-391	100.00 %	

NO	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/ OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	relawan pemadam kebakaran/redkar)						
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	3	3	0	100.00 %	
Data Dukung : 3510-20250117085029GABUNGAN SOP KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN_compressed.pdf Status : Approved							
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	Unit	362	683	-321	100.00 %	
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	11	11	0	100.00 %	
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Layanan	2	2	0	100.00 %	
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	81	175	-94	100.00 %	

4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi yaitu sebesar Rp. 16.628.204.298 dengan rincian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.24

Alokasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI	
			RP	%
1	2	3	4	5
	BELANJA DAERAH (PAGU ANGGARAN)	16.628.204.298	13.204.605.935	79
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	14.297.109.198	10.964.021.633	77
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	133.579.300	130.953.800	98
1	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.987.500	43.747.800	97
2	Sub. Kegiatan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	88.591.800	87.206.000	98
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.262.930.781	4.049.516.432	56
3	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.220.336.531	4.007.100.432	55
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	42.594.250	42.416.000	99
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	180.714.800	179.219.000	99
5	Sub. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	180.714.800	179.219.000	99
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.172.800.650	1.165.329.942	99
6	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.979.900	6.238.000	99,99
7	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.989.100	6.649.500	95
8	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	761.759.000	756.627.142	99
9	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.068.100	18.838.000	93
10	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kabtor	369.966.000	369.905.100	99

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI	
			RP	%
1	2	3	4	5
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	5.247.457.667	5.141.626.659	98
11	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.145.000.000	5.040.310.864	98
12	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	100
13	Sub. Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.457.667	99.315.759	98
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	299.626.000	297.375.800	99
14	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	299.626.000	297.375.800	99
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.334.212.029	2.228.384.302	95.46
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.307.126.629	1.291.447.600	95,92
15	Sub. Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	1.064.705.500	1.058.880.100	88,77
16	Sub. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten Kota	49.999.950	42.587.500	99
17	Sub. Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	189.990.000	189.980.000	98,99
18	Sub. Kegiatan Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.431.179	0	0
	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.413.189.500	1.303.257.150	92.22
19	Sub kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	20.000.000	19.980.000	99.9
20	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	369.948.500	338.605.702	91.52



NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI	
			RP	%
1	2	3	4	5
21	Sub. Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	637.136.900	578.351.000	90,77

Alokasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada kegiatan pelayanan dasar SPM Sub-urusan bencana tahun 2024 adalah sebesar Rp. 8.407.768.546,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.25
Alokasi Anggaran Badan Badan Bencana Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
BPBD	8.407.768.546	7.924.986.236	91,95
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.736.741.650	2.646.404.061	96,70
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	973.420.000	968.566.307	99,50
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	76.204.000	74.905.754	98,30
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	897.216.000	893.660.553	99,60
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	645.788.450	619.111.400	95,87
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	263.284.550	257.126.500	97,66
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	94.688.100	88.900.000	93,89
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	65.056.450	56.695.000	87,15
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	39.299.950	38.154.500	97,09
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	183.459.400	178.235.400	97,15
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	417.594.750	383.651.500	91,87
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	3.621.000	0	-
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	4.268.350	2.340.400	54,83
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	123.749.900	111.279.000	89,92
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	285.955.500	270.032.100	94,43
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	699.938.450	675.074.854	96,45

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	189.693.300	183.358.000	96,66
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	58.129.000	46.460.100	79,93
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	342.880.000	337.658.000	98,48
Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	109.236.150	107.598.754	98,50
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	5.671.026.896	5.278.582.175	93,08
Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.999.900	19.764.000	98,82
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.999.900	19.764.000	98,82
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.432.249.535	3.150.144.843	91,78
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.412.249.635	3.130.240.943	91,74
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	19.999.900	19.903.900	99,52
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.122.543.995	1.058.368.778	94,28
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	19.184.000	95,92
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	289.487.095	285.325.100	98,56
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000	58.145.000	96,91
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	290.861.700	279.310.450	96,03
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.200.000	41.631.400	82,93
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.995.200	11.825.200	98,58
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000	362.947.628	90,74
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000	96.050.000	96,05
Pengadaan Mebel	100.000.000	96.050.000	96,05
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	460.804.466	440.752.905	95,65
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	7.000.000	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	121.804.466	101.752.905	83,54
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	332.000.000	332.000.000	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	535.429.000	513.501.649	95,90
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	183.163.300	91,58
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.429.000	23.580.000	92,73
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.000.000	297.359.549	99,12



URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	9.398.800	93,99

Sedangkan Alokasi dana dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi murni bersumber dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 4.26

Alokasi Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		7.013.148.825	6.188.262.217	88,24
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	6.006.189.113	5.194.924.317	86,49
	- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.029.700	28.013.650	90,28
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.926.584.005	3.176.940.516	80,91
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83.140.500	80.840.000	97,23
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	834.523.900	799.142.301	95,76
	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	346.576.900	342.568.050	98,84
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	446.579.108	430.940.205	96,50
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	337.755.000	336.479.595	99,62
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.0006.959.712	786.127.500	98,65
	- Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kab/Kota	793.102.450	786.127.500	99,12
	- Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	20.000.000	19.884.800	99,42
	- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pecegahan Kebakaran	193.857.262	187.325.600	96,63

4.5.5 Dukungan Personil

Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Aparatur Sipil Negara (ASN) : 31 Orang
- Non ASN : 239 Orang

Tabel 4.27

Dukungan Personil Untuk Pencapaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PERSONIL SATPOL PP			JUMLAH PERSONIL PPNS DAN SATLINMAS	
		PNS		NON PNS	PPNS	SATLINMAS
		BELUM DIKLAT	SUDAH DIKLAT			
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum	21	11	239	3	6600

Untuk dukungan Personil pencapaian SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Banyuwangi tahun 2024 Sub-urusan bencana dapat dijelaskan melalui tabel berikut :

Tabel 4.28

Dukungan Personil Untuk Pencapaian SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Banyuwangi Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah (Orang)
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	20 PNS 16 Non PNS
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	

Sedangkan Jumlah Personil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2024 berjumlah 43 anggota yang terdiri dari 26 orang PNS dan 15 THL.

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

a. Sub Urusan Trantibum

Kendala:

- 1) Pengumpulan Data
Belum optimalnya fungsi koordinasi dan sinergi antar instansi terkait
- 2) Penghitungan Kebutuhan
 - a) terbatasnya sarana dan prasarana
 - b) jumlah personel dalam melakukan pelayanan dinilai masih kurang memadai



- 3) Perencanaan dan Penganggaran
 - a) adanya keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua program/kegiatan/sub kegiatan penerapan SPM dapat diakomodir
 - b) belum semua indikator SPM dapat dengan mudah diintegrasikan dengan Renstra SKPD, RKPD dan Renja Perangkat Daerah

Permasalahan

- 1) Masih belum mencukupinya sarana dan prasarana Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi;
- 2) Minimnya Pendidikan dan Pelatihan Pengetahuan Tentang Peraturan-Peraturan;
- 3) Masih banyaknya penyimpangan pelanggaran peraturan daerah; dan
- 4) Masih banyaknya gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Solusi Permasalahan

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi;
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Tentang Perda bagi anggota Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi;
- 3) Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait yang menyangkut Penegakan Peraturan Daerah; dan
- 4) Melakukan pemantauan gangguan Trantibum dengan dinas terkait di jalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruang umum

b. Sub Urusan Bencana

Sedangkan Untuk Permasalahan dan Solusi SPM Sub-urusan Bencana adalah sebagai berikut :

- 1) Pengumpulan Data

Untuk dapat memenuhi isian data warga di kawasan rawan bencana dengan format by name by address, dilengkapi dengan NIK dan KK, kondisi ekonomi, dan kebutuhan khusus tidak cukup hanya dengan pengambilan data sekunder, diperlukan upaya untuk turun ke lapangan (survei). Sementara jumlah anggaran dan SDM di BPBD terbatas.

Pengumpulan data pada saat penanganan bencana, terutama untuk bencana-bencana dengan jumlah korbannya di atas 20 orang, pendataan

korban tidak mudah dilakukan oleh petugas. Di sisi lain petugas dari BPBD harus fokus pada penanggulangan dampak bencana. Harus mendapat dukungan SDM yang berasal dari pemangku wilayah setempat seperti RT, RW, maupun lurah/kades untuk dapat mengumpulkan data-data korban. Belum lagi kalau para pemangku wilayah juga terdampak bencana (menjadi korban). Sehingga dibutuhkan dukungan SDM dengan jumlah dan kompetensi yang baik.

2) *Penghitungan Kebutuhan*

Pengisian data sebagaimana format pelaporan SPM dinilai sangat rumit. Sehingga diperlukan bimbingan khusus/bimtek/desk agar terjadi kesepahaman bersama. Ada beberapa hal (kondisi-kondisi khusus di lapangan) yang perlu didiskusikan dengan tim perumus format pelaporan. Karena tidak semua persoalan dapat dihitung secara matematis dengan format yang seragam.

3) *Perencanaan dan Penganggaran*

Adanya batasan kewenangan antar instansi pemerintah, mengharuskan Perangkat Daerah untuk melaksanakan proses administrasi yang panjang sehingga pelaksanaan kegiatan memakan waktu lama. Diperlukannya komitmen dan dukungan pimpinan daerah untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah terkait.

Beberapa sarana dan peralatan kebencanaan kondisinya kurang baik, misal usia pakai di atas 10 tahun, sehingga biaya service tinggi. Selain itu peralatan yang tersedia juga perlu ditingkatkan/dilengkapi agar penanganan lebih maksimal. Sehingga diperlukan alokasi anggaran yang memadai untuk pengadaan dan peremajaan sarana dan peralatan kebencanaan.

4) *Lain-lain*

Dibutuhkan dukungan anggaran dan SDM khusus untuk menangani pelaporan SPM sebagaimana format, sementara kondisi di daerah anggaran dan SDM nya terbatas. Pelaporan yang bersifat administratif terasa sangat membebani dan tidak sebanding dengan porsi/alokasi anggaran yang diperoleh pada sub urusan bencana. Petugas yang menangani pelaporan SPM adalah bagian perencanaan, yang memiliki berbagai tugas pokok

lainnya. Proses input data warga negara di kawasan KRB yang mencapai 136 ribu orang, sangat memakan waktu. Data excel yang dihasilkan ukurannya di atas 10 Mb sehingga proses upload form pada alamat <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> sangat lama.

c. **Sub Urusan Damkar**

Sedangkan Permasalahan Sub-urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai berikut :

- 1) Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- 2) Kurangnya tenaga SDM yang berbasis kompetensi teknis di bidang penanggulangan kebakaran.
- 3) Adanya pemukiman penduduk yang padat dan akses jalan kecil yang tidak bisa dilalui kendaraan pemadam kebakaran.
- 4) Tingkat kepedulian masyarakat akan pentingnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran masih kurang.
- 5) Kesadaran pemilik bangunan untuk melengkapi bangunan dengan system proteksi kebakaran masih kurang.
- 6) Keterbatasan jumlah sumber daya, baik sumber daya aparatur maupun sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan tupoksi.

Untuk Solusi Sub-urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai berikut ::

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana melalui penambahan pos pemadam kebakaran serta pengadaan kendaraan unit tangki, pancar dan rescue.
- 2) Perlu adanya bimbingan teknis terhadap anggota pemadam..
- 3) Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan bangunan gedung yang dilandasi penegakan hukum.
- 4) Peningkatan partisipasi masyarakat melalui kelompok masyarakat peduli api yang ada di setiap Kelurahan/Desa se-Kabupaten Banyuwangi sebagai langkah preventif kebakaran.
- 5) Peningkatan kerjasama dengan para pemangku kebijakan (*stakeholder*) dalam upaya pencegahan penanganan kebakaran khususnya wilayah Kabupaten Banyuwangi.

- 6) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi yaitu dengan meningkatkan keterampilan petugas pemadam kebakaran melalui pendidikan dan pelatihan atau kursus-kursus singkat guna mendukung tugas pokok dan fungsi.

4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal menyebutkan bahwa jenis pelayanan dasar dalam bidang sosial adalah :

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota.

4.6.2 Target Pencapaian

Tabel 4.29

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024

N O.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	KET.
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai

N O.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	KET.
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial di luar panti	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang sosial
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten / kota yang akan dipenuhi)		

4.6.3 Realisasi

Tabel 4.30
Hasil Pencapaian SPM Bidang Sosial

N O	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					100%		
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti					100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	63	63	0	100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100%	
	1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	1	1	0	100.00 %	
	2. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	21	21	0	100.00 %	
	3. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	1	1	0	100.00 %	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	(merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)						
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	21	21	0	100.00 %	
	5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	20	20	0	100.00 %	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	21	21	0	100.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	86	86	0	100.00 %	
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	86	86	0	100.00 %	

N O	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)						
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	21	21	0	100.00 %	
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	21	21	0	100.00 %	
	(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)						
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	1	1	0	100.00 %	
	(pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)						
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0	100.00 %	
	(pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)						
	13 . Layanan rujukan	Orang	0	0	0	100.00 %	
	(layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)						
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Pant					100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI	Orang	32	32	0	100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu	Jumlah Mutu	Mutu Yang	100.00 %	



N O	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUA N	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCA PAIAN	AKS I
			Yang Harus Dilayan i/ Dipenu hi	Yang Terlayan i/ Terpenu hi	Belum Terlayan i/ Terpenu hi		
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	32	32	0	100.00 %	
	layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial						
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	32	32	0	100.00 %	
	(merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)						
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	1	1	0	100.00 %	
	(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)						
	4 . Penyediaan sandang	Orang	1	1	0	100.00 %	
	(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)						
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	1	1	0	100.00 %	
	(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)						
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	27	27	0	100.00 %	

N O	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUA N	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCA PAIAN	AKS I
	bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)						
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	27	27	0	100.00 %	
	(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)						
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	0	100.00 %	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1	1	0	100.00 %	
	(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)						
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	3	4	-1	100.00 %	
	(pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)						
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	3	4	-1	100.00 %	
	(pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)						
	12 . Layanan rujukan	Orang	20	22	-2	100.00 %	
	(layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)						



NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	88	88	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	10	10	0	100.00 %	
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)	Orang	10	10	0	100.00 %	
	3. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	49	49	0	100.00 %	
	4. Penyediaan sandang	Orang	28	28	0	100.00	

N O	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)					%	
	5. Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	29	29	0	100.00 %	
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	28	28	0	100.00 %	
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	33	33	0	100.00 %	
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	33	33	0	100.00 %	
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	36	36	0	100.00 %	



NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	28	28	0	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1	1	0	100.00 %	
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	1	1	0	100.00 %	
	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	9	9	0	100.00 %	
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	7	7	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	31	31	0	100.00	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial					%	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	31	31	0	100.00 %	
	layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis						
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	1	1	0	100.00 %	
	(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)						
	4 . Penyediaan sandang	Orang	1	1	0	100.00 %	
	(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)						
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	1	1	0	100.00 %	
	(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)						
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	1	1	0	100.00 %	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)						
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	1	1	0	100.00 %	
	(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)						
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	12	12	0	100.00 %	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1	1	0	100.00 %	
	(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)						
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	19	19	0	100.00 %	
	(pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)						
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	19	19	0	100.00 %	
	(pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)						

N O	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	8	8	0	100.00 %	
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	55	55	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Penyediaan permakanaan (penyediaan permakanaan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	41	41	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	41	41	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai keb)	Unit	1	1	0	100.00 %	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
			9	81	-72		
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	9	81	-72	100.00 %	
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	1	1	0	100.00 %	

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Dinas Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi adalah sebesar 34.689.780.595 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.30
Alokasi anggaran Dinas Sosial PPKB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024

No	Program	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
SOSIAL				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	10,044,317,399	7,010,542,219	69.80
2	Program Pemberdayaan Sosial	1,101,778,000	1,089,940,160	98.93
3	Program Rehabilitasi Sosial	1,465,906,646	1,411,836,613	96.31
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	5,564,314,050	5,405,642,924	97.15
5	Program Penanganan Bencana	693,289,050	634,050,780	91.46
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	77,000,000	76,650,000	99.55

No	Program	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	675,000,000	663,729,138	98.33
2	Program Perlindungan Perempuan	631,525,450	504,167,510	79.83
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	100,000,000	99,960,400	99.96
4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	150,000,000	147,100,999	98.07
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
1	Program Pengendalian Penduduk	354,120,000	353,961,060	99.96
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana	4,731,300,000	4,413,780,755	93.29
3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	9,101,230,000	9,082,480,900	99.79
TOTAL PAGU		34,689,780,595	30,893,843,458	89.06

4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan personil yang dilibatkan dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi adalah sejumlah 25 PNS dan 37 PTT-PK (THL) serta Pilar – pilar sosial (PSM, TKSK, TAGANA, PKH, Sakti Peksos)

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

a. Pelayanan Pada Penyandang disabilitas terlantar diluar panti

1) Permasalahan :

- a) Data penyandang disabilitas terlantar diluar panti masih belum valid
- b) Masih banyak penyandang disabilitas yang belum mandiri
- c) Layanan data dan pengaduan
- d) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial

- 2) Solusi :
- a) Dilakukan pendataan kepada seluruh penyandang disabilitas diluar panti dan diupgrade secara berkala oleh pendamping disabilitas dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
 - b) Mengarahkan penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan sesuai kemampuan dan pengelompokan disabilitas
- b. Pelayanan Pada Anak terlantar diluar panti
- 1) Permasalahan :
- a) Data kependudukan Anak belum valid
 - b) Belum terpenuhinya kebutuhan dasar anak
 - c) Pola asuh keluarga/orang tua yg kurang
 - d) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti Kepemilikan NIK
 - e) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
 - f) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar
- 2) Solusi :
- a) Berkoordinasi dengan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - b) Berkoordinasi dengan Sentra Mahatmiya Bali Kemensos, Lembaga Filantropi serta pengusulan di APBD untuk pemenuhan dasar anak
 - c) Bekerjasamadengan Lembaga/Komunitas pemerhati anak untuk pelaksanaan parenting
- c. Pelayanan Pada Lanjut Usia terlantar diluar panti
- 1) Permasalahan :
- a) Data kependudukan yang tidak Valid
 - b) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti
- 2) Solusi :
- a) Berkoordinasi dengan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
- d. Pelayanan Pada Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti
- 1) Permasalahan :
- a) Belum adanya shelter untuk PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)
 - b) Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat

- 2) Solusi :
 - a) Penyusunan perbup tentang pembentukan UPT shelter layanan PPKS
 - b) Pengusulan alokasi anggaran operasional dan penambahan SDM untuk UPT Shelter layanan PPKS
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota
 - 1) Permasalahan :
 - a) Keterbatasan Anggaran, sarana prasarana dan SDM
 - b) Penyediaan permukiman
 - c) Penyediaan sandang
 - d) Penanganan khusus bagi kelompok rentan
 - 2) Solusi :
 - a) Pengusulan penambahan alokasi anggaran, pengadaan sarana prasarana serta penambahan SDM

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab Kepala Daerah sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki andil yang cukup besar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang oleh Pemerintah Pusat kewenangannya diserahkan kepada Daerah.

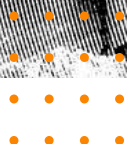
Diharapkan nantinya hasil dari pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025 yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 ini dapat memberikan masukan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar dapat dijadikan pedoman dalam menyusun strategi pembangunan daerah di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan tahun 2024 adalah tahun terakhir masa jabatan Bupati Banyuwangi dan Wakil Bupati Banyuwangi hasil Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 lalu.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh stakeholder dan elemen masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode tahun 2021 - 2024. Proses penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banyuwangi pada periode tersebut tidak terlepas dari dukungan legislatif, jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi termasuk pemerintah desa, seluruh stakeholder pembangunan, seluruh masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang telah mendukung serta mensukseskan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan dalam hal pembangunan daerah dan kemasyarakatan.



KABUPATEN
BANYUWANGI

LAMPIRAN REALISASI BELANJA



KABUPATEN BANYUWANGI

REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
		Operasi		Modal		Tidak Terduga			
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.616.972.672.714,79	184.047.554.911,79	291.057.680.666,17	121.781.096.722,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	958.658.482.001,0	118.708.313.178,00	1.899.331.500,00	1.171.835.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10101 Dinas Pendidikan	958.658.482.001,0	118.708.313.178,00	1.899.331.500,00	1.171.835.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10101 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	957.200.283.801,0	104.347.249.578,00	446.611.600,00	446.611.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10101 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.458.198.200,00	14.361.063.600,00	1.452.719.900,00	725.224.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	526.676.183.784,7	32.109.480.598,79	83.048.355.127,17	1.428.798.154,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10201 Dinas Kesehatan	334.584.889.791,7	32.109.480.598,79	17.915.008.156,17	1.428.798.154,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10201 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	193.462.420.809,5	32.040.682.325,53	564.220.749,27	439.090.827,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10201 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	135.908.957.326,2	68.798.273,26	17.283.846.406,90	975.707.327,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10201 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.064.066.000,00	0,00	49.400.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10201 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	144.200.000,00	0,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10201 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.005.245.656,00	0,00	6.741.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	102010 Dinas Kesehatan - RSUD Blambangan	116.982.875.000,0	0,00	29.732.894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	102010 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	116.982.875.000,0	0,00	2.317.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	102010	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0,00	0,00	27.415.769.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1										
1	102010	2	Dinas Kesehatan - RSUD Genteng	75.108.418.993,00	0,00	35.400.452.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	102010	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	75.108.418.993,00	0,00	5.141.581.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	102010	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0,00	0,00	30.258.871.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	91.598.240.218,00	29.509.803.052,00	190.450.125.539,00	109.652.655.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10301		Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	58.634.884.408,00	22.138.213.244,00	96.638.730.667,00	75.550.890.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10301	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.868.392.053,00	7.245.315.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10301	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	770.959.200,00	546.725.100,00	186.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10301	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	0,00	0,00	2.455.209.812,00	1.616.926.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10301	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	4.072.679.561,00	2.839.160.711,00	6.460.258.952,00	4.896.336.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10301	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	0,00	0,00	4.598.586.057,00	4.098.936.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10301	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	12.515.473.594,00	11.099.632.004,00	82.891.303.846,00	64.891.791.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10301	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	407.380.000,00	407.380.000,00	46.900.000,00	46.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10302		Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	32.963.355.810,00	7.371.589.808,00	93.811.394.872,00	34.101.765.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10302	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.181.441.003,00	2.672.184.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10302	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.630.280.807,00	1.239.996.707,00	93.811.394.872,00	34.101.765.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10302	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.151.634.000,00	3.459.408.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	497.124.600,00	199.178.400,00	14.413.797.000,00	9.527.807.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10301	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	497.124.600,00	199.178.400,00	14.413.797.000,00	9.527.807.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10301 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	447.252.300,00	199.178.400,00	15.259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10301 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	49.872.300,00	0,00	4.609.852.200,00	3.449.746.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10301 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	0,00	0,00	9.788.685.800,00	6.078.060.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	24.085.019.596,00	2.640.185.155,00	203.479.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10503	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.578.872.305,00	605.414.496,00	158.929.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10503 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.323.108.605,00	605.414.496,00	139.253.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10503 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	255.763.700,00	0,00	19.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10501	Satuan Polisi PP	13.764.676.226,00	1.456.141.948,00	44.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10501 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.309.752.601,00	1.456.141.948,00	44.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10501 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	454.923.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10502	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.741.471.065,00	578.628.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10502 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.166.471.065,00	538.178.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10502 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	575.000.000,00	40.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	15.457.622.515,00	880.594.528,00	1.042.591.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	10601	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB	15.457.622.515,00	880.594.528,00	1.042.591.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10601 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.037.890.199,00	880.594.528,00	1.042.591.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10601 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.061.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10601 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.414.907.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10601 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	976.996.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10601 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	766.641.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10601 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	155.796.900.869,00	13.846.889.394,00	15.948.972.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	7.071.182.910,00	648.203.765,00	389.516.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	20701	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	7.071.182.910,00	648.203.765,00	389.516.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	20701 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.199.857.110,00	648.203.765,00	389.516.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	20701 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	20701 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	137.855.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	20701 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	379.607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	20701 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	288.863.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.560.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10601	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB	2.560.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	10601	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.445.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10601	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	685.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10601	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10601	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	280.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	32701	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	32701	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	207.616.000,00	0,00	30.799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	32701	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	32701	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	40101		Sekretariat Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	40101	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	29.050.523.671,00	3.005.822.936,00	4.606.275.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21101		Dinas Lingkungan Hidup	27.638.079.887,00	2.798.145.400,00	4.416.818.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21101	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.068.023.642,00	2.552.652.300,00	554.726.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21101	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	122.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21101	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	493.960.000,00	0,00	336.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21101	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	316.788.800,00	0,00	159.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.536.486.922,00	3.754.698.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21601	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	10.536.486.922,00	3.754.698.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21601 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.768.086.922,00	986.298.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21601 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.768.400.000,00	2.768.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	12.704.496.021,00	1.131.045.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21701	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	12.704.496.021,00	1.131.045.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21701 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.704.496.021,00	1.131.045.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	8.717.896.130,00	622.822.262,00	158.059.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21801	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.717.896.130,00	622.822.262,00	158.059.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21801 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.847.385.830,00	622.822.262,00	158.059.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21801 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21801 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21801 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	645.568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21801 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	49.942.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21801 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	24.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	9.005.286.273,00	435.395.290,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21901	Dinas Pemuda dan Olah Raga	9.005.286.273,00	435.395.290,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	21901	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.653.286.273,00	435.395.290,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21901	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	753.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21901	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	3.599.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	9.783.766.297,00	625.955.316,00	171.814.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	22201		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9.783.766.297,00	625.955.316,00	171.814.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	22201	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.836.259.297,00	625.955.316,00	171.814.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	22201	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	305.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	22201	03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	1.030.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	22201	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	138.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	22201	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	473.907.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.439.691.803,00	423.452.788,00	10.354.749.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	22301		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.439.691.803,00	423.452.788,00	10.354.749.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	22301	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.604.691.803,00	423.452.788,00	4.749.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	22301	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	178.618.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	22301		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	178.618.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	22301	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	178.618.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	60.196.496.987,00	3.602.120.316,00	41.820.752.029,00	2.447.347.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	32701	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.017.462.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	32701	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	9.380.020.850,00	0,00	99.849.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	842.971.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	20701		Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	842.971.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	20701	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	743.766.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	20701	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	99.204.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			URUSAN UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	150.971.721.094,00	16.382.770.068,00	3.157.829.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			SEKRETARIAT DAERAH	77.344.918.951,00	4.549.951.076,00	1.785.847.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	40101		Sekretariat Daerah	77.344.918.951,00	4.549.951.076,00	1.785.847.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	40101	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.642.919.951,00	4.524.108.603,00	1.485.847.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	40101	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	24.451.999.800,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	40101	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.249.999.200,00	25.842.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			SEKRETARIAT DPRD	73.626.802.143,00	11.832.818.992,00	1.371.981.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	40201		Sekretariat DPRD	73.626.802.143,00	11.832.818.992,00	1.371.981.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	40201	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	43.225.960.743,00	8.621.801.567,00	1.204.202.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	40201	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	30.400.841.400,00	3.211.017.425,00	167.779.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			URUSAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	128.999.461.971,00	5.071.246.691,00	2.609.998.200,00	0,00	0,00	0,00	9.735.112.844,00	9.735.112.844,00
5			PERENCANAAN	18.732.660.794,00	1.055.625.742,00	387.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	50101		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	18.732.660.794,00	1.055.625.742,00	387.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	50101	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.739.600.044,00	1.055.625.742,00	374.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	50101	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.306.060.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	50101	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.687.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			KEUANGAN	86.653.599.222,00	2.344.100.066,00	1.747.946.200,00	0,00	0,00	0,00	9.735.112.844,00	9.735.112.844,00
5	50201		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	65.937.241.685,00	1.247.425.119,00	856.740.400,00	0,00	0,00	0,00	9.735.112.844,00	9.735.112.844,00
5	50201	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.896.077.271,00	1.140.377.119,00	776.740.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	50201	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	52.016.137.414,00	107.048.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.735.112.844,00	9.735.112.844,00
5	50201	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.025.027.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	50202		Badan Pendapatan Daerah	20.716.357.537,00	1.096.674.947,00	891.205.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	50202	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.738.110.187,00	1.096.674.947,00	891.205.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	50202	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.978.247.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			KEPEGAWAIAN	21.619.754.405,00	1.588.475.883,00	475.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	50301		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	21.619.754.405,00	1.588.475.883,00	475.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	50301	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.160.032.505,00	1.552.046.583,00	475.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	50301	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.459.721.900,00	36.429.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	800.000.000,00	83.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	50301		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	800.000.000,00	83.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	50301	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	800.000.000,00	83.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	70118	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	393.397.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	70118	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.841.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	70118	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.454.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	70119		Kecamatan Pesanggaran	3.074.101.547,00	221.423.645,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	70119	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.360.127.712,00	211.423.645,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	70119	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	124.282.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	70119	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	576.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	70119	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.362.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	70119	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.454.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	70120		Kecamatan Genteng	3.167.518.380,00	215.441.348,00	10.541.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	70120	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.509.521.080,00	215.441.348,00	10.541.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	70120	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	124.281.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	70120	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	508.869.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	70120	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.392.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	70120	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	70121		Kecamatan Tegalsari	2.520.953.443,00	131.339.853,00	51.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	70123	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.435.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	70124		Kecamatan Kalibaru	3.102.821.794,00	194.752.189,00	6.411.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	70124	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.448.902.944,00	183.058.189,00	6.411.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	70124	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	124.443.150,00	11.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	70124	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	515.272.500,00	614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	70124	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.758.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	70124	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.444.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	70125		Kecamatan Blimbingsari	3.169.382.944,00	239.155.772,00	33.429.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	70125	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.474.907.336,00	214.105.772,00	33.429.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	70125	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	124.262.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	70125	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	542.769.950,00	25.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	70125	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.534.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	70125	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.908.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			URUSAN UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	14.152.503.994,00	473.422.752,00	278.263.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	14.152.503.994,00	473.422.752,00	278.263.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	80101		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.152.503.994,00	473.422.752,00	278.263.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	80101	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.481.870.044,00	461.244.252,00	278.263.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

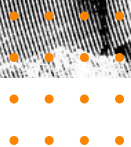
8	80101	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.029.657.450,00	12.178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	80101	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	5.939.843.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	80101	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	75.723.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	80101	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	523.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	80101	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.101.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah:				2.262.448.595.602,79	233.026.267.339,79	363.229.339.055,17	125.311.842.988,31	20.000.000.000,00	0,00	430.703.184.600,00	9.735.112.844,00



KABUPATEN
BANYUWANGI

LAMPIRAN

IKK OUTCOME



INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME (HASIL)
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
TERHADAP LPPD TAHUN 2024

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	JENIS DATA/ RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	PENDIDIKAN	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD ----- x 100% Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan	(46,903 / 47,770) = 98.1851 %	
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar ----- x 100% Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan	(142,794 / 147,562) = 96.7688 %	
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama ----- x 100% Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan	(76,128 / 80,241) = 94.8742 %	
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan ----- x 100% Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan	(4,772 / 5,136) = 92.9128 %	
2	KESEHATAN	5	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan ----- x 100% Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota	(1,436 / 1,785,316) = 0.0804 %	
		6	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi ----- x 100% Jumlah RS di Kabupaten/Kota	(13 / 13) = 100 %	
		7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ----- x 100% Jumlah ibu hamil di Kabupaten/Kota	(17,400 / 17,523) = 99.2981 %	
		8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan ----- x 100% Jumlah ibu bersalin di Kabupaten/Kota	(17,523 / 17,523) = 100 %	

9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendaatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten/Kota	(17,225 / 17,225) = 100 %	
10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah balita di Kabupaten/Kota	(97,179 / 97,179) = 100 %	
11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten/Kota	(213,196 / 213,196) = 100 %	
12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten/Kota	(1,119,519 / 1,119,519) = 100 %	
13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga Negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah warga Negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten/Kota	(243,821 / 243,821) = 100 %	
14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten/Kota	(106,061 / 106,061) = 100 %	
15	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah penderita DM di Kabupaten/Kota	(26,678 / 26,678) = 100 %	
16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten/Kota	(2,873 / 2,873) = 100 %	
17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah penderita TBC di Kabupaten/Kota	(21,234 / 21,234) = 100 %	
18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar ----- x 100% Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten/Kota	(25,276 / 25,276) = 100 %	

3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (ha) ----- x 100% Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (ha)	(447,104 / 501,759) = 89.1073 %	
		20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (ha) ----- x 100% Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (ha)	(20.29 / 20.29) = 100 %	
		21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting ----- x 100% Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota	(30,224 / 30,224) = 100 %	
		22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten/Kota ----- x 100% Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota tersebut	(654,769 / 671,006) = 97.5802 %	
		23	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ----- x 100% Jumlah rumah di Kabupaten/Kota	(549,754 / 549,754) = 100 %	
		24	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya ----- x 100 % Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	(474 / 474) = 100 %	
		25	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota yang mantap ----- x 100% Jumlah Panjang jalan Kabupaten/Kota	(2,323.89 / 2,471.68) = 94.0207 %	

		26	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis ----- x 100% Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	(2,320 / 2,320) = 100 %	
		27	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi ----- x 100% Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	(1,160 / 1,160) = 100 %	
4	PERUMAHAN RAKYAT	28	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2024 ----- x 100% Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2024	(66 / 66) = 100 %	
		29	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota	Rumah Tangga penerima fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan tanah dan/atau bangunan+ rumah tangga penerima subsidi uang sewa+rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni ----- x 100% Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan		
		30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) ----- x 100% Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	(112.24 / 112.24) = 100 %	
		31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni ----- x 100% Jumlah total unit rumah Kabupaten/Kota	(11,218 / 549,754) = 2.0405 %	
		32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah Perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ----- x 100% Jumlah Perumahan Kabupaten/Kota	(26,433 / 26,433) = 100 %	
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	33	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani ----- x 100% Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	(44 / 44) = 100 %	
		34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan ----- x 100% Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	(9 / 9) = 100 %	

		35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana ----- x 100% Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan	(136,649 / 136,649) = 100 %	
		36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ----- x 100% Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	(20,247 / 20,247) = 100 %	
		37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana ----- x 100 % Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	(213 / 213) = 100 %	
		38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten/Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di Kabupaten/Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ----- x 100% Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota	(175 / 175) = 100 %	
		39	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran (menit)	12,63 Menit	
6	SOSIAL	40	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ----- x 100% Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	(2,331 / 2,331) = 100 %	

		41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ----- x 100% Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	(335 / 335) = 100 %	
7	TENAGA KERJA	42	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD ----- x 100% Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota	(15 / 15) = 100 %	
		43	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi ----- x 100% Jumlah tenaga kerja keseluruhan	(7,790 / 102.673) = 7,587.1943 %	
		44	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) ----- Jumlah tenaga kerja	(63,693,570,000,000 Ket. A / 1,009,550 Ket. B) = 63,091,050.4680 Ket. D	
		45	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ----- x 100% Jumlah perusahaan	(5,725 / 6,995) = 81.8442 %	
		46	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan ----- x 100% Jumlah pencaker yang terdaftar	(4,337 / 4,618) = 93.9151 %	
8	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	47	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD ----- x 100% Jumlah seluruh belanja operasional dan modal APBD	(50,408,860,952 / 3,291,345,918,214) = 1.5316 %	
		48	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi ----- x 100% Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	(62 / 62) = 100 %	
		49	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan ----- x 100.000 Jumlah penduduk perempuan	(81 Orang / 894,543 Orang) x 100 Rasio = 0.0091	

9	PANGAN	50	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota ----- x 100% Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan	(193.04 / 193.04) = 100 %	
10	PERTANAHAN	51	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) ----- x 100% seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	(1,639,978.05 / 1,639,978.05) = 100 %	
		52	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum ----- x 100% Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Ada (11,700 / 11,700) = 100 %	
		53	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) ----- x 100% Luas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan	(2,663,967 / 2,663,967) = 100 %	
		54	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha; ----- x 100% Jumlah penerima tanah obyek landreform	Tidak Ada	
		55	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah ----- x 100% Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan	ada (1,983,041 / 1,983,041) = 100 %	
		56	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani ----- x 100% Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	Ada (1 / 1) = 100 %	
11	LINGKUNGAN HIDUP	57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	IKLH Kabupaten/Kota = (IKA 0,376) + (IKU 0,405) + (ITH 0,219). IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan	72.22 Indeks Kualitas Pencemaran Air 60 Indeks Kualitas Pencemaran Udara 87.02	
		58	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Total Volume sampah yang dapat ditangani ----- x 100% Jumlah seluruh Total Volume Timbunan sampah tahun berjalan Kabupaten/Kota	(193,435.55 / 306,270.96) = 63.1583 %	

		59	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota ----- x 100% Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan		
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	60	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah Penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman ----- x 100% Jumlah penduduk wajib KTP-el	(1,389,545 / 1,389,767) = 99.9840 %	
		61	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA ----- x 100% Jumlah anak usia 0-17 tahun	(262,282 / 385,742) = 67.9942 %	
		62	Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir ----- x 100% Jumlah anak usia 0-18 tahun	(392,499 / 410,599) = 95.5918 %	
		63	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama ----- x 100% Jumlah PD	(9 / 11) = 81.8182 %	
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	64	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal yang memenuhi kriteria Desa Berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah Desa Tertinggal (per-awal tahun 2024)	(189 / 189) = 100 %	
		65	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah desa berkembang (per awal tahun 2024)	(189 / 189) = 100 %	
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	66	TFR (Angka Kelahiran Total)	TFR (Angka Kelahiran Total) 5 _{ASFR}		2,02
		67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	(182,449 / 254,583) = 71.6658 %	
		68	Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	(16,975 / 254,583) = 6.6678 %	

15	PERHUBUNGAN	69	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	<p>Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)</p> <p>o IK1 (angkutan jalan) = (jumlah trayek yang dilayani pd Kabupaten/Kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada Kabupaten/Kota tersebut</p> <p>o IK2 (Angkutan Sungai, danau, dan penyeberangan) = jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada Kabupaten/Kota tersebut x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Kabupaten/Kota tersebut)</p> <p>Keterangan:</p> <p>IK1 (Angkutan Jalan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP • Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu <p>IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil • Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wialyah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu <p>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan</p>	0,817	
		70	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,325	
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	71	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	<p>Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah PD</p>	(56 / 56) = 100 %	
		72	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	<p>Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah Layanan Publik</p>	(14 / 14) = 100 %	
		73	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<p>Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah Penduduk</p>	(1,237,388 / 1,237,388) = 100 %	

17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	74	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset ----- x 100% Jumlah seluruh koperasi	(537 / 634) = 84.7003 %	
		75	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha ----- x 100% Jumlah usaha mikro keseluruhan	(149,590 / 201,951) = 74.0724 %	
18	PENANAMAN MODAL	76	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota /Kota	(Jumlah Investasi tahun 2024 - jumlah Investasi tahun 2023) di Kabupaten/Kota ----- x 100% Jumlah Investasi tahun 2023 di Kabupaten/Kota	(4,537,926,933,269 - 4,887,783,659,187) / 4,887,783,659,187 = -7.1578 %	
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	77	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten/Kota ----- x 100% Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kabupaten/Kota	(194.962 / 373.163) = 52.2458 %	
		78	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten/Kota ----- x 100% Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kabupaten/Kota	(118.476 / 373.163) = 31.7491 %	
		79	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	63 Medali/Penghargaan	
20	STATISTIK	80	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ----- x 100% Jumlah PD	(56 / 56) = 100 %	
		81	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah ----- x 100% Jumlah PD	(56 / 56) = 100 %	
21	PERSANDIAN	82	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi ----- x 100% Jumlah area penilaian	(491 / 645) = 76.1240 %	
22	KEBUDAYAAN	83	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan ----- x 100% Jumlah cagar budaya yang terdata	(28 / 28) = 100 %	
23	PERPUSTAKAAN	84	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	88,73	

		85	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	<p>Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)</p> <p>UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan</p>	70,7	
24	KEARSIPAN	86	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	<p>$T = (a+i+s+j)/4$</p> <p>T = tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip l = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN</p>	$(100 + 100 + 100 + 76.06) / 4 = 94.015$	
		87	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	<p>$T = (m+b+g+a+c+i)/6$</p> <p>T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban</p> <p>m= tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g= tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibuabrkan dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a= tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c= tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK l= tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK</p>	83,33	

25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	88	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota ----- x 100 % Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan	(97,389.4 / 82,737) = 117.7096 %	
26	PARIWISATA	89	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan tahun 2024 - Jumlah wisatawan tahun 2023 ----- x 100% Jumlah wisatawan tahun 2023	(122,904 - 69,639) / 69,639 = 76.4873 %	
		90	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	(Jumlah wisatawan tahun 2024 - Jumlah wisatawan tahun 2023) ----- x 100% Jumlah wisatawan tahun 2023	(3,282,241 - 3,112,443) / 3,112,443 = 5.4555 %	
		91	Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah kamar yang terjual ----- x 100% Jumlah kamar yang tersedia Jumlah Kamar yang tersedia x 365 hari	(654,585 / 1,290,882) = 50.7084 %	
		92	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB ----- x 100% Total PDRB Berlaku	(3,421,470,000 / 108,922,590,000) = 3.1412 %	
		93	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Total realiasi PAD dari sektor pariwisata ----- x 100% Total realisasi PAD	(60,798,260,657 / 597,505,169,804.92) = 10.1754 %	
27	PERTANIAN	94	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun (Ton) ----- x 100% Luas panen (ha)	(1,034,918 / 154,775) = 668.6597 %	
		95	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus Tahun 2024 – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular Tahun 2023 ----- x 100% Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular Tahun 2023	(309 - 1,975) / 1,975 = -84.3544 %	
28	KEHUTANAN	96	Indikator Kinerja Kunci Urusan Kehutanan Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan	Tidak	
				Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi sebanyak	0 Kelompok Masyarakat	
				Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasiha	0 Ha	
				Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun	0 Kejadian	

29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	97	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin ----- x 100% Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	Tidak ada	
30	PERDAGANGAN	98	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan ----- x 100% Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten/Kota	(613 / 623) = 98.3949 %	
		99	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi ----- x 100% RDKK X = a/(bxc) x 100 X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan a = Jumlah pupuk yang disalurkan b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)	(67,287.06 / 111,467.51) = 60.3647 %	
					67.07 %	
		100	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan ----- x 100% Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten/Kota	(36,907 / 89,328) = 41.3163 %	
31	PERINDUSTRIAN	101	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	(jumlah industri kecil dan menengah tahun 2024 - Jumlah Industri kecil dan menengah tahun 2023) ----- x 100% Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2023	(28,239 - 28,130) / 28,130 = 0.3875 %	

102	<p>Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota)</p>	<p>Jumlah Indikator Pembangunan Industri dalam RPIK ----- x 100%</p> <p>Jumlah Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN</p> <p>Definisi Operasional : Mengukur persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP</p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> •Ke-5 sasaran pembangunan industri daerah merupakan sasaran yang ada dalam dokumen Rencana Pembangunan Industri Propinsi (RPIP) dalam jangka panjang dan wajib ditentukan sasaran tahunannya dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan. Target tahunan tersebut selanjutnya akan dijadikan tolak ukur pencapaian di akhir tahun Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data ekspor industri pengolahan nonmigas di daerah asal barang Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data industri skala besar, menengah dan kecil yang telah memiliki perizinan berusaha Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data total penyerapan tenaga kerja oleh industri pengolahan nonmigas dalam satu tahun ▪ Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) merupakan 	<p>(382.5 / 500) = 76.5 %</p>	
103	<p>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh</p>	<p>Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100%</p> <p>Jumlah izin yang dikeluarkan</p>	<p>(215 / 215) = 100 %</p>	
104	<p>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan</p>	<p>Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100%</p> <p>Jumlah izin yang dikeluarkan</p>		
105	<p>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang</p>	<p>Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100%</p> <p>Jumlah izin yang dikeluarkan</p>		

		106	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	<p>1) Keterkinian informasi industri :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) <p>2) Kelengkapan informasi industri meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) - Informasi bahan bakar/energi (10%) - Informasi tenaga kerja (10%) - Informasi Investasi (10%) <p>Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)</p>	100	<p>1. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (25%) Ada</p> <p>2. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) Ada</p> <p>3. Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) Ada</p> <p>4. Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Ada</p>	
32	TRANSMIGRASI	107	IKK Output Urusan Transmigrasi Kabupaten/Kota	<p>Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi</p> <p>Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya sebanyak (Satuan Pemukiman berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 keluarga)</p> <p>Jumlah satuan permukiman yang dibina sebanyak</p>	0 Kawasan		
					0 Permukiman		
					0 Permukiman		



KABUPATEN
BANYUWANGI

LAMPIRAN FUNGSI PENUNJANG



**INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
TERHADAP LPPD TAHUN 2024**

No.	FUNGSI PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI	No.	JENIS DATA/ RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	PERENCANAAN KEUANGAN	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	1	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan ----- x 100% Jumlah APBD	(580,152,007,004.72 / 3,318,380,677,018.08) = 17.4830 %	
		Rasio PAD	2	Jumlah PAD ----- X 100% Jumlah Pendapatan pada APBD	(597,514,670,440.06 / 3,370,297,295,000.38) = 17.7288 %	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3/level 4/level 5) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Ada 3,43	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	4	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3/level 4/level 5) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Ada 3,295	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	5	Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditures ----- x 100% Jumlah belanja APBD	(2,790,392,120,004.07 - 638,993,463,411.51) / 3,318,380,677,018.08 = 64.8328 %	
		Opini Laporan Keuangan	6	Opini Laporan Keuangan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir	Opini Laporan Keuangan dalam 10 Tahun Terakhir : 10 WTP	
2	PENGADAAN	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	7	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n ----- x 100% Jumlah kontrak keseluruhan tahun n		
		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	8	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif ----- x 100% Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	(22,560 / 30,515) = 73.9309 %	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	9	Jumlah nilai belanja operasional dan modal yang melalui pengadaan ----- X 100% total belanja operasional dan modal	(1,310,659,608,418.79 / 1,796,782,817,333.36) = 72.9448 %	

		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	10	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) ----- X 100% Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)	(1,063,595,388,889.99 - 907,098,808,744.84) / 907,098,808,744.84 = 17.2524 %	
3	KEPEGAWAIAN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	11	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas diluar tenaga pendidik dan tenaga kesehatan ----- x 100% Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	(866 / 1,623) = 53.3580 %	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	12	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) ----- x 100% Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	(307 / 1,623) = 18.9156 %	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	13	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi ----- x 100% Seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	(185 / 307) = 60.2606 %	
4	MANAJEMEN KEUANGAN	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal)	14	Realisasi Belanja Nilai absolut dari {----- - 1} X 100% Total Belanja APBD (sebelum perubahan)	(3,318,380,677,018.08 / 3,429,712,298,993) - 1 = -3.2461 %	
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal)	15	Total PAD dalam realisasi Nilai absolut dari {----- - 1} X 100% Total PAD dalam APBD (sebelum perubahan)	(597,514,670,440.06 / 605,000,000,000) - 1 = -1.2372 %	
		Assets Management	16	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	Ya Apakah ada daftar asset tetap ? Ada Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap ? Ada	

		Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	17	<p>Nilai realisasi SiLPA ----- x 100%</p> <p>Total belanja anggaran tahun sebelumnya</p>	<p>(89,182,473,803.30 / 3,748,541,399,607.14) = 2.3791 %</p>	
5	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	18	<p>Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda (Unit Pelayanannya) ----- x 100%</p> <p>Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda (Unit Pelayanannya)</p>	<p>(84,351,394,867 / 88,197,391,467) = 95.6393 %</p>	
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	19	<p>Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda ----- x 100%</p> <p>Total jumlah dokumen yang telah dirinci (11 Dokumen) Daftar dokumen yang diminta : Ringkasan RKA SKPD, Ringkasan RKA PPKD, Raperda APBD, Raperda Perubahan APBD, Perda APBD, Perda Perubahan APBD, Ringkasan DPA SKPD, Ringkasan DPA PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA PPKD, LKPD Yang Sudah Di Audit, Opini atas LKPD</p>	<p>(12 / 12) = 100 %</p>	